

JURNAL GICI
Volume 5. No.1 Tahun 2015
ISSN 2088 – 1312

SUSUNAN PENGURUS REDAKSI

Pimpinan Umum : Dr. Ahmad Subagyo,SE,MM
Pimpinan Redaksi : Dr. Akhmad Sodikin, SE, MM, M.Si.
Wakil Pimpinan Redaksi : Sugiharto , SH, MM
Redaktur Pelaksana : Ir. Muhammad Masyhuri, MBA.

Redaktur Ahli :

Nurdin Rifai, SE, M.Sc (STIE “GICI”)
Dr. M.Muflih, M.A. (Politeknik Negeri Bandung)
Dr. Oneng Nurul Badariah, MA. (Universitas Muhammadiyah Jakarta)
H.Armanto Wicaksono, SE. Akt. MM. (Universitas Bina Nusantara)

Anggota Redaktur Pelaksana:

Martino Wibowo, SE, M.Si
Krisna Sudjana, SE, MM

Reviewer:

Dr. H. Suwandi (Universitas Bakrie Jakarta)
Dr. H. Desmadi Saharuddin, Lc., MA. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Sekretaris Redaksi :

Nuryani Susana , S.Pd, SH, MH.
Desain Grafis : Andhika Septiawang Putra
Tata Usaha dan Sirkulasi : Agustini, S.Kom, MM.

Diterbitkan oleh GICI PRESS
2015

JURNAL GICI adalah Jurnal keuangan dan bisnis yang menyajikan berbagai hasil penelitian baik berbasis pendekatan kualitatif maupun kuantitatif dan diterbitkan secara periodik semesteran (dua kali dalam setahun) dengan mengangkat tema-tema tertentu yang dipilih sesuai dengan issue-issue yang sedang hangat dibicarakan di publik (top issues). Topik yang diangkat berkisar pada masalah keuangan dan bisnis.

Alamat Redaksi :

STIE GICI DEPOK, Jl. Margonda Raya N o. 224
Kota Depok, Jawa Barat.

Telp. 021-7760806, facs . 021-776807.

www.gicibusinessschool.ac.id

e-mail : bgy2000@ yahoo.com

KATA PENGANTAR

JURNAL GICI, tanpa terasa telah memasuki usia ke-lima sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2011. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas ijin-Nya-lah edisi No.1 Vol.5 tahun 2015 ini dapat terbit kembali. Penerbitan edisi ini merupakan terbitan dengan memakan waktu yang paling panjang karena Redaksi sedang berbenah untuk memperbaiki sistem penerbitan, terutama kualitas isi dari Jurnal ini. Tiap-tiap tulisan telah mendapatkan review dari para ahli yang bersedia untuk melakukan review terhadap artikel-artikel yang akan dimuat dalam terbitan edisi ini.

Edisi Volume V ini menjadi salah satu terbitan yang multi-tematik karena kajian yang ditulis para peneliti meliputi analisis makro dan mikro, dengan obyek studi dari perusahaan mikro sampai korporasi, dengan tinjauan perspektif manajemen maupun akuntansi. Menyimak artikel dari Jurnal edisi ini kita akan mendapatkan banyak perspektif dan pandangan baru tentang “Bisnis dan Keuangan”.

Penilaian kinerja korporasi dalam melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi sorotan banyak pihak, terutama *stakeholder* yang berkepentingan secara langsung terhadap perusahaan. Salah satu penulis mengungkap bagaimana praktek GCG di beberapa negara Asean menjadikannya penting terkait dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Masih dalam penilaian GCG yang salah satunya berasal dari unsur pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), variabel-variabel apa yang mempengaruhinya dan bagaimana pengungkapan dalam laporan keuangannya.

Sisi lain, penulis ada yang mengkaji tentang sistem aplikasi pembiayaan berbasis bagi hasil untuk diterapkan dalam Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah (BMT). Sementara penulis lain mengkaji Keuangan Mikro dari sisi model bisnisnya. Yang lebih menarik lagi, ada penulis yang mengkaji “seni” dari sisi ekonomi.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis dan berbagai pihak yang telah membantu terbitnya Jurnal edisi 1 volume ke-5 ini. Secara khusus redaksi ingin mengucapkan terima kasih kepada para *reviewer* (mitra bebestari) yang telah berkenan memberikan saran perbaikan kepada para penulis dalam upaya memenuhi standar penulisan karya ilmiah yang baik.

Mulai tahun 2015 ini JURNAL GICI akan terbit dua kali dalam satu tahun. Akhir kata, perbaikan terus-menerus menjadi prinsip para pengelola Jurnal GICI ini agar kualitas Jurnal ini menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Depok, Medio 2015

Pimpinan Redaksi

JURNAL GICI

Volume 5. No. 1 Tahun 2015

TEMA

Kajian Bisnis Multisektoral dalam pendekatan kualitatif dan Kuantitatif

- Beberapa Variabel Yang Mempengaruhi Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Serta Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan Perusahaan
(*Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Pada Periode Tahun 2009-2011*)
Oleh: Rizky Amalia Yonita, Armanto Witjaksono..... 1 – 9
- The Assessment of Corporate Governance (GCG) Practices Disclosures and Transparency: A study on Indonesia’s Listed State-Owned Enterprises (SOEs)
Oleh: Muhammad Masyhuri..... 10 - 27
- Rancangan Format Aplikasi Sistem Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wattamwil
(*Studi Penelitian Awal*)
Oleh: Rio Eldianson & Rizkison 28 - 40
- Pengaruh Kepemimpinan Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Variabel *Intervening Turnover Intention* di PT. Musica Studio
Oleh: Rizal Bakti dan Rina Astini..... 41 - 56
- Penetapan Wayang Golek Cepak Sebagai Brand Image Kota Indramayu
Oleh: Andriani Prieteedjo..... 57 - 69
- Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta Yang Memiliki Program Studi Akuntansi dengan Akreditasi “A” di Wilayah Jakarta Barat
Oleh: Agustini..... 70 - 82
- Islamic Microfinance Model
(*Study of Implementation microfinance model in Indonesia*)
Oleh: Ahmad Subagyo..... 83 - 96

Beberapa Variabel Yang Mempengaruhi Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Serta Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan Perusahaan

(Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Pada Periode Tahun 2009-2011)¹

Rizky Amalia Yonita²; Armanto Witjaksono

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara
Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480
my_kiraramiroku@yahoo.co.id; armanto@binus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2011 dengan tujuan untuk mengetahui apakah beberapa variabel yakni ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi kegiatan dan pengungkapan CSR pada laporan keuangan perusahaan. Perusahaan BUMN menjadi sampel penelitian karena perusahaan BUMN adalah perusahaan milik Negara sehingga dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam menerapkan CSR dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan perusahaan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah *content analysis* terhadap pengungkapan CSR yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Metode ini dilakukan dengan memberi nilai 1 pada setiap item – item pengungkapan CSR yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan berdasarkan indeks GRI *Guidelines*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan untuk variabel lainnya yakni leverage, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Kata Kunci : CSR, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris

Abstract

This research was conducted at the State-Owned Enterprises (SOEs) listed in Indonesia Stock Exchange period 2009 - 2011 with the aim to determine whether variables such as firm size, profitability, leverage and board size can affect the activities and CSR disclosure in the financial statements of the company. SOEs were chosen as sample because they are firms belong to the government so as to be a role model for other companies in implementing CSR and disclose in the financial statements. The methodology of this research applies a content analysis of the artifacts CSR disclosure in the financial statements. This method involves assigning a value of one on each item of CSR disclosures contained in the financial statements based on index of the GRI Guidelines. The results of this study indicate that variable of profitability affected CSR, whereas for other variables such as leverage, firm size and board size has no significant effect on CSR disclosure.

Key words: CSR, firm size, profitability, leverage, board size

¹ Merupakan penyempurnaan dari makalah berjudul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Serta Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Pada Periode Tahun 2009-2011)”. Makalah tersebut dapat diunduh dari http://library.binus.ac.id/Collections/ethesis_detail/2012-2-00563-AK

² Makalah ini merupakan bagian dari skripsi yang ditulis oleh Rizki Amalia Yonita dengan *supervisor* Armanto Witjaksono

I. PENDAHULUAN

Saat ini, *Corporate Social Responsibility* (atau biasa disebut CSR) menjadi perhatian dan bahan pembicaraan yang sangat banyak di lingkungan bisnis. Disebutkan bahwa CSR dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan yang menggunakannya, baik dari segi ekonomi, sosial dan investasi. Dari segi ekonomi dan sosial dapat dilihat bahwa perusahaan yang menggunakan CSR, dapat membantu perusahaan tersebut untuk bertahan hidup (*sustain*), karena dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan (*social*), maka secara tidak langsung masyarakat akan menyenangi perusahaan tersebut serta produk yang dihasilkan, dengan begitu maka secara tidak langsung hal tersebut akan meningkatkan keuntungan (*profit*). Dari segi investasi, para investor lebih cenderung untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, CSR dapat digunakan sebagai marketing bagi perusahaan. CSR juga dikatakan dapat menghasilkan keuntungan di masa mendatang berupa pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). *Sustainability development* ini memiliki 3 elemen kunci / 3 pilar yang biasa disebut sebagai *Tripple Bottom Line* yang meliputi “*people, planet, profit*” dan ditambah 1 (satu) line lagi yaitu “*procedure*”.

Ketentuan mengenai kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup dicatat dalam PSAK No.1 (revisi 2009) yang menyebutkan bahwa “Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.” (PSAK No.1 revisi 2009 paragraf 12). Selain itu, ketentuan mengenai kepedulian terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Melihat banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan, banyak atau bahkan hampir seluruh perusahaan berlomba-lomba melakukan kegiatan CSR serta mengungkapkannya pada laporan keuangan mereka guna menarik perhatian masyarakat untuk mengalahkan kompetitornya, sehingga membuat banyak peneliti melakukan penelitian dan diskusi mengenai praktik dan motivasi perusahaan untuk melakukan CSR, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, penulis beranggapan penting untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR tersebut antara lain adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran dewan komisaris.

Penelitian mengenai hal ini telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wynna (2010). Penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh kepemilikan manajemen, ukuran (*size*) perusahaan, profitabilitas dan *leverage* perusahaan terhadap pengungkapan CSR dengan menggunakan 12 sample perusahaan yang memenangkan ISRA pada tahun 2009 dengan periode penelitian dari tahun 2005 – 2008 .

Penelitian ini menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan manajemen, *size* perusahaan dan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR, dan menemukan hubungan yang negatif antara *leverage* terhadap pengungkapan CSR. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Felicia (2011). Penelitian ini membahas mengenai pengaruh kepemilikan manajemen, ukuran (*size*) perusahaan dan leverage menggunakan 10 sample perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 – 2010. Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang positif antara ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap pengungkapan CSR dan menemukan hubungan yang negatif antara kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan CSR. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti kembali hal tersebut dengan mengacu kepada kedua penelitian tersebut namun dengan menambahkan analisis index GRI Guidelines per industri dan per emiten sehingga selain dapat menentukan hubungan antara *size*, profitabilitas, *leverage* dan dewan komisaris terhadap CSR, kita juga dapat melihat dan mengetahui bagaimana perlakuan perusahaan terhadap CSR berdasarkan indeks GRI *Guidelines*, sehingga dapat diketahui perusahaan mana yang paling baik dalam melakukan dan melaporkan kegiatan CSR.

Untuk itu, penulis akan meneliti perusahaan – perusahaan BUMN yang tercatat (*listed*) di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 – 2011. Penulis memilih untuk meneliti perusahaan – perusahaan BUMN karena perusahaan BUMN adalah milik negara, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga sudah sepantasnya BUMN dapat menjadi contoh yang baik bagi perusahaan – perusahaan lainnya dalam menerapkan CSR. Penelitian ini melibatkan sampel atau cuplikan berukuran 15 perusahaan BUMN yang tercatat di BEI.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Menganalisis apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR
- b) Menganalisis apakah profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR
- c) Menganalisis apakah *leverage* memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR
- d) Menganalisis apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR

Menganalisis bagaimana perlakuan perusahaan terhadap CSR berdasarkan *indeks* GRI Guidelines

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis dimana riset yang dilakukan adalah riset verifikatif dengan mengambil sampel 15 perusahaan BUMN yang didapat dari laporan tahunan, laporan audit dan laporan lainnya yang terdapat pada website Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id/>), website BUMN (www.BUMN.go.id) dan website lainnya. Lingkup penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dari website. Unit analisisnya adalah perusahaan – perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.; data dianalisis dengan memakai statistik uji regresi berganda, dimana ukuran perusahaan (X1) dapat diukur dengan SIZE, profitabilitas (X2) diukur dengan ROA, leverage (X3) diukur dengan DER dan ukuran dewan komisaris (X4) diukur dengan UDK. Dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

- | | |
|----------|--------------------------|
| Y | = Pengungkapan CSR |
| a | = Konstanta |
| b1 ...b4 | = Koefisien X1 ...X4 |
| X1 | = Ukuran perusahaan |
| X2 | = Profitabilitas |
| X3 | = Lverage |
| X4 | = Ukuran dewan komisaris |

Adapun perusahaan sampel BUMN yang terpilih dalam penelitian ini adalah sbb:

No	Kode Emiten	Nama Perusahaan	Sektor
1	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk	Konstruksi
2	PTPP	Perusahaan Perumahan (Persero) Tbk	Konstruksi
3	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk	Pertambangan
4	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perbankan
5	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk	Perbankan
6	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan
7	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Perbankan
8	GIAA	Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Transportasi
9	KAEF	Kimia Farma Tbk	Farmasi
10	KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk	Industri Baja
11	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk	Industri Gas
12	SMGR	Semen Gresik (Persero) Tbk	Industri Semen
13	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	Teknik Sipil
14	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk	Komunikasi
15	ISAT	Indosat Tbk	Komunikasi

Sumber : www.idx.co.id dan <http://www.bumn.go.id/situs-terkait/>

III. HASIL DAN BAHASAN

III.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan	45	14.26	20.13	17.2540	1.60610
Profitabilitas	45	.0035	.2568	.069256	.0671608
Leverage	45	.2145	11.1723	3.602987	3.6185127
Ukuran Dewan Komisaris	45	3	10	5.56	1.486
CSR	45	.23	.96	.4384	.18708
Valid N (listwise)	45				

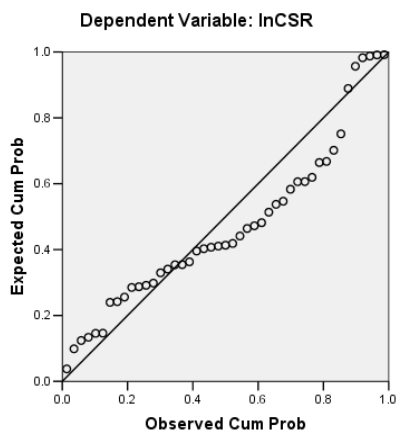
Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan total asset menunjukkan bahwa nilai terkecilnya adalah sebesar 14,26, nilai terbesarnya adalah sebesar 20,13 dengan nilai rata – rata sebesar 17,2540 dan standar deviasi sebesar 1,60610 yang menunjukkan penyimpangan dari nilai rata – rata ukuran perusahaan. Semakin besar nilai ukuran perusahaan maka dapat dikatakan perusahaan tersebut semakin besar karena memiliki aset yang lebih banyak.

Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA menunjukkan bahwa nilai terkecilnya adalah sebesar 0.0035, nilai terbesarnya adalah sebesar 0.2568 dengan nilai rata – rata sebesar 0.069256 dan standar deviasi sebesar 0.0671608 yang menunjukkan penyimpangan dari nilai rata – rata profitabilitas. Semakin besar nilai profitabilitas maka dapat dikatakan profit atau keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan tersebut semakin banyak.

Variabel *leverage* yang diukur dengan DER menunjukkan bahwa nilai terkecilnya adalah sebesar 0,2145, nilai terbesarnya adalah sebesar 11,1723 dengan nilai rata – rata sebesar 3,602987 dan standar deviasi sebesar 3,6185127 yang menunjukkan penyimpangan dari nilai rata – rata *leverage*. Semakin besar nilai *leverage* perusahaan maka dapat dikatakan nilai perbandingan hutang terhadap ekuitas semakin besar.

Variabel ukuran dewan komisaris yang diukur dengan \sum UDK menunjukkan bahwa nilai terkecilnya adalah sebesar 3, nilai terbesarnya adalah sebesar 10 dengan nilai rata – rata sebesar 5,56 dan standar deviasi sebesar 1,486 yang menunjukkan penyimpangan dari nilai rata – rata ukuran perusahaan. Semakin besar nilai ukuran dewan komisaris maka semakin banyak dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Pengungkapan CSR yang diukur dengan jumlah data (N) sebanyak 45, nilai pengungkapan CSR yang terkecil adalah sebesar 0,23 dan nilai terbesar adalah sebesar 0,96. Semakin besar nilai CSR, maka pengungkapan yang dilakukan perusahaan semakin banyak dan semakin sesuai dengan indikator GRI. Nilai rata – rata pengungkapan ini adalah sebesar 0,4384 atau sebesar 43,84%. Hal ini berarti bahwa rata – rata perusahaan telah mengungkapkan CSR sebanyak 43,84%.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1. Uji Normalitas

Terlihat bahwa sebaran data pada grafik di atas bisa dikatakan tersebar di sekeliling garis lurus tersebut (tidak terpengaruh jauh dari garis lurus). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa persyaratan Normalitas bisa dipenuhi.

III.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

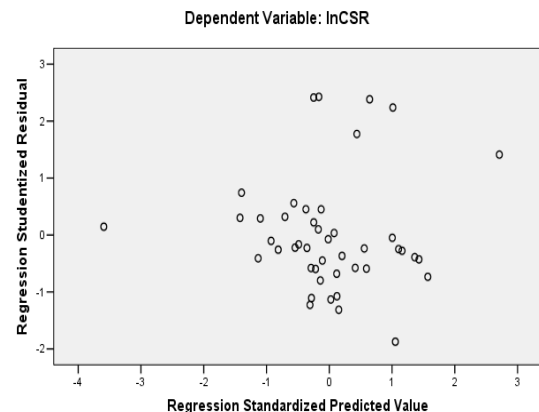
Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-.968	.642		-1.508	.139		
	Ukuran Perusahaan	.041	.041	.189	1.002	.322	.529	1.890
	InProfitabilitas	-.178	.058	-.510	3.074	.004	.687	1.456
	InLeverage	.037	.055	.129	.671	.506	.508	1.968
	InUkuran Dewan Komisaris	-.058	.222	-.042	-.261	.795	.721	1.387

a. Dependent Variable: InCSR

Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa nilai VIF tidak ada yang melebihi 5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi ini.

III.2.3 Uji Heterokedastisitas

Scatterplot



Gambar 2 Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik scatter plot tersebut, tampak titik-titik (diagram pencar) tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

III.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.494 ^a	.244	.168	.31627	2.070

a. Predictors: (Constant), InUkuran Dewan Komisaris, InLeverage, InProfitabilitas, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: InCSR

Pada uji ini dapat dilihat pada tabel *Model Summary* yang menunjukkan nilai DW sebesar 2,070. yang berarti H_0 diterima, tidak ada korelasi serial (tidak ada autokorelasi)

III.3 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.968	.642		-1.508	.139		
	Ukuran Perusahaan	.041	.041	.189	1.002	.322	.529	1.890
	InProfitabilitas	.178	.058	.510	3.074	.004	.687	1.456
	InLeverage	.037	.055	.129	.671	.506	.508	1.968
	InUkuran Dewan Komisaris	-.058	.222	-.042	-.261	.795	.721	1.387

a. Dependent Variable: InCSR

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat ditarik persamaan regresi sebagai berikut : $Y = -0,968 + 0,041\text{Size} + 0,178\text{ROA} + 0,037\text{Lev} - 0,058\text{UDK}$

III.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.494 ^a	.244	.168	.31627	2.070

a. Predictors: (Constant), InUkuran Dewan Komisaris, InLeverage, InProfitabilitas, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: InCSR

Besarnya nilai R adalah 0,494 yang berarti bahwa hubungan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, leveragedan ukuran dewan komisaris dengan CSR adalah sebesar 49,40%, sedangkan untuk nilai *adjusted* R^2 adalah sebesar 0,168. Hal ini berarti variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 16,8% variabel dependen dan sisanya sebesar 83,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

III.5 Uji F

Tabel 6. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.291	4	.323	3.226	.022 ^a
	Residual	4.001	40	.100		
	Total	5.292	44			

a. Predictors: (Constant), InUkuran Dewan Komisaris, InLeverage, InProfitabilitas, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: InCSR

F tabel = 2,61

Maka dapat dilihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3,226 > 2,61$) yang berarti H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan ukuran dewan komisaris secara bersama – sama mempengaruhi pengungkapan CSR.

III.6 Uji T

Tabel 7. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.968	.642		-1.508	.139		
	Ukuran Perusahaan	.041	.041	.189	1.002	.322	.529	1.890
	InProfitabilitas	.178	.058	.510	3.074	.004	.687	1.456
	InLeverage	.037	.055	.129	.671	.506	.508	1.968
	InUkuran Dewan Komisaris	-.058	.222	-.042	-.261	.795	.721	1.387

a. Dependent Variable: InCSR

$t_{tabel} = 2,01$

Keputusan:

- a) Variabel ukuran perusahaan (X_1)
Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,002 < 2,01$) maka H_{i1} ditolak, artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara nyata terhadap CSR
- b) Variabel profitabilitas (X_2)
Oleh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,074 > 2,01$) maka H_{i2} diterima, artinya profitabilitas berpengaruh secara nyata terhadap CSR
- c) Variabel leverage (X_3)
Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,671 < 2,01$) maka H_{i3} ditolak, artinya leverage tidak berpengaruh secara nyata terhadap CSR
- d) Variabel ukuran dewan komisaris (X_4)

Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,261 < 2,01$) maka H_{i4} ditolak, artinya ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara nyata terhadap CSR.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan dewan komisaris dapat mempengaruhi kegiatan CSR serta pengungkapannya dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan 15 sampel perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009 – 2011 dan telah memenuhi kriteria dalam pemilihan sampel.

Dari hasil pengujian hipotesis, analisis serta pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ditolak. Hal ini telah dibuktikan pada hasil uji hipotesis (tabel 4) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,322 > 0,05$. Oleh karena itu, pengungkapan CSR tidak tergantung kepada besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Perusahaan kecil pun dapat mengungkapkan CSR dengan baik apabila dianggap perlu, karena CSR dianggap mampu memberikan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam hal ini adalah kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup).. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraini (2006) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan.

2. Secara parsial profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR diterima. Hal ini telah dibuktikan pada hasil uji hipotesis (tabel 4) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Oleh karena itu, bahwa semakin besar profit yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin besar juga perusahaan melakukan dan mengungkapkan CSR dalam laporannya karena dana yang dimiliki lebih banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wynna (2010) dan Anggara Fahrizqi (2010) yang menemukan hubungan yang positif antara profitabilitas dengan pengungkapan CSR.

3. Secara parsial *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ditolak. Hal ini telah dibuktikan pada hasil uji hipotesis (tabel 4) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,506 > 0,05$. Oleh karena itu, bahwa besar kecilnya hutang tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pengungkapan CSR selama hal tersebut dirasakan perlu. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Anggraini (2006), Wynna (2010) dan Anggara Fahrizqi (2010) yang menyebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

4. Secara parsial ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ditolak. Hal ini telah dibuktikan pada hasil uji hipotesis (tabel 4) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,795 > 0,05$. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pengungkapan CSR bukan tergantung kepada jumlah dewan komisaris perusahaan, tetapi lebih kepada tanggung jawab dan rasa sosial dari dewan komisaris itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggara Fahrizqi (2010) yang menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan

5. Berdasarkan Indeks GRI *Guidelines*, maka diperoleh perusahaan Aneka Tambang adalah perusahaan yang paling banyak mengungkapkan CSR dari tahun ke tahun. Perusahaan yang mengungkapkan CSR terbanyak kedua adalah PT. Garuda Indonesia. Jika dilihat dari seluruh sektor dari perusahaan sampel, maka sektor perbankan adalah sektor yang paling banyak dalam mengungkapkan CSR mengingat perbankan adalah sektor yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini.

IV.2 Saran

- Berdasarkan keterbatasan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka diharapkan peneliti selanjutnya agar:
1. Lebih teliti dalam menentukan indeks pengungkapan CSR atau dapat menggunakan pedoman lain selain GRI *guidelines*.
 2. Dapat menambah variabel independen yang terkait dengan CSR diluar penelitian – penelitian ini, sehubungan dengan hanya 16,8% variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini dan sisanya adalah variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara Fahrizqi (2010), Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia); Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, http://eprints.undip.ac.id/24469/1/FULL_SKRIPSI.pdf

- Anggraini, R (2006) Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang.*
- Bapepam. *Undang --Undang No.40 tahun 2007.*
<http://www.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20P%20erseroan%20Terbatas.pdf>. Diakses tanggal 3 Februari 2012
- David Crowther & Guler Aras. (2011). *Corporate Social Responsibility.* English : Ventus Publishing ApS.
- Felicia. (2011). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) Pada Perusahaan Industri Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008 – 2010.* Jakarta: Bina Nusantara University
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. dan A. Chariri. (2007). *Teori Akuntansi.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Rev 2009.* Jakarta : Salemba Empat.
- ISO. (2009). *Draf Internasional Standar ISO 26000 : Guidance on Social Responsibility.*
<http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=3935837&objAction=browse&sort=name>. Diakses tanggal 2 Februari 2012
- Nurlela dan Islahudin. (2008). *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen sebagai Variabel Moderating.* Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR.* Gresik : Fascho Publishing.
- Wynna. (2010). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Pada Perusahaan – Perusahaan Yang Mendapatkan Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) Pada Tahun 2009.* Jakarta: Bina Nusantara University
- WBCSD. *Business Solution for a Sustainable World.*
<http://www.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx>. Diakses tanggal 1 Februari 2012
- www.idx.com. Diakses tanggal 3 Februari 2012
- www.bumn.go.id. Diakses tanggal 25 Februari 2012
- www.csr-asia.com. Diakses tanggal 1 Februari 2012
- www.csrindonesia.multiply.com. Diakses tanggal 1 Februari 2012
- www.worldbank.com. Diakses tanggal 1 Februari 2012
- www.ncsr-id.org. Diakses tanggal 1 Februari 2012

The Assessment of Corporate Governance (GCG) Practices Disclosures and Transparency: A study on Indonesia's Listed State-Owned Enterprises (SOEs)

Muhammad Masyhuri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI
Email: masyhuri.muhammad@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa bagian khusus dari keterbukaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dari BUMN yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan fokus kepada subjek Keterbukaan dan Transparansi. Metode yang digunakan adalah analisa deskriptif dengan memakai data sekunder Laporan Tahunan tahun 2013 serta laman masing-masing perusahaan. Kerangka kerja analisis yang dipakai adalah dengan mengacu kepada kerangka Skor Tata Kelola ASEAN yang dikembangkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) di tahun 2011. Dari hasil analisis, dapat diperoleh bahwa skor tata kelola BUMN di BEI sudah mencapai nilai yang baik dengan angka 71,8 %. Namun ini hanya mewakili 60 % dari total BUMN yang ada di BEI, sisanya (40 %) masih mempunyai skor di bawah 70 % yang berarti masih diperlukan perbaikan yang mendasar dan cukup besar di masa yang akan datang bagi BUMN yang terkait.

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan, BUMN, Skor Tata Kelola ASEAN, ACMF, BEI

Abstract

The aim of this study is to analyse the specific part of Good Corporate Governance (GCG) disclosures and transparency practices in Indonesia's listed State-Owned Enterprises (SOEs) in the Indonesia Stock Exchange (IDX) by applying the Asean Corporate Governance Scorecard with focus on the disclosure and transparency items. This study uses descriptive analysis approaches based on secondary data sources, namely the SOEs Annual Report in 2013 and their company's website. The research framework tools used in this study was taken from the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) which was initiated and developed by the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF, 2011). It found that the average scores of disclosures and transparency items from the Indonesia's listed SOEs has achieved a "good disclosure level" at 71.8 %, however, it is only representing to 60 % of listed SOEs; whilst the rest (40 %) still have the lower scores level (below 70 %), which means it needs a radical and major improvement from related SOEs in the years to come.

Key words: Corporate Governance, SOEs, ACGS, ACMF, IDX

II. INTRODUCTION

Since the 1997 Asian Financial Crisis, a discussion of Corporate Governance (CG) has become a long way in the region. A wide range of laws and regulations have been enacted, standards developed and enforcement strengthened. A corporate governance infrastructure has been built, something that did not exist before the crisis. This infrastructure includes corporate governance committees, institutes of directors and many other institutions.

Important changes have also recently taken place in the organisation and corporate governance of State-Owned Enterprises (SOEs) in some Asian countries, including Indonesia. These changes have been concentrated mainly in the areas of the ownership function and the legal and regulatory framework for SOEs (OECD, 2014).

In Indonesia, numerous regulations have been decreed and institutions have been established to monitor the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in publicly (SOEs) and privately-owned enterprises as well as financial and non-financial companies. However, there have been quite few researchs and scholarly journals from Indonesia to analyse the CGC best practices of information disclosures from the listed SOEs in the Indonesia Stock Exchange (IDX), especially to face and challenge to the Asean Economic Capital Market Unity within the Asean Economic Community (AEC) concept in the years to come.

This paper aims to analyse the specific part of GCG disclosures and transparency practices in Indonesia's listed SOEs by applying the Asean Corporate Governance Scorecard which focus on the disclosure and transparency items. The reason chosen this objective is according to International Finance Corporation (IFC, 2014) the transparency and disclosure issues are amongst the most critical points in the SOEs operation and these remain challenging issues although the Indonesian SOEs have been required to apply GCG in terms of transparency and disclosure.

I. LITERATURES REVIEW

2.1 Corporate Governance (CG) Concept, Framework and General Principles

According to Peng (2006) Corporate Governance (CG) is defined as the relationship amongst various participants in determining the direction and performance of corporation involving all corporate stakeholders, including shareholders, employees, customers, suppliers, creditors, government and the community. Furthermore, Steiner (2012) stated that CG is the exercise of authority over members of corporate community based on formal structures, rules and procedures. Lawrence and Weber (2014) solidified this term by declaring that CG refers to the process by which a corporation is controlled, or governed. Just as nations have governments that respond to the needs of citizens and establish policy, so do corporations have systems of internal governance that determine overall strategic direction and balance sometimes divergent interests. Therefore, a Good Corporate Governance (GCG) refers to how a corporation is a well controlled and governed for the benefits of all its stakeholders.

Corporate governance must not be confused with corporate management. Corporate governance focuses on a company's structure and processes to ensure fair, responsible, transparent and accountable corporate behavior. Corporate management, on the other hand, focuses on the tools required to operate the business. Corporate governance is situated at a higher level of direction that ensures that the company is managed in the interests of its shareholders (IFC, 2014).

OECD (2004) clarified that corporate governance is only part of the larger economic context in which firms operate that includes, for example, macroeconomic policies and the degree of competition in product and factor markets. The corporate governance framework also depends on the legal, regulatory, and institutional environment. In addition, factors such as business ethics and corporate awareness of the environmental and societal interests of the communities in which a company operates can also have an impact on its reputation and its long-term success.

The OECD corporate governance framework is built on four core values (IFC, 2014):

- **Fairness:** The corporate governance framework should protect shareholder rights and ensure the equitable treatment of all shareholders, including minority and foreign shareholders. All shareholders should have the opportunity to obtain effective redress for violations of their rights.
- **Responsibility:** The corporate governance framework should recognize the rights of stakeholders as established by law, and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.

- **Transparency:** The corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the company, including its financial situation, governance structure, performance and ownership.
- **Accountability:** The corporate governance framework should ensure the strategic guidance of the company, the effective monitoring of management by the Board, and the Board's accountability to the company and shareholders.

The General Principles of CG are intended to assist OECD and non-OECD governments in their efforts to evaluate and improve the legal, institutional and regulatory framework for corporate governance in their countries, and to provide guidance and suggestions for stock exchanges, investors, corporations, and other parties that have a role in the process of developing good corporate governance. The Principles focus on publicly traded companies, both financial and non-financial. However, to the extent they are deemed applicable, they might also be a useful tool to improve corporate governance in non-traded companies, for example, privately held and state-owned enterprises (OECD, 2004).

The OECD Principles of CG – which are adopted and adapted by almost countries around the world with slight modifications, including ASEAN and Indonesia - are divided by six principles (OECD, 2004), namely :

1. Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework

The corporate governance framework should promote transparent and efficient markets, be consistent with the rule of law and clearly articulate the division of responsibilities among different supervisory, regulatory and enforcement authorities.

2. The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions

The corporate governance framework should protect and facilitate the exercise of shareholders' rights.

2. The Equitable Treatment of Shareholders

The corporate governance framework should ensure the equitable treatment of all shareholders, including minority and foreign shareholders. All shareholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.

3. The Role of Stakeholders in Corporate Governance

The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.

4. Disclosure and Transparency

The corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, including the financial situation, performance, ownership, and governance of the company.

5. The Responsibilities of the Board

The corporate governance framework should ensure the strategic guidance of the company, the effective monitoring of management by the board, and the board's accountability to the company and the shareholders.

2.2 The Importance of Good Corporate Governance Implementation

Good Corporate Governance is important on a number of different levels. At the company level, well-governed companies tend to have better and cheaper access to capital, and tend to outperform their poorly governed peers over the long-term. Companies that insist upon the highest standards of governance reduce many of the risks inherent to an investment in a company. Companies that actively promote robust corporate governance practices need key employees who are willing and able to devise and implement good corporate governance policies. These companies will generally value and compensate such employees more than their competitors that are unaware of, or ignore, the benefits of these policies and practices. Such companies, in turn, tend to attract more investors who are willing to provide capital at lower cost.

Generally, well-governed companies are better contributors to the national economy and society. They tend to be healthier companies that add more value to shareholders, workers, communities, and countries in contrast with poorly governed companies that may cause job and pension losses, and even undermine confidence in securities markets (IFC, 2014).

2.3 Corporate Governance Framework in Indonesia: History and Development

In Indonesia, the financial crisis in 1997-1998 has had dramatic social, economic and political effects. That event brought the Rupiah currency down by almost 80% and dramatically increased poverty. The depth of the collapse in Indonesia, if not unparalleled, is among the largest peacetime contractions since at least 1960, excluding the experience of the transition economies (IFC, 2014). According to several experts,

the recession in Indonesia was fuelled by many institutional weaknesses, among which the lack or inadequate enforcement of the central bank's regulations along with irregular banking practices and the extremely poor financial regulation.

Since then, it is fair to say that, although there is still plenty of room for improvement, the awareness, enthusiasm as well as legal and regulatory framework on corporate governance in Indonesia has changed and improved dramatically in recent years.

Indonesia had done a lot of initiatives and efforts to implement good corporate governance, both from government side as well as private (IFC, 2014). Those initiatives and efforts include establishment of corporate governance institutions, adoption of new laws and amendments of existing ones to support corporate governance implementation process in the country. More specifically, Indonesia has taken several steps towards improving corporate governance standards and enhancing legislation. A national committee for Good Corporate Governance has been established in 1999 under the supervision of the Coordinating Minister for Economic Affairs and issued the first Indonesia's Code of Good Corporate Governance in 2001, which was then amended in 2006. The Capital Market and Financial Institutions Supervisory Body (currently has merged into the Financial Services Authority Agency - *Otoritas Jasa Keuangan/OJK*) has continued to introduce and amend its regulation and enforced them, which resulted in improved investors' protection. Corporate governance rules for banks were introduced in 2006 and Bank Indonesia has actively monitored and enforced their implementation. A number of other legislation reforms may also be cited such as: the Law on Foreign Investment, adopted in 1967,

and amended in 2007, the Law on Insurance Business adopted in 1992, and the Competition Law adopted in 1999. All these are but some examples of the many positive changes to the legal and regulatory framework.

More specifically, the following major initiatives and/or laws and regulations may be considered (IFC, 2014):

- Establishment of National Committee on Corporate Governance in 1999 by decree of the Coordinating Minister of Economy, Finance and Industry.
- The National Committee on Corporate Governance was then changed to National Committee on Governance in 2004 to accommodate governance not only for corporate but to include public sector as well.
- Adoption of the Indonesian Company Law No. 1 of 1995 which superseded in 2007 with Law No. 40 of 2007 concerning the same.
- Law No. 8 of 1995 on Capital Market.
- Law No. 25 of 2007 on Investment, which supersedes the previous Law No. 1 of 1967 on Foreign Investment.
- Law No. 31 in 1999 on Corruption Eradication Commission, which by this law, Corruption Eradication Commission was established. Later, the Law was amended with Law No. 30 of 2002.
- Law No. 5 in 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. As an implementation of that law, the Commission for The Supervision of Business Competition (*KPPU - Komisi Pengawas Persaingan Usaha*) was established on 1999.
- Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.
- Establishment of Center for Reporting and Financial Transaction Analysis (*PPATK - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*),

which was mandated by the Law No. 15 in 2002 on Money Laundering. The Law was then amended with Law No. 25 of 2003.

- Regulation on obligation to implement GCG in SOE through the decree of the Minister of SOEs Kep-117/M-MBU/2002 in Implementation of GCG in SOEs.
- Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprise.
- Law No. 3 of 2004 on Bank Indonesia superseding the Law No. 23 of 1999 concerning the same.
- Law No. 7 of 2009 on Deposit Insurance Corporation (LPS - *Lembaga Penjamin Simpanan*), superseding the Law No. 24 of 2004 concerning the same.
- Regulation on obligation to implement GCG in banking sector through Central Bank regulation PBI No. 8/4/PBI/2006 on GCG Implementation for Banks.
- Other Regulations which elaborate GCG principles to public companies through Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (*Otoritas Jasa Keuangan-OJK*) regulations, such as regulations on disclosure, independent commissioners, corporate secretary, audit committee, protection of minority shareholders and etc.

The adoption of the CG Regulations, although not heavy in detail, certainly must be hailed as another positive step for Indonesia corporate governance, providing the first ever set of corporate governance guidelines for companies in Indonesia, in general and listed companies in particular.

2.4 State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia

As providers of essential public or commercial services, state-owned enterprises (SOEs) still have important roles in modern economies (Efird, 2010). It is supported by the OECD (2005) reports that in several OECD countries, State-Owned Enterprises (SOEs) still represent a substantial part of GDP, employment and market capitalisation. Moreover, SOEs are often prevalent in utilities and infrastructure industries, such as energy, transport and telecommunication, whose performance is of great importance to broad segments of the population and to other parts of the business sector. Furthermore, the scale and scope of SOEs in many Asian economies calls for specific attention to be given to their corporate governance. Even if their economic significance varies greatly from country to country, they still represent a major, if not dominant, part of the economy in some countries (around 30% of GDP in China and 38% in Vietnam). SOEs remain significant in many other large and/or key Asian economies. In India and Thailand they roughly contribute 25% of the GDP, in Malaysia and Singapore close to 15%. SOEs might also represent a not insignificant part of total employment (15% in China, 5% in Malaysia) or of fiscal revenues (25-30% in Vietnam). Benefits from improving SOE governance are great, but they are difficult to obtain as SOE reforms can be complex and SOEs indeed face specific challenges in terms of governance (OECD, 2010).

In Indonesia, as it stated in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia, 1945 that all resources in the country shall be utilized for the economic advancement of all Indonesians.

which was mandated by the Law No. 15 in 2002 on Money Laundering. The Law was then amended with Law No. 25 of 2003.

- Regulation on obligation to implement GCG in SOE through the decree of the Minister of SOEs Kep-117/M-MBU/2002 in Implementation of GCG in SOEs.
- Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprise.
- Law No. 3 of 2004 on Bank Indonesia superseding the Law No. 23 of 1999 concerning the same.
- Law No. 7 of 2009 on Deposit Insurance Corporation (LPS - *Lembaga Penjamin Simpanan*), superseding the Law No. 24 of 2004 concerning the same.
- Regulation on obligation to implement GCG in banking sector through Central Bank regulation PBI No. 8/4/PBI/2006 on GCG Implementation for Banks.
- Other Regulations which elaborate GCG principles to public companies through Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (*Otoritas Jasa Keuangan-OJK*) regulations, such as regulations on disclosure, independent commissioners, corporate secretary, audit committee, protection of minority shareholders and etc.

The adoption of the CG Regulations, although not heavy in detail, certainly must be hailed as another positive step for Indonesia corporate governance, providing the first ever set of corporate governance guidelines for companies in Indonesia, in general and listed companies in particular.

2.4 State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia

As providers of essential public or commercial services, state-owned enterprises (SOEs) still have important roles in modern economies (Efird, 2010). It is supported by the OECD (2005) reports that in several OECD countries, State-Owned Enterprises (SOEs) still represent a substantial part of GDP, employment and market capitalisation. Moreover, SOEs are often prevalent in utilities and infrastructure industries, such as energy, transport and telecommunication, whose performance is of great importance to broad segments of the population and to other parts of the business sector. Furthermore, the scale and scope of SOEs in many Asian economies calls for specific attention to be given to their corporate governance. Even if their economic significance varies greatly from country to country, they still represent a major, if not dominant, part of the economy in some countries (around 30% of GDP in China and 38% in Vietnam). SOEs remain significant in many other large and/or key Asian economies. In India and Thailand they roughly contribute 25% of the GDP, in Malaysia and Singapore close to 15%. SOEs might also represent a not insignificant part of total employment (15% in China, 5% in Malaysia) or of fiscal revenues (25-30% in Vietnam). Benefits from improving SOE governance are great, but they are difficult to obtain as SOE reforms can be complex and SOEs indeed face specific challenges in terms of governance (OECD, 2010).

In Indonesia, as it stated in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia, 1945 that all resources in the country shall be utilized for the economic advancement of all Indonesians.

The constitution further prescribes that the government is responsible for ensuring that wealth is created and distributed throughout the nation. In response to the task, the Indonesian government has created, among other entities, various SOEs. According to Article 1 of the SOE Act (UU No. 19/2003/BUMN), the government must have at least 51% ownership in SOEs. The Act also states that the main objective of the SOEs is to gain profits by providing superior goods and services to customers and to spur economic growth and national prosperity (Yasin, M, 2013 and Warganegara, et al, 2013).

Based on the Indonesian economic performance, SOEs play a major role in the economy. In terms of their number, there are 141 SOEs actively engaged in the production of goods and services in the economy. According to SOEs Ministry (Yasin, M 2013), publicly listed SOEs in 2013 had 26% of the total market capitalization of the Indonesia Stock Exchange. Furthermore, five of these SOEs belonged to the top ten firms with the highest market capitalization. In terms of total assets and revenues, the asset value owned by SOEs is 42% of the 2012 Indonesian Gross Domestic Product (GDP) and the revenue is 19% of the GDP. Given the massive stake SOEs have in the economy, the Indonesian government must monitor the performance of its 141 SOEs closely. This may not be an easy task given their number, size, complexity, and the variety of industry types and geographic locations in which they operate.

2.5 CG Transparency and Disclosures: Implementation Challenges in SOEs

According to IFC (2014) disclosure is defined as ensuring access to information for all interested parties, regardless of the purpose of obtaining the information, through a transparent procedure that guarantees information is easily found and obtained in timely manner.

Timely and accurate disclosure is essential for shareholders, potential investors, regulatory authorities and other stakeholders. Access to material information helps shareholders protect their rights and improves the market participants' ability to make sound economic decisions. Disclosure makes it possible to assess and oversee management, as well as to keep management accountable for the company and shareholders. Disclosure benefits companies since it allows them to demonstrate accountability towards shareholders, act transparently towards the markets, and maintain public confidence and trust. Good disclosure policies should also reduce the cost of capital. Finally, information is also useful for creditors, suppliers, customers and employees to assess their positions, respond to changes and shape their relations with companies.

It is noted that transparency and disclosure issues are amongst the most critical points in the SOEs operation and these remain challenging issues although the Indonesian SOEs have been required to apply GCG in terms of transparency and disclosure. In the past, lack of transparency and disclosure was apparent. These days, efforts to create transparent SOEs seem to be everlasting homework for SOEs.

Information disclosure in SOEs is governed in Clause 32 of the Minister Regulation. This clause states "SOEs must disclose important information on its annual report and financial statements in accordance with the State laws and regulations not only in a timely manner but also in an accurate, clear and objective way". While SOEs are required to be transparent they shall respect any confidential information. Unless otherwise provided by statutory provisions, the Articles of Association, and/or company rules the external auditors, internal auditors and the audit committee and other committees (if any), SOEs must keep

confidential information obtained while performing their duties. Accordingly, it is the responsibility of both the Board of Directors (BOD) and Board of Commissioners (BOC) to maintain the confidentiality of company information.

The conflict between principles of transparency and disclosures and confidential information is considered the primary issue that the Indonesian SOEs shall take into account. Meanwhile, it is understood that there are no clear measures on the extent of transparency and confidentiality. This is coupled with the fact that the Indonesian SOEs are still reluctant in disclosing their financial statement. Hence, the number of SOEs which are listed in the stock exchange is low. Since the establishment of Indonesian Stock Exchange (previously Jakarta Stock Exchange) dating back 20 years ago, there have been only 20 SOEs listed. .

While information disclosure has been clearly regulated under SOE Act, GCG Regulation and Act No. 14 Year 2008 concerning Public Information disclosure, there are no clear reasons upon the reluctance to exercise the transparency amongst the Indonesian SOEs. Many believe that lack of transparency seems to be an intentional agenda of political interest groups and bureaucrats. Hence, lack of transparency is linked to inefficiencies in the SOEs. One of the commonly noted cases is in the budgeting in procurement of Goods and Services. This is the fragile area where the lack of transparency entails to inefficiencies due to breach of integrity committed by the SOEs boards and personnel.

While a number of SOEs have performed well, it is noted that many of them are exposed to the alleged Breach of Integrity issue. In several SOEs, there is a resistance to commit to reforms, and often there are close ties between business and politics. Indeed, the integrity of SOEs personnel is still questionable.

As widely known, a number of officials in a number of SOEs have been committed to and processed for breach of integrity allegations such as corruption and collusion. Hence, breach of integrity issues may be considered as the top challenge in SOEs operations. In the last 3 years, the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) has processed quite a few numbers of the alleged cases (IFC, 2014).

In view of transparency and disclosure issues, there is no quick fix to favor these in the SOE operation. Go Public can be one of the best ways where SOEs can exercise their transparency and disclosure initiative. However, the road to go there is quite stiff and there is always a need to have the right measures.

III. METHODOLOGY

This study uses descriptive analysis approaches based on secondary data sources, namely the SOEs Annual Report in 2013 and their company's website. In addition, the author chooses in a purpose all the Indonesia's listed State-Owned Enterprises (SOEs) as a sample research case study. At the end of 2013, there were only 20 companies from 141 SOEs listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) which representing variety of different sectors, including property and building constructions; mining; banking; consumer goods; basic industries and chemicals; and infrastructures, utilities and transportations with total assets was Rp 2.191.963 billion. The listed SOEs can be seen in the following table.

Table 1. 20 of SOEs Listed in the Indonesia Stock Exchange (2013)

No	Industrial Sectors/SOEs Name	IDX Code	Total Assets (Rp Billion)	Dated of IPO
A Property and Building Constructions				
1	PT Adhi Karya Tbk	ADHI	9.721	7 Nov 2003
2	PT PP Tbk	PTPP	12.416	9 Feb 2010
3	PT Wijaya Karya Tbk	WIKA	12.595	29 Oct 2007
4	PT Waskita Karya Tbk	WSKT	8.788	17 Dec 2012
B Mining				
5	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM	21.865	27 Nov 1997
6	PT Bukit Asam Tbk	PTBA	11.677	23 Dec 2002
7	PT Timah Tbk	TINS	7.883	27 Sep 1995
C Banking				
8	PT Bank BNI Tbk	BBNI	386.655	Nov 1996
9	PT Bank BRI Tbk	BBRI	626.183	10 Nov 2003
10	PT Bank BTN Tbk	BBTN	131.170	17 Dec 2009
11	PT Bank Mandiri Tbk	BMRI	733.100	14 Jul 2003
D Consumers Goods				
12	PT Kimia Farma Tbk	KAEF	2.472	4 Jul 2001
13	PT Indo Farma Tbk	INAF	1.337	17 Apr 2001
E Basic Industry & Chemicals				
14	PT Krakatau Steel Tbk	KRAS	2.379	10 Nov 2010
15	PT Semen Baturaja Tbk	SMBR	2.711	28 Jun 2013
16	PT Semen Indonesia TBK	SMGR	30.793	4 Jul 1991
F Infrastructures, Utilities & Transportation				
17	PT Garuda Indonesia Tbk	GIAA	29.538	11 Feb 2011
18	PT Jasa Marga Tbk	JSMR	28.366	1 Nov 2007
19	PT Gas Negara Tbk	PGAS	4.363	15 Dec 2003
20	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	TLKM	127.951	14 Nov 1995
			2.191.963	

Sources: Companies Annual Report 2013 and Websites

3.1 Research Framework Tools

The research framework tools used in this study was taken from the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) which was initiated and developed by the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF, 2011). This initiative is undertaken in parallel with the efforts to achieve convergence in ASEAN countries by 2015 as an economic community. Broadly the ACMF Implementation Plan seeks to achieve the objectives of the ASEAN Economic Community (AEC) aspirations through the following areas (ACMF, 2011):

- Creating an enabling environment for regional integration
- Creating the market infrastructure and regionally focused products and intermediaries
- Strengthening the implementation process
- Enhancing the visibility, integrity and branding of ASEAN as an asset class

In line with the AEC issues, therefore, the objectives of the ACGS are to (ACMF, 2011):

- Raise corporate governance standards and practices of ASEAN Public Listed Companies (PLCs)
- Showcase and enhance the visibility as well as investability of well-governed ASEAN PLCs internationally
- Complement the other ACMF initiatives and promote ASEAN as an asset class

The ACGS covers the following five areas of the OECD Principles, namely: (1) Rights of shareholders; (2). Equitable treatment of shareholders; (3). Role of stakeholders;

(4). Disclosure and transparency; (5) Responsibilities of the board. However, because of the limitation of the study and the crucial point of the Disclosure and Transparency (D & T) issues which was proposed by the IFC (2014), the author only applies the Disclosure and Transparency focus area for this study.

The disclosure and transparency area of the ACGS has nine subjects analysis which is divided by 42 focus items (ACMF, 2011). The details of the ACGS on the Disclosure and Transparency Area can be seen in the Appendix 1. Each item is marked by one point; after that is summed to get the total mark. The final percentage score is calculated by dividing the total mark with total items of disclosure and transparency area i.e 42 and multiply by 100%. Then, every SOEs listed's final score is ranked by using of the grade scale percentage criterias, as follows:

Tabel 2. Disclosure and Transparency (D&T) CG Scores Grading Range

Final Score (%)	CG Grades	Comments
≤ 60	Poorly Disclosure	Lack of disclosure and transparency in most items. It needs radical and major improvements changes
61 – 70	Satisfactory Disclosure	Only fulfilled minimum requirements of disclosure and transparency items. It needs medium to major improvements
71 – 80	Good Disclosure	Fulfilled majority of disclosure and transparency items with needs minor improvements
81 – 90	Very Good Disclosure	Fulfilled most of disclosure and transparency items
91 – 100	Excellent Disclosure	Fullfilled all of disclosure and transparency items

Source: ACMF (2011)

IV. FINDINGS AND DISCUSSIONS

From the nine subjects analysis of D&C items, the scores of quality of Annual Report has placed the highest percentage rank at 92.2 %, followed by the on-time submitting financial/annual report at 89.6% and by the medium of communications at 87,5 %, respectively. It means from these three items most SOEs have complied for the CG disclosures openness which get result range of a very good and excellent CG grades. On the contrary, there are four D&T items which get lower CG scores or below 60 %, namely, the disclosure information regarding the directors/commissioners dealings in shares of the company (0%), the disclosure of external audit report fees (16.7%), the disclosure of related party transactions (42.8%) and related to the investor relations (51.7%), respectively. These four items should have more pay attentions and need a radical to major change improvements by the most listed SOEs. Another D&T items which need a medium to major improvements are the disclosure regarding the transparency ownership structure (61.1%) and the company's website (67.5%). The details figures can be seen in the Table 3.

From the individual listed SOEs analysis, in overall, the average scores of disclosures and transparency items from the Indonesia's listed SOEs has achieved a "good disclosure" i.e. 71.8 %, which means majority of D&T items have been fulfilled by the listed SOEs and only need a minor improvement to reach the higher score range. Nevertheless, there are eight listed SOEs (40% of the total listed SOEs) that have D&T scores below 70 % or in the range of poorly and satisfactory disclosure, which means it is needed a radical and major improvements to achieve the higher CG scores in the future.

The top three D & T scorers were placed by BMRI at 82,1 %, followed by SMGR at 82.1% and BBTN at 81.0 %, respectively, whilst SMBR and KAEP were placed as bottom scorers at 56.0 % and 52.4 %, respectively. Lack of or no disclosure information regarding to the related party transactions, the directors/commissioners dealings in shares of the company and the external auditor fees report are the three most factors which make the lower overall scores of the D & T items at SMBR and KAEP. Furthermore, the average scores of the quality of annual report and the on-time submitting financial/annual report as well as the medium of communications are below the score of their counterpart at 79.1%, 87.5% and 50%, respectively.

Tabel 3. CG Scores Results by D&T Subjects

No	Disclosure and Transparency (D&T) Subject	Total Avg. Score	Score Percentage
I	Transparent ownership structure (5 items)	3.06	61.1%
II	Quality of Annual Report (12 items)	11.07	92.2%
III	Disclosure of related party transactions (RPT) - 3 items	1.28	42.8%
IV	Directors and commissioners dealings in shares of the company (1 item)	0.00	0.0%
V	External auditor and Auditor Report (3 items)	0.50	16.7%
VI	Medium of communications (4 items)	3.50	87.5%
VII	Timely filing/release of annual/financial reports (4 items)	3.58	89.6%
VIII	Company website (9 items)	6.08	67.5%
IX	Investor relations (1 item)	0.52	51.7%
	TOTAL SCORES	30.18	71.8%

Sources: ACMF (2011), SOEs Annual Report (2013) and SOEs website (processed)

The Table 4 describes the details of each listed SOEs CG scores.

Tabel 4. D & T Scores Results by company

No	IDX Code	D & T Scores	CG Grade	Comments (% from total listed SOEs)
1	BMRI	34,5 82,1%	34 – 37 (81 – 90) %	Very Good Disclosure (15%)
2	SMGR	34,5 82,1%		
3	BBTN	34,0 81,0%		
4	BBNI	33,5 79,8%	30 – 33 (71 – 80) %	Good Disclosure (45 %)
5	BBRI	33,5 79,8%		
6	ANTM	33,3 79,2%		
7	PTPP	33,0 78,6%		
8	TLKM	32,3 76,8%		
9	GIAA	31,0 73,8%		
10	JSMR	31,0 73,8%		
11	WIKA	30,5 72,6%		
12	ADHI	30,0 71,4%		
13	PTBA	29,5 70,2%		
14	TINS	29,0 69,0%		
15	PGAS	28,5 67,9%		
16	KRAS	27,5 65,5%		
17	WSKT	27,0 64,3%		
18	INAF	25,5 60,7%		
19	SMBR	23,5 56,0%	≤ 24 (≤ 60%)	Poorly Disclosure (10 %)
20	KAEF	22,0 52,4%		

Sources: ACMF (2011), SOEs Annual Report (2013) and SOEs website (processed)

In terms of D & T scores analysis by industrial sectors, it clears that banking sectors have the highest CG scores i.e 80.7 %, followed by infrastructure, utilities and transportations at 73.1 %, mining sectors at 72.8 %, property, building and constructions sectors at 71.8 %, basic industry and chemicals at 67.9 %, and consumer goods at 56.5 %, respectively. It is proven that banking sectors in Indonesia have more advance compare its counterparts due to the applying of stiff rules and regulations by the regulator.

In addition, the Government of Indonesia (Bank Indonesia) has stipulated the obligatory laws regarding the implementation of CG in every bank operations and at the same time applied the highest law enforcements which has impact on their business performance. The following table (Table 5) explain more figures which related to D & T scores result by industrial sectors.

Tabel 5. D & T Scores Results by Industrial Sectors

No	Disclosure and Transparency (D&T) Subject	Property, Building Constructions	Mining	Banking	Infrastructure, Utilities & Transportation	Consumer Goods	Basic Industry & Chemicals
I	Transparent ownership structure (5 items)	3,4	3,7	3,6	3,5	1,5	2,7
		67,5%	73,3%	72,5%	70,0%	30,0%	53,3%
II	Quality of Annual Report (12 items)	11,0	11,3	12,0	11,5	10,0	10,7
		91,7%	93,8%	100,0%	95,8%	83,3%	88,9%
III	Disclosure of related party transactions (RPT) - 3 items	1,1	2,0	3,0	0,8	-	0,8
		37,5%	66,7%	100,0%	25,0%	0,0%	27,8%
IV	Directors and commissioners dealings in shares of the company (1 item)	-	-	-	-	-	-
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
V	External auditor and Auditor Report (3 items)	0,5	0,3	-	-	1,5	0,7
		16,7%	11,1%	0,0%	0,0%	50,0%	22,2%
VI	Medium of communications (4 items)	3,5	3,7	4,0	4,0	2,5	3,3
		87,5%	91,7%	100,0%	100,0%	62,5%	83,3%
VII	Timely filing/release of annual/financial reports (4 items)	4,0	2,3	4,0	4,0	3,5	3,7
		100,0%	58,3%	100,0%	100,0%	87,5%	91,7%
VIII	Company website (9 items)	6,1	6,8	6,6	6,4	4,5	6,0
		68,1%	75,9%	73,6%	70,8%	50,0%	66,7%
IX	Investor relations (1 item)	0,5	0,5	0,6	0,6	0,3	0,7
		50,0%	50,0%	62,5%	56,3%	25,0%	66,7%
TOTAL SCORES		30,1	30,6	33,9	30,7	23,8	28,5
		71,8%	72,8%	80,7%	73,1%	56,5%	67,9%

Sources: ACMF (2011), SOEs Annual Report (2013) and SOEs website (processed)

For all industrial sectors, the areas which should be disclosed and improved in the immediate terms which have the lowest scores are the disclosure of information regarding the directors/commissioners dealing in shares of the company and the disclosures of external auditor fees. Other major D & T items which need major improvements are the disclosure of related party transactions, the investor relations details contact list and the company's website performance.

V. CONCLUSION

The Corporate Governance (CG) issues have become hot topic discussions since the last decade by both academician scholars as well as business people across the globe. In ASEAN countries, this issue has obtained more attention, especially after the economic crisis hit this region in the end of 1990s. Every country, including Indonesia has promoted the CG regulations and legal framework to implement the best GCG in the company's operations and performance, including the obligatory of CG implementation for the all SOEs in Indonesia.

To face and challenge the AEC by 2015, the ACMF has released the ACG Scorecard which is recommended used by all public listed companies within this ASEAN region. For this study objective, the D & T items was chosen in a purpose to analyse the listed Indonesia's SOEs performance against the ACG scorecards.

It found that in general, the average scores of disclosures and transparency items from the Indonesia's listed SOEs has achieved a "good disclosure" at 71.8 %, which means majority of D&T items have been fulfilled by the listed SOEs and only need a minor improvement to reach the higher score range.

Nevertheless, there are eight listed SOEs (40% of the total listed SOEs) that have D&T scores below 70 % or in the range of poorly and satisfactory disclosure, which means it is needed a radical and major improvements to achieve the higher CG scores in the future. Whilst, on the top performer is placed by the banking sectors with BMRI owned the highest D & T scores at 82.5 %.

VI. REFERENCES

- ACMF. 2011. **ASEAN Corporate Governance Scorecard**. ASEAN Capital Market Forum Initiative.
- Adhi Karya, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Aneka Tambang, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Bank BRI, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Bank BNI, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Bank Mandiri, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Bank BTN, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Bukit Asam, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Garuda Indonesia, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Efird, Neil. 2010. *The State-Owned Enterprise as a Vehicle for Stability*. Strategic Studies Institute of USA Army. USA
- Gas Negara, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta

- Jasa Marga, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- IFC. 2014. *The Indonesia Corporate Governance Manual*. 1st Ed. Jakarta
- Indo Farma, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Kimia Farma, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Lawrence, AT and Weber, J. 2014. *Business and Society: Stakeholders, Ethics and Public Policy*. 14th International Edition. McGraw-Hill/Irwin. New York. USA.
- OECD. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*. Corporate Affairs Division Directorate for Financial and Enterprise Affairs Paris, FRANCE
- OECD. 2005. *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*. Corporate Affairs Division Directorate for Financial and Enterprise Affairs Paris, FRANCE
- OECD. 2010. *Policy Brief on Corporate Governance of State-Owned Enterprises in Asia*. Corporate Affairs Division Directorate for Financial and Enterprise Affairs Paris, FRANCE
- OECD. 2014. *Corporate Governance in Asia*. Asian Roundtable on Corporate Governance. Corporate Affairs Division Directorate for Financial and Enterprise Affairs Paris, FRANCE
- Peng, Mike. 2006. *Global Strategy*. South-Western, Thompson Corporation. USA
- PP, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Semen Baturaja, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Semen Indonesia, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Steiner. 2012. *Business, Government and Society: A Managerial Perspective, Text and Cases*. 13th International Edition. McGraw-Hill/Irwin. New York. USA
- Telekomunikasi Indonesia , PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Timah, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Warganegara, DL, Hutagaol, YRI, Saputra, MA and Anggraini, Y. 2013. State-Owned Enterprises and Corporate Governance Strength: Evidence from Indonesia. *International Journal of Management Business Research*, 3 (4), 325-335, Autumn
- Waskita Karya, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Wijaya Karya, PT (Persero) Tbk. 2013. **Annual Report**. Jakarta
- Yasin, Mahmudin. 2013. *BUMN dan Perekonomian Nasional*. Presentation Paper in Jakarta

I. APPENDICES

Appendix 1. ASEAN Corporate Governance Scorecard Items – Part D. The Disclosure and Transparency

D. Disclosure and Transparency (42 items)
D.1 Transparent ownership structure (5 items)
D.1.1 Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?
D.1.2 Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?
D.1.3 Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?
D.1.4 Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?
D.1.5 Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?
D.2 Quality of Annual Report (12 items)
Does the company's annual report disclose the following items:
D.2.1 Key risks
D.2.2 Corporate objectives
D.2.3 Financial performance indicators
D.2.4 Non-financial performance indicators
D.2.5 Dividend policy
D.2.6 Details of whistle-blowing policy
D.2.7 Biographical details (at least age, qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of directors/commissioners
D.2.8 Training and/or continuing education programme attended by each director/commissioner
D.2.9 Number of board of directors/commissioners meetings held during the year
D.2.10 Attendance details of each director/commissioner in respect of meetings held
D.2.11 Details of remuneration of the CEO and each member of the board of directors/commissioners
D.2.12 Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?
D.3. Disclosure of related party transactions (RPT) - 3 items
D.3.1 Does the company disclose its policy covering the review and approval of material/significant RPTs?
D.3.2 Does the company disclose the name of the related party and relationship for each material/significant RPT?
D.3.3 Does the company disclose the nature and value for each material/significant RPT?
D.4 Directors and commissioners dealings in shares of the company (1 item)
D.4.1 Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?
D.5 External auditor and Auditor Report (3 items)
D.5.1 Are audit fees disclosed?
Where the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services,
D.5.2 Are the non-audit fees disclosed?
D.5.3 Does the non-audit fees exceed the audit fees?

D.6 Medium of communications (4 items)
Does the company use the following modes of communication?
D.6.1 Quarterly reporting
D.6.2 Company website
D.6.3 Analyst's briefing
D.6.4 Media briefings /press conferences
D.7 Timely filing/release of annual/financial reports (4 items)
D.7.1 Is the audited annual financial report released within 120 days from the financial year end?
D.7.2 Is the audited annual financial report released within 90 days from the financial year end?
D.7.3 Is the audited annual/financial report released within 60 days from the financial year end?
D.7.4 Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?
D.8 Company website (9 items)
Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:
D.8.1 Business operations
D.8.2 Financial statements/reports (current and prior years)
D.8.3 Materials provided in briefings to analysts and media
D.8.4 Shareholding structure
D.8.5 Group corporate structure
D.8.6 Downloadable annual report
D.8.7 Notice of AGM and/or EGM
D.8.8 Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)
D.8.9 All of the above (D.8.1 to D.8.8) are available in English
D.9 Investor relations (1 item)
D.9.1 Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer responsible for investor relations?

Rancangan Format Aplikasi Sistem Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wattamwil

(Studi Penelitian Awal)

Rio Eldianson & Rizkison

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

Email: rioeldianson@yahoo.co.id; rizkson82@yahoo.co.id

Abstract

The role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) such as Baitul Mal wat Tamwil (BMT) has been sufficiently recognized contributing in to the national economy. However, this sector generally having some problems, majorly on the lack of access to capital and the poor financial record and report. The aim of this study is to develop the suitable financial system application for BMT and to examine the financial feasibility of micro business. The primary as well as secondary data were applied for collecting the information, while direct participating observation were used as a research tools methods analysis. The result obtained from this study is the complete design of the application form of financing, financial projection, and format for the analysis based on share for the financial feasibility for BMT.

Key Words : MSMEs, BMT, financial feasibility, financial system application, financial projection

Abstrak

Peranan dari Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT) telah berkontribusi cukup besar ke dalam perekonomian nasional. Namun, sektor ini secara umum menghadapi banyak permasalahan, terutama kekurangan akses terhadap pendanaan dan buruknya catatan laporan keuangan mereka. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengembangkan sistem aplikasi keuangan yang sesuai untuk BMT dan untuk menilai kelayakan keuangan pada usaha mikro. Data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan informasi, serta observasi partisipatif langsung dipakai sebagai metode analisis. Hasil yang diperoleh dari studi ini adalah kelengkapan perancangan dari format aplikasi keuangan, proyeksi keuangan serta format analisis untuk kelayakan usaha pada BMT.

Kata kunci: UMKM, BMT, kelayakan keuangan, sistem aplikasi keuangan, proyeksi keuangan

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada umumnya merupakan perusahaan keluarga atau perusahaan tradisional, menjadikan UMKM tidak layak. Terkait dengan karakter tersebut. UMKM tidak memiliki sistem pembukuan yang standar dengan ketentuan perbankan, selain itu UMKM juga tidak memiliki agunan yang cukup. Masalah lain yang menghambat hubungan UMKM dengan perbankan adalah jumlah kredit yang dibutuhkan UMKM biasanya relatif kecil. Hal tersebut menyebabkan tingginya biaya operasional bank. Selain itu perbankan dianggap bukan sumber yang layak bagi UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal (Siaahan R, 2007).

Lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal Tamwil (BMT) sangat cocok untuk menanggulangi masalah ini. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diharamkan di dalam Islam. Adapun fungsi lembaga ini adalah sebagai pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah.

BMT dalam memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil untuk para pelaku usaha mikro seringkali mengalami kesulitan dalam prakteknya. Kesulitan tersebut disebabkan hampir semua UMKM tidak memiliki laporan kinerja usaha dan keuangan yang baik, karena pengusaha UMKM belum melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan aplikasi sampai BMT dapat menerapkan mekanisme bagi hasil dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT membutuhkan lebih dari sekedar laporan keuangan usaha mikro saat ini tetapi juga proyeksi keuangan kedepan, untuk melihat perkembangan usaha mikro dari strategi, aset dan kinerja.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai secara detil kelayakan pembiayaan dari usaha mikro.

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya sebuah inovasi baru yang dikeluarkan oleh BMT terkait rancangan format laporan dan proyeksi keuangan UMKM dengan tujuan mempermudah BMT untuk dapat melakukan penyaluran dana berdasarkan bagi hasil sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

Artikel hasil penelitian ini menyajikan hasil pembahasan permasalahan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk merancang bagaimanakah format form analisa pembiayaan berbasis bagi hasil, dalam menilai kelayakan pembiayaan.
2. Untuk merancang bagaimanakah format proyeksi laporan keuangan UMKM yang dibutuhkan sebagai alat untuk menganalisa.
3. Untuk merancang bagaimanakah format analisa bagi hasil untuk menentukan kelayakan bagi pelaku usaha mikro.

Untuk mengetahui apakah rancangan format tersebut di atas dapat diaplikasikan pada BMT untuk pembiayaan berbasis bagi hasil.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat :

1. UMKM untuk mengajukan mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil khususnya para usaha mikro, sehingga membiasakan untuk mencatat minimal pendapatan usaha setiap harinya.
2. BMT dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada UMKM, khususnya pengusaha mikro yang menjadi market dari BMT dengan menggunakan sistem bagi hasil, selain itu dapat dijadikan rujukan untuk membuat proyeksi laporan keuangan sederhana untuk UMKM.

II. KERANGKA TEORITIS

Laporan Keuangan

Secara sederhana laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan atau dalam periode tertentu (Kasmir, 2008).

Menurut Kasmir (2008), data masa lalu yang ditampilkan di laporan keuangan merupakan kombinasi dari fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi, dan pendapat pribadi.

Pembiayaan

Pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain (Muhammad, 2005).

Menurut Siswoyo (2010) tujuan dari penilaian kelayakan pembiayaan ini adalah :

- a. Upaya untuk menilai prospek dan risiko atas sebuah usulan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi baik secara kualitatif (data-data non keuangan) maupun kuantitatif (data-data keuangan) serta proses pengajuan usulan persetujuan.
- b. Menghitung berapa kebutuhan dana pembiayaan yang diperlukan untuk modal kerja atau investasi dan menentukan jenis dan skema pembiayaan serta cara memonitor/kontrol terhadap jalannya pembiayaan.

Mengetahui potensi kebutuhan usaha nasabah terhadap produk dan jasa BMT untuk kepentingan pengembangan usaha nasabah.

Penilaian aspek kelayakan pembiayaan terdiri dari aspek pemasaran, keuangan, manajemen, teknis, jaminan dan analisis dampak lingkungan.

A. Aspek Pemasaran

Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran adalah kemampuan perusahaan memasarkan barang produksi/jasa, hasil usahanya baik yang sekarang maupun yang direncanakan. Menurut Veithzal (2008) hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Lokasi usaha
Penilaian lokasi usaha adalah dengan melihat kedekatan dengan lokasi sumber bahan baku, dekat dengan pasar, dan dekat dengan sumber tenaga kerja.
- 2) Produk atau jasa yang akan dipasarkan
Hal-hal yang perlu diteliti yaitu:
 - a. Daya tahan (*Product life cycle*) dari barang atau jasa tersebut, maka yang harus diperhatikan adalah apakah produk tersebut masih dalam masa pengenalan dan pertumbuhan, pematangan atau penuaan. Serta, apakah pembiayaan yang diajukan telah akan berakhir pada masa produk tersebut paling lambat pada akhir masa ketiga (pematangan).
 - b. Adanya barang substitusi, yaitu seorang analis harus mampu mengidentifikasi sejauh mana produk yang diajukan pembiayaannya dapat mengatasi produk pengganti.
 - c. Adanya perusahaan yang memproduksi barang yang sama (perusahaan pesaing).
- 3) Pangsa Pasar
Pangsa pasar menggambarkan posisi perusahaan dalam persaingan di pasar, sekaligus merupakan harapan tercapainya sasaran jumlah penjualan tiap masa tertentu (Sutojo, 1997).
- 4) Target pemasaran
Target pemasaran menilai target pasar calon nasabah adalah dengan melihat target omzet yang telah dibuat dengan realisasi pencapaian.

B. Aspek Manajemen

Menurut Sutojo (1997) aspek manajemen, dapat pula dilihat dari:

- 1) Usia perusahaan, yakni sebuah perusahaan berusia panjang, paling sedikit dapat membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi berbagai macam perubahan suasana ekonomi, bisnis, politik, dan sosial yang terjadi dimasa lampau.
- 2) Kemampuan mengelola sumber daya manusia (SDM), yakni pemberian bimbingan dan pengawasan yang diperlukan, sehingga kemungkinan SDM melakukan kesalahan terus menerus dapat dihindarkan.

C. Aspek Teknis

Menurut Veithzal (2008) secara umum penilaian aspek teknis harus mencakup :

- 1) Lokasi usaha, yakni adalah dengan melihat dekat dengan lokasi sumber bahan baku, dekat dengan pasar, transportasi mudah dan dekat dengan sumber tenaga kerja.
- 2) Tenaga kerja, yaitu meliputi ketersediaan tenaga kerja, tingkat kebutuhan tenaga kerja, dan upah tenaga kerja.
- 3) Sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana serta faktor produksi yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan tersebut ekonomis.

D. Aspek Keuangan

Evaluasi kondisi keuangan calon debitur dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi perusahaan, analisis asio keuangan, dan proyeksi arus kas calon debitur (Veithzal, 2008). Analisis rasio *profit margin* akan digunakan dalam penelitian ini. *Profit Margin* merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai (Sutrisno, 2003).

Prinsip 5C merupakan prinsip umum yang sering dipakai oleh perbankan dalam menilai kelayakan pembiayaan nasabah (*bankable*).

1. Character

Character yaitu keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan (Veithzal, 2008).

2. Capital

Capital yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan (Veithzal; 2008).

3. Capacity

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. *Capacity* dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank (Veithzal, 2008).

4. Collateral

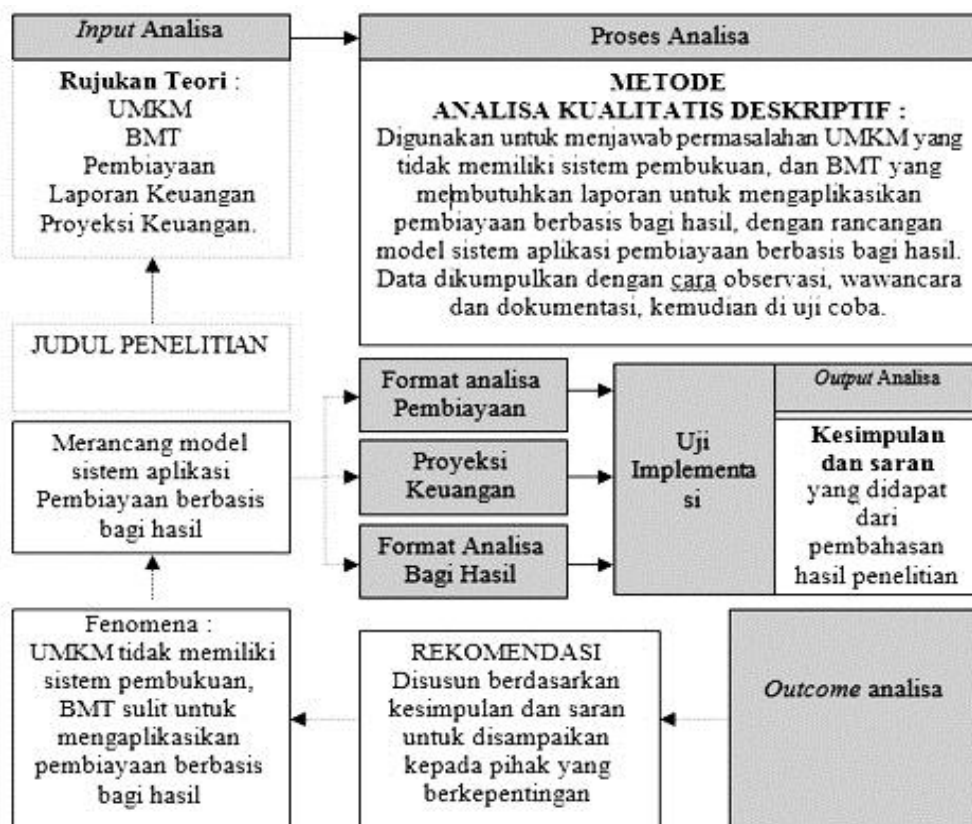
Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan (Kasmir, 2002). Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi juga yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarante*, *letter of comfort*, *rekomendasi*, dan *avalis*.

Penulisan jurnal ini mencoba untuk mengembangkan, menambahkan dan melengkapi, penelitian sebelumnya. Penelitian saat ini membuat format dengan tiga tahapan prosedur pembiayaan. Pertama, tahapan nasabah/anggota UMKM mengajukan pembiayaan sampai dengan tahapan wawancara dan survei. Kedua, tahapan BMT melakukan proses analisa pembiayaan melalui proyeksi keuangan. Ketiga, tahapan keputusan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mutaqin (2007) yaitu peranan pembiayaan dalam meningkatkan jumlah UMKM estimasi dengan metode *Multiple Linier Regresi* (MLR) yang menggunakan fungsi Logaritma Limier (Log-lin), dihasilkan bahwa Jumlah UMKM BMT Al-Ikhlas sebesar 1980 unit usaha, dipengaruhi signifikan oleh produk pembiayaan dengan skim *musyarakah* dan skim *mudharabah*.

Hal ini terlihat dari nilai *t* statistik musyarakah terbesar (8.093544) lebih besar dari nilai *t* tabel sebesar 1.679. Begitu juga dengan skim *mudharabah* nilai statistiknya sebesar (2.786444) lebih besar dari nilai *t* tabel sebesar 1.697. Penjelasan ini memberikan informasi bahwa jumlah UMKM BMT Al-Ikhlas periode oktober 2003 – Oktober 2006 dipengaruhi signifikan oleh produk pembiayaan dengan skim *musyarakah* dan *mudharabah*. Setiap penambahan dana pada produk pembiayaan dengan skim musyarakah sebesar Rp 5 juta akan meningkatkan pertumbuhan UMKM pada satu bulan kedepan sebesar 0.014 persen. Sedangkan penambahan dana pada produk *mudharabah* sebesar Rp 5 juta akan mampu meningkatkan pertumbuhan UMKM pada satu bulan kedepan sebesar 0.043 persen.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

III. METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti tersebut, metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (1997 : 11-13), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Situasi Sosial dan Sampel Penelitian

Pendekatan kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*”, dimana situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin lebih dipahami secara mendalam “apa yang terjadi” didalamnya. Situasi sosial atau obyek penelitian ini adalah mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2009). Situasi sosial dalam penelitian ini adalah BMT Nusantara Sejahtera dalam menganalisis aspek keuangan UMKM tidak secara komprehensif, hanya menilai aspek laba rugi saja dari hasil wawancara, BMT kesulitan mendapatkan data laporan keuangan nasabah pembiayaan dikarenakan UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan tidak memiliki laporan keuangan yang memadai.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan di namakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. (Sugiyono, 2009). Nara sumber yang diteliti berdasarkan teknik *sampling purposive* tersebut terdiri dari :

1. Anggota/Nasabah usaha mikro BMT Nusantara Sejahtera sebanyak 2 nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk modal usaha.
2. Praktisi BMT Nusantara Sejahtera yang melakukan analisis pembiayaan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009). Pengambilan data primer melalui observasi, wawancara objek penelitian, kemudian data sekunder yang di ambil dalam bentuk dokumentasi adalah formulir permohonan pembiayaan, digunakan oleh BMT Nusantara Sejahtera sebagai alat analisa, wawancara sekaligus survei nasabah.

Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Peneliti ikut serta dalam kegiatan operasional yang dilakukan BMT dalam menganalisis nasabah pembiayaan dari semua aspek. Survey, wawancara hingga proses analisis dan proses jemput bola ke nasabah pembiayaan yang ada di pasar-pasar maupun di lokasi usaha. Selain BMT peneliti melakukan observasi ke UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan BMT guna mengetahui operasional usaha yang dijalankannya.

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2010 : 197).

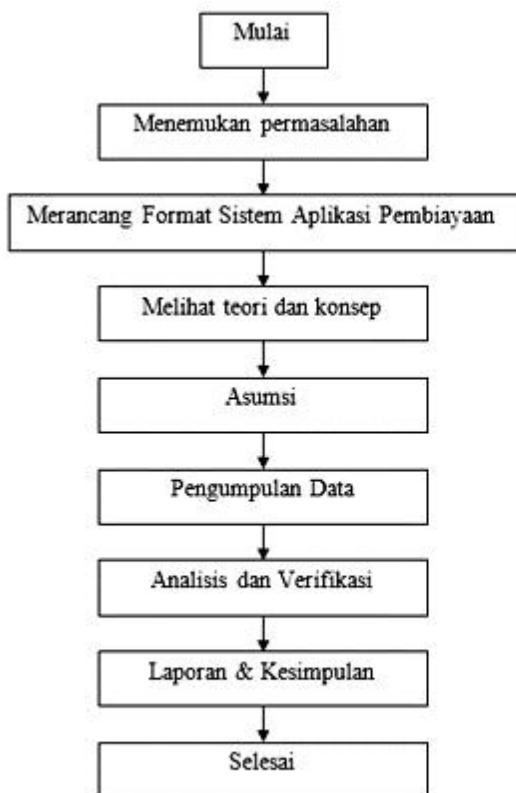
Peneliti mewawancarai analis pembiayaan di BMT Nusantara Sejahtera guna mendapatkan informasi cara analisis pembiayaan di BMT Nusantara Sejahtera dalam menilai aspek keuangan nasabah pembiayaan. Dan mewawancarai UMKM mengenai proses bisnis yang dijalankannya. Wawancara akan dilakukan dengan analisis pembiayaan di BMT Nusantara Sejahtera dan pelaku UMKM yang tidak memiliki laporan keuangan memadai.

wawancara bersifat terbuka dan secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Bagaimana prosedur analisa pembiayaan yang di terapkan di BMT Nusantara Sejahtera ?
- Bagaimana cara analis pembiayaan di BMT Nusantara Sejahtera dalam menilai aspek keuangan nasabah pembiayaan yang tidak memiliki laporan keuangan yang memadai ?
- Bagaimana cara BMT Menentukan kelayakan pembiayaan ?
- Bagaimana BMT Nusantara sejahtera membuat proyeksi keuangan UMKM ?
- Bagaimana cara pelaku UMKM yang tidak memiliki laporan keuangan untuk mengetahui laba usahanya?

Dokumentasi dalam penelitian ini dokumen atau berkas nasabah pembiayaan di BMT, sedangkan dokumen berupa foto-foto yaitu dokumentasi gambar kondisi UMKM di pasar, foto hasil wawancara dengan pihak BMT dan UMKM.

Tahapan Penelitian



Gambar 3 Sistematika Tahapan Penelitian

IV. ANALISIS & PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Penelitian

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Nusantara Sejahtera bergerak dalam bidang ekonomi dengan berbasis syari'ah yang siap menerima titipaan simpanan dan akan menyalurkannya sebagai pembiayaan. Prinsip yang digunakan berlandaskan syari'ah sehingga akan terhindar dari riba dan dikenal dengan sistem bagi hasil/basil. Dana dikelola secara syar'i dan penyaluran dana diperuntukan bagi pihak yang membutuhkan sokongan dana, yang kemudian digunakan untuk kepentingan usaha mereka.

Karakteristik Nara Sumber Penelitian

Keterangan Diri	Nara Sumber 1	Nara Sumber 2
Nama	Santy Mulyani	Salmiah
Usia	41	46
Jenis Kelamin	Perempuan	Perempuan
Status	Menikah	Menikah
Jumlah Anak	2	5
Pekerjaan	Laundry	Penjual kue kering dan basah
Jumlah Pembiayaan	2.000.000	2.000.000
Lama Kerjasama	Baru pertama kali	Baru pertama kali

Tabel 1. Identitas Umum Nara Sumber

Keterangan Diri	Nara Sumber 3
Nama	Muhamad Supriyadi
Usia	31 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pekerjaan	Pimpinan BMT
Lama Bekerja	3,5 tahun

Analisis Subjek Penelitian

Terkait Format Analisa Pembiayaan

Nara sumber melakukan prosedur pembiayaan untuk mendapatkan data dimulai dari nasabah anggota melakukan permohonan pembiayaan dengan mengisi form pengajuan permohonan pembiayaan, kemudian diwawancara, hasil wawancara dicocokkan dengan kondisi di lapangan dengan cara disurvei, hasil data yang terkumpul dilakukan analisa dan hasil analisa dibawa dalam rapat komite untuk dilakukan keputusan apakah dicairkan atau ditolak.

Terkait Proyeksi Keuangan

Nara sumber tidak memperhatikan aspek keuangan untuk keadaan di masa yang akan datang baik itu berupa kerugian ataupun keuntungan yang kira-kira akan diperoleh nasabah, sehingga sangat rentan apabila BMT Nusantara Sejahtera mengaplikasikan pembiayaan berbasis bagi hasil yang sifat transaksinya berdasarkan keuntungan dari usaha nasabah.

Terkait Analisa Bagi Hasil

Dalam kebijakan yang dimiliki BMT Nusantara Sejahtera prinsip perhitungan bagi hasil adalah berbagi keuntungan dari pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu (harian, mingguan,

bagi hasil adalah dari pendapatan modal KJKS, bukan dari pendapatan keseluruhan modal. Penentuan nisbah didasarkan pada target pendapatan KJKS dan hasil usaha debitor. Sistem bagi hasil diterapkan dalam akad Musyarokah dan Mudhorobah dengan prinsip "*profit & loss sharing*".

Nara sumber dalam menentukan bagi hasilnya hanya memperhatikan pada hasil laba rugi pada saat diwawancarai saja, mengenai kemampuan membayar yang harus dilihat dari unsur cash flownya tidak menjadi bagian yang dianalisa.

Rancangan Format Analisa Pembiayaan

Rancangan form aplikasi pembiayaan terdiri dari data pribadi nasabah/anggota usaha mikro yang menggambarkan identitas diri, data permohonan menggambarkan tujuan dari pengajuan pembiayaan dan jumlah plafond pembiayaan yang diajukan, data usaha/objek menggambarkan jenis usaha dan tempat usaha, alasan pemilihan usaha menggambarkan analisis SWOT dari usahanya, aspek lingkungan menggambarkan kondisi lingkungan tempat usaha seperti kemudahan akses transportasi dan kondisi usaha yang sejenis, aspek pemasaran menggambarkan cara calon mitra binaan dalam memasarkan produknya dan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk promosi, aspek operasional menggambarkan cara calon mitra binaan dalam mendapatkan bahan baku atau barang yang dijual sehingga terlihat harga pokok penjualan dari barang yang dijualnya, aspek SDM menggambarkan kuantitas tenaga kerja dan jumlah beban gaji yang dikeluarkan.

Berdasarkan uraian di atas tercermin berbagai form di bawah ini, dimulai dari form data nasabah pembiayaan, form aspek lingkungan usaha, form aspek pemasaran, form aspek operasional, form aspek SDM yang nantinya terhubung langsung ke laporan keuangan usaha mikro yaitu neraca, laporan laba rugi dan arus kas.

Rancangan Format Proyeksi Keuangan

Rancangan format proyeksi keuangan merupakan alat untuk menganalisa potensi usaha UMKM di masa yang akan datang. Proyeksi keuangan merupakan bentuk dari perencanaan keuangan, akan memudahkan BMT melihat apa yang terjadi beberapa waktu yang akan datang.

Berdasarkan SOP analisa pembiayaan BMT Nusantara Sejahtera, analisa harus mempertimbangkan kondisi keuangan di masa-masa yang lalu dan dihubungkan dengan cashflow, yang dapat diproyeksikan untuk keadaan di masa yang akan datang baik ini berupa kerugian ataupun keuntungan yang kira-kira akan diperoleh perusahaan, proyeksi penjualan yang akan dicapai di tahun yang akan datang, proyeksi harga pokok, dan yang paling penting adalah proyeksi dari apa yang terdapat dari laba/rugi yaitu laba bersih perusahaan.

Proyeksi pembelian mencakup rencana dari pengusaha UMKM dalam merencanakan pembelian persediaan bahan pokok yang akan dijual kembali. Proyeksi pembelian dibutuhkan untuk melihat volume usaha dan mengontrol kebutuhan persediaan bahan pokok. Proyeksi Pembelian disusun dengan memperhatikan data-data historis dan kondisi pada saat data historis tersebut terjadi.

Proyeksi penjualan dibutuhkan pada setiap rencana keuangan usaha karena penjualan merupakan titik awal aktivitas perusahaan. Proyeksi penjualan dilakukan berdasarkan data dan fakta, baik dari bisnis UMKM-nya maupun dari kondisi global lainnya. Dengan melihat data 3 bulan sebelumnya dan data saat ini, BMT sangat mudah untuk menganalisa penjualan pada bulan-bulan berikutnya

Proyeksi nilai persediaan yang berkurang merupakan asumsi terhadap nilai persediaan pembelian dan proyeksi penjualan. Asumsi proyeksi atas persediaan barang apakah memiliki nilai sisa atau habis, dianalisa dari proyeksi nilai persediaan yang berkurang berdasarkan proyeksi barang yang dijual dengan dan proyeksi membeli persediaan bahan pokok.

Proyeksi Persediaan barang merupakan hasil integrasi antara proyeksi pembelian, penjualan dan nilai persediaan yang berkurang. Hasil analisa proyeksi persediaan barang memberikan hasil dari persediaan akhir, sehingga lebih memudahkan BMT untuk melihat efisiensi pembelian persediaan dari bulan sebelumnya. Proyeksi persediaan barang menjadi alat kontrol untuk melihat seberapa cepat aktifitas dari persediaan barang berputar.

Proyeksi harga pokok penjualan menggambarkan biaya langsung yang timbul dari barang yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan usaha. Persediaan awal dan harga pokok penjualan sama dengan barang tersedia untuk dijual sehingga barang tersedia untuk dijual adalah persediaan awal ditambah dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dihitung dengan mengurangi persediaan akhir dari barang tersedia untuk dijual. Format proyeksi harga pokok penjualan dirancang agar bisa digunakan secara otomatis untuk usaha dagang dan industri, sehingga BMT bisa menganalisa keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual.

Proyeksi neraca menunjukkan posisi keuangan UMKM tersebut pada setiap bulannya. Proyeksi neraca membantu BMT menganalisa pertumbuhan aset selama periode pembiayaan kedepan. Proyeksi neraca menjadi alat BMT untuk mengukur rasio keuangan UMKM apakah mengalami pertumbuhan atau penurunan aset setiap bulannya.

Proyeksi laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan UMKM yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih. Rancangan format proyeksi laba rugi dapat membantu BMT dalam menentukan bagi hasil yang adil.

Proyeksi Cash Flow sangat dibutuhkan oleh BMT agar dapat mengetahui UMKM dapat mengembalikan dana investasi sesuai dengan periodenya. Rancangan Format cash flow ditambahkan dengan pendapatan lain yang dihasilkan oleh pengusaha UMKM dan biaya hidup. Penambahan ini dikarenakan UMKM belum memisahkan dana untuk keperluan usaha dan untuk keperluan pribadi. Proyeksi rasio keuangan terbatas pada kebutuhan BMT untuk menganalisa kemampuan membayar UMKM, rasio keuntungan dan tingkat efisiensi dalam menjalankan usahanya. Indikator penilaian bobot sesuai dengan standard peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

Rancangan Format Bagi hasil

Rancangan format bagi hasil merupakan kesimpulan dan rekomendasi yang menentukan apakah nasabah/anggota UMKM dapat difasilitasi pembiayaan berbasis bagi hasil. Penilaian pertama adalah kemampuan membayar nasabah/anggota UMKM harus lulus sesuai dengan periode pembayaran. Kedua, dilanjutkan dengan kelayakan usaha berdasarkan rasio keuangan dan karakter dengan indikator kelayakan di atas atau sama dengan nilai 75. Indikator penilaian di atas 75 berdasarkan BMT Nusantara Sejahtera menentukan kelayakan pembiayaan dalam menilai karakter dan kapasitas usaha. Nasabah/Anggota UMKM

akan mendapatkan rekomendasi analisis yaitu untuk dapat difasilitasi jika kelayakan usaha dianggap *feasible*

Hasil Uji Implementasi

Hasil uji implementasi yang dilakukan oleh nara sumber Santy Mulyanti dan Salmiah, aplikasi dapat digunakan dan terbukti dapat membentuk laporan keuangan, proyeksi keuangan dan analisa bagi hasil yang menunjukkan pola pembayaran dan *feasibility* nara sumber.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil uji implementasi rancangan format laporan dan proyeksi keuangan usaha rakyat mikro untuk analisa pembiayaan berbasis bagi hasil pada baitul maal wat tamwil, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Format aplikasi analisa pembiayaan yang sudah diujikan di lapangan memberikan kebutuhan BMT untuk membantu mempertajam analisa. Laporan keuangan sebagai acuan untuk membuat proyeksi keuangan, sangat dibutuhkan dalam penyaluran dana berbasis bagi hasil. Form ini dapat menampilkan data yang dibutuhkan oleh BMT untuk menganalisa. Pertama, profil usaha yang terdiri dari data pribadi, data permohonan, data usaha, alasan pemilihan usaha, aspek lingkungan, aspek pemasaran, aspek operasional, aspek SDM dan aspek laporan keuangan. Kedua, daftar biaya hidup dan pendapatan lainnya. Ketiga, pendekatan karakter. Keempat, proyeksi usaha yang terdiri dari proyeksi target pembelian persediaan barang dan proyeksi target penjualan. Kelima, inventarisir peralatan dan rencana investasi. Keenam, rencana biaya operasional setelah menerima pembiayaan. BMT sangat dituntut untuk berperan sebagai manajer investasi yang mengerti dengan proses bisnis yang dijalankan oleh mitranya. Form Aplikasi ini mengarahkan BMT untuk memahami setiap aspek yang mempengaruhi proses bisnisnya.

Format Aplikasi Proyeksi Keuangan memberikan ramalan *penjualan* dan *Pendapatan* kepada BMT. Informasi ini penting karena merupakan indikator kunci untuk kemampuan UMKM untuk membayar kembali investasi. Proyeksi keuangan perlu dipelajari terlebih dahulu oleh BMT apakah terdapat perkembangan di masa depan sehingga menarik untuk dapat berinvestasi pada usaha tersebut. Aplikasi ini akan memberikan urutan sistematis bagi BMT untuk melihat proses bisnis dari mulai proyeksi pembelian selama periode kerjasama sampai dengan proyeksi *cash flow*.

Format Aplikasi Analisa bagi hasil yang sudah diujikan memberikan urutan sistematis dalam menentukan keputusan. Aplikasi tersebut memberikan output secara otomatis terintegrasi dengan format aplikasi analisa pembiayaan dan proyeksi keuangan. Hasil dari kesimpulan dan rekomendasi melihat dari semua aspek sehingga terolah dalam satu aplikasi yang dapat memudahkan BMT untuk mempraktikkan prinsip bagi hasil.

Ujicoba yang dilakukan di BMT adalah para anggota yang memiliki usaha produktif, namun terbiasa menggunakan akad *Murabahah* yang pendekatannya menggunakan piutang kredit. Hasilnya akad dapat dirubah menjadi akad berbasis bagi hasil.

Dari hasil ujicoba yang dilakukan, ketiga format aplikasi tersebut dapat digunakan oleh BMT, walaupun ada beberapa data yang tidak terinput karena keterbatasan UMKM itu sendiri. Rancangan format diarahkan sampai dengan usaha menengah, untuk usaha dagang, jasa dan industri.

Keterbatasan dan Saran Penelitian kedepan

1. Nara sumber yang digunakan dalam penelitian ini fokus pada situasi sosial BMT Nusantara. Hal ini menyebabkan kesimpulan dari hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir untuk situasi sosial BMT lain.
2. Penelitian ini dikhususkan untuk mengetahui apakah Rancangan format analisa pembiayaan, proyeksi keuangan, dan analisa bagi hasil untuk usaha mikro bukan UMKM secara umum, dimana ada usaha kecil dan menengah.
3. Penelitian ini hanya diujikan pada satu BMT sebagai studi awal, maka untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan implementasi pada BMT-BMT yang lain untuk menguji kehandalan rancangan format analisa pembiayaan, proyeksi keuangan dan analisa bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Taufik. (2013). Rancangan Format Laporan Keuangan Usaha Mikro Dan Form Aplikasi Pembiayaan Untuk Analisa Keuangan Nasabah Pembiayaan pada BMT. Skripsi STEI SEBI
- Kasmir. (2008). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2002). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka Umum.
- Lundholm, R. & Sloan, R. (2007). Equity Valuation & Analysis. Michigan : McGraw – Hill International.

Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Mutaqin, D. M. (2007). *Peranan Pembiayaan Dalam Meningkatkan Jumlah UMKM*. Jurnal Universitas Indonesia.

Siaahan, Rapma. (2007). *Kelayakan UMKM dalam menerima kredit komersial*. Jurnal Infokop VOLUME 15 (2)

Strauss and Corbin, *Basics of Qualitative Research : Grounded Theory Procedures and technique*, Newbury Park, Sage Publication, 1990

Siswoyo, M. M. (2010). *Analisa Pembiayaan Retail*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.

Sutojo, S. (1997). *Analisa Kredit Bank Umum*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Sutrisno, D. (2003). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonesia FE UI.

Veithzal, V. R. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Djambatan.

Pengaruh Kepemimpinan Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Variabel *Intervening Turnover Intention* di PT. Musica Studio

Rizal Bakti dan Rina Astini

Universitas Mercubuana

Email: Rizal_bakti@yahoo.co.id dan chumairoh20@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of leadership and organizational climate on turn over in employee performance at PT. Musica Studio by implementing variable Intervening Turnover Intention (ITI). Inferential statistical analysis used was SEM (Structural Equation Modeling) by collecting data through a survey of staffs at PT. Musica Studio's as much as 104 responden. The research proved that Leadership Variable has insignificant influence on Turn over Intention variabel; while Climate Organizatinal variable not significantly influence on Turn over intention. Meanwile, leadership variable significantly influence on performance variable; so is Climate Organizational variable signicatyly influence on Performance variable; ITI variable is not significant influence on Performance variable.

Key words : Leadership, Climate Organization, Turnover Intention, Employee Performance

Abstrak

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisa pengaruh kepemimpinan dan iklim organisasi kinerja karyawan di PT Musica Studio dengan memakai variable *Intervening Turnover Intention (ITI)*. Analisis statistik inferensial yang digunakan adalah *SEM (Structural Equation Modeling)* dengan pengumpulan data melalui survei sebanyak 104 responden. Riset ini terbukti bahwa variabel kepemimpinan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel ITI; sedangkan variabel iklim organisasi juga tidak berpengaruh nyata terhadap ITI. Namun, variabel kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan; demikian juga dengan variabel iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Variabel ITI tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel kinerja.

Kata kunci : Kepemimpinan, Iklim Organisasi, Turnover Intention, Kinerja Karyawan

I. PENDAHULUAN

Meningkatnya perkembangan dunia usaha selaras dengan meningkatnya perekonomian Indonesia khususnya industri kreatif yang sedang berkembang saat ini. Industri kreatif di Indonesia bisa berkembang seperti di negara Korea dan Inggris bila dikembangkan dengan baik, salah satu negara yang berhasil mengembangkan industri kreatifnya adalah negara Korea dengan K-POPnya yang mendunia, dengan K-POP Korea menjadi kiblat industri musik Asia saat ini. Tantangan bagi Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif.

Sumber daya manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perusahaan yang mempunyai peranan penting bagi tercapainya visi dan misi serta *goals* yang akan dicapai perusahaan. Oleh karena itu perhatian terhadap sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, disamping faktor-faktor produksi yang lain seperti sumber modal, bahan baku, mesin, dll.

Banyaknya karyawan yang keluar menjadi pertanyaan bagi manajemen khusus bagian *Human Resources* yang ada di perusahaan, setelah dilakukan inventarisasi masalah penyebab keluarnya karyawan, seperti : *benefit* dan remunerasi (gaji, tunjangan, bonus, fasilitas kesehatan, jamsostek), *Career Development* (Promosi), Iklim Organisasi, Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, dll.

Setelah dilakukan analisa/pengamatan/pengumpulan data *base* perusahaan terhadap organisasi di dapat hasil bahwa penyebab keluarnya karyawan bukan hanya disebabkan oleh *benefit* dan remunerasi karyawan, *benefit* dan remunerasi yang diberikan perusahaan dengan karyawan sangat kompetitif dengan industry, sejenis seperti : E-motion dan Nagaswara, diduga ada kemungkinan faktor-faktor lain seperti : lingkungan organisasi, *like dislike*, ketidakadilan, penghargaan terhadap bawahan, hubungan

Disisi lain penyebab keluarnya karyawan yang produktif bisa juga disebabkan oleh kepemimpinan dan iklim organisasi yang kurang kondusif, sebagai gambaran pada tahun 2008 satu divisi mempunyai dua manager dengan bawahan berbeda, Manager pertama memimpin dengan bijak dan *relationship management* yang lebih baik dimana hubungan terhadap bawahan dekat, sedangkan manager yang kedua mempunyai jarak dengan bawahannya sehingga bawahan dalam suasana yang serba kaku dan terlihat tegang dalam bekerja. Setelah Manager pertama keluar dan semua bawahan dipimpin oleh manager yang kedua banyak karyawan yang keluar setelah penggabungan terjadi di Divisi tersebut. Pemimpin yang bijak dan berempati kepada bawahan menciptakan suatu hubungan kerja yang lebih baik, selain itu suasana yang tercipta memacu bawahan untuk bekerja dengan baik, adanya bimbingan dan pengarahan dari atasan menciptakan hubungan yang lebih baik. Tidak hanya disatu divisi di divisi lain pun terjadi hal yang demikian.

Berikut hasil survey awal mengenai kepemimpinan dan iklim organisasi yang dilakukan terhadap 31 responden ditemukan sembilan masalah kepemimpinan diantaranya, visi dan misi yang tidak jelas, kebijakan perusahaan kurang diinformasikan secara formal keseluruh karyawan dan enam masalah iklim organisasi seperti , lingkungan organisasi kaku, adanya *like dislike*, suasana kerja tidak harmonis. Hal inilah yang dapat menyebabkan ada keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut : Kepemimpinan tidak punya visi dan misi yang jelas, Pemimpin tidak respek terhadap bawahan, Pemimpin tidak mengapresiasi hasil kerja bawahan, Iklim Organisasi Tidak Kondusif (Tidak Nyaman), Kinerja turun/Pekerjaan tidak selesai, Banyaknya Karyawan/ti yang mengundurkan diri/Turnover Tinggi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah Kepemimpinan berpengaruh terhadap *Turnover Intention* karyawan di PT Musica Studio's ?, Apakah Iklim Organisasi berpengaruh terhadap *Turnover Intention* karyawan di PT Musica Studio's ? Apakah *Turnover Intention* berpengaruh terhadap *Kinerja karyawan* di PT. Musica Studio's ? Apakah Kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap *Kinerja Karyawan* di PT. Musica Studio's ? Apakah Iklim Organisasi berpengaruh langsung terhadap *Kinerja Karyawan* di PT. Musica Studio's ? .

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESA Kepemimpinan

Banyak pengertian kepemimpinan yang telah diungkapkan para ahli. Pengertian-pengertian yang diberikan pada intinya memiliki muara yang sama, yaitu usaha mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hunt (Thamrien, 2009) kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari konsep pengaruh. Proses munculnya pengaruh secara alami terjadi dalam sistem sosial, dimana pemimpin memengaruhi pilihan-pilihan tujuan dan strategi untuk dicapai, motivasi anggota organisasi untuk meraih tujuan, belajar dan berbagai pengetahuan diantara pengikut, dan mengalgan dukungan dan kerjasama dari pihak luar. (Yukl, 2010).

Selain itu Ramsayer (Thamrien,2009) memberikan pengertian kepemimpinan sebagai tindakan atau perilaku diantara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mengakibatkan individu dan kelompok, dua-duanya bergerak kearah tujuan-tujuan pendidikan yang semakin diterima oleh mereka satu sama lain. Kemudian menurut Stogdill (Thamrien,2009), kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Terry (Thamrien,2009) yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja dengan kemauan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian terlihat bahwa kepemimpinan pada intinya merupakan proses mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian ini menekankan pada kalimat mempengaruhi orang lain, yang didalamnya terkandung unsur hubungan, proses, dan kegiatan. Untuk mencapai tujuan bersama, seorang pemimpin perlu menggunakan berbagai cara. Cara-cara tersebut biasanya diwujudkan dengan memberi petunjuk, mengarahkan, dan membina untuk melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Kepemimpinan dalam suatu organisasi memegang peranan yang sangat penting dan vital. Vitalitas kepemimpinan dalam suatu organisasi terkait dengan fungsi kepemimpinan, yang menurut (Wirawan,2007) meliputi delapan fungsi kepemimpinan, yaitu : Menciptakan Visi, Mengembangkan budaya Organisasi, Menciptakan Sinergi, Memberdayakan Pengikut, Menciptakan perubahan, Memotivasi Pengikut, Mewakili sistem sosialnya, Membelajarkan Organisasi. Menurut Gupta (Thamrien, 2009) paling tidak ada persepektif yang universal dan lintas budaya terkait dengan kepemimpinan

Iklim Organisasi

Organisasi yang dipandang sebagai suatu sistem sosial, dalam perjalanan selalu dipengaruhi oleh lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Davis dan Newstrom (Manik, 2010) mengemukakan bahwa iklim organisasi itu adalah Lingkungan manusia didalam, dimana para anggota organisasi melakukan

pekerjaan mereka. Dalam kaitan ini jelas dimaksudkan bahwa iklim organisasi itu adalah yang menyangkut semua lingkungan yang ada atau hadapi oleh manusia yang berada di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tugas-tugas keorganisasian.

Menurut Litin dan R.A stringer (Wirawan, 2007) bahwa 'Iklim Organisasi merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang secara relatif terus berlangsung, dialami oleh anggota organisasi, mempengaruhi perilaku mereka dan dapat dilukiskan dalam pengertian satu set karakteristik atau sifat organisasi.'

Keith Davis (Manik, 2010) mengemukakan pengertian iklim organisasi sebagai "*The Human Environment within an organization's employee do their work*". Pernyataan Davis tersebut mengandung arti bahwa iklim organisasi itu adalah yang menyangkut semua lingkungan yang ada atau yang dihadapi oleh manusia di dalam suatu organisasi tempat mereka melaksanakan pekerjaannya.

Sedangkan menurut Davis dan Newstrom (Manik, 2010) bahwa " Iklim Organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan suasana internal lingkungan organisasi sebagai pembedaan sebuah organisasi yang membedakan dengan organisasi lainnya yang mengarah pada persepsi masing-masing anggota dalam memandang organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi adalah serangkaian deskripsi dari karakteristik organisasi yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya yang mengarah pada persepsi masing-masing anggota dalam memandang organisasi.

Turnover Intention.

Menurut Zeffane (Luvy, 2004) arti *Intention* adalah keinginan untuk keluar yang timbul pada individu untuk melaksanakan sesuatu. Sementara *turnover* adalah berhentinya seseorang karyawan dari tempatnya bekerja secara sukarela dapat didefinisikan bahwa *turnover intention* adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari perusahaannya secara sukarela menurut pilihannya sendiri.

Menurut Zeffane (Luvy, 2004) ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya *turnover*, diantaranya adalah faktor eksternal, yakni pasar tenaga kerja, faktor institusi yakni kondisi ruang kerja, upah, ketrampilan kerja, dan supervisi, karakteristik personal dari karyawan seperti intelegensi, masa lalu, jenis kelamin, minat, umur, dan lama bekerja serta reaksi individu terhadap pekerjaannya.

Menurut Mobley (Cameli, 2004) tentang *employee turnover*, terdapat hubungan antara kepuasan kerja dan berhenti bekerja. Hubungan itu dimulai dari adanya pikiran untuk berhenti bekerja, usaha-usaha untuk mencari pekerjaan baru, berinteraksi untuk berhenti bekerja atau tetap bertahan dan yang terakhir adalah memutuskan untuk berhenti bekerja. Menurut Mobley (Cameli, 2004), perasaan tidak puas akan memicu rencana untuk berhenti bekerja, yang kemudian akan mengarahkan pada usaha mencari pekerjaan baru.

Industri yang memiliki angka *turnover intention* yang tinggi mengindikasikan bahwa karyawan tidak betah bekerja di industri tersebut. Jika dilihat dari segi ekonomi tentu industri akan mengeluarkan *cost* yang cukup besar karena industri sering melakukan rekrutmen yang biayanya sangat tinggi,

pelatihan dan menguras tenaga serta biaya dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi suasana kerja menjadi kurang menyenangkan. Selain itu, adanya *turnover intention* menurut Dalton & Todor (Cameli, 2004) dapat mengganggu proses komunikasi, produktivitas serta menurunkan kepuasan kerja bagi karyawan yang masih bertahan.

Organisasi selalu berusaha mencari cara menurunkan tingkat perputaran karyawan terutama *disfunctional turnover intention* yang menimbulkan berbagai potensi biaya seperti biaya pelatihan yang sudah diinvestasikan pada karyawan, tingkat kinerja yang mesti dikorbankan, serta biaya rekrutmen dan pelatihan kembali. Walaupun pada kasus tertentu perputaran kerja terdiri dari karyawan dengan kinerja rendah tetapi tingkat perpindahan kerja karyawan yang terlalu tinggi mengakibatkan biaya yang ditanggung organisasi jauh lebih tinggi dibanding kesempatan memperoleh peningkatan kinerja dari karyawan baru Hollenbeck & Williams (Luvy, 2004) Berbagai studi telah menunjukkan bahwa berpindah merupakan variabel yang paling berhubungan dan lebih banyak menerangkan varians perilaku *turnover intention*. Tingkat *intention* adalah kriteria yang cukup baik untuk mengukur stabilitas yang terjadi di organisasi tersebut, dan juga bisa mencerminkan kinerja dari organisasi Muchinsky (Carmeli, 2004).

Turnover intention mengarah pada kenyataan akhir yang dihadapi organisasi berupa jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi pada periode tertentu, sedangkan keinginan untuk berpindah mengacu pada hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan hubungan dengan organisasi dan belum diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan organisasi (Carmeli, 2004).

Menurut Mueller (Luvy, 2004), ada beberapa aspek yang bisa dipakai sebagai predictor dari *turnover intention*, yakni : 1. Variabel Kontekstual Variabel ini adalah variabel yang terpenting dalam mempelajari perilaku. Faktor yang penting dalam permasalahan mengenai turnover intention adalah adanya alternatif pekerjaan lain yang tersedia di luar organisasi, alternatif-alternatif organisasi dan bagaimana individu tersebut menerima nilai atau menghargai perubahan pekerjaan. Variabel kontekstual ini tercakup didalamnya adalah : Alternatif-alternatif yang ada di luar organisasi (*external alternatives*) Adanya kecenderungan karyawan untuk meninggalkan organisasi dikarenakan adanya alternatif pekerjaan baru di luar organisasi. Sementara itu dari sisi individu, umumnya pembentuk *turnover intention* berdasarkan persepsi subyektif dari pasar tenaga kerja, dan umumnya individu akan benar-benar melakukan perpindahan kerja jika persepsi yang ia bentuk sesuai dengan kenyataan, dan mereka merasa aman dengan pekerjaan baru).

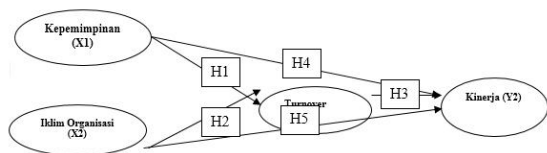
Kinerja Karyawan

Prestasi, kinerja atau untuk kinerja karyawan merupakan fokus utama dalam manajemen kinerja . Hal ini dapat diperhatikan dengan jumlah kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dapat diselesaikan individu dalam kurun waktu tertentu. Jansen (Mas'ud, 2004) menyatakan dimensi yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan secara individu, anatara lain sebagai berikut : Kualitas, Tingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan berapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Kuantitas Jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah sejumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan Ketepatan Waktu Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang lain.

Efektivitas Tingkat penggunaan sumber daya organisasi dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian mengacu pada tinjauan pustaka sehingga dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut :



Hipotesis

- H1** : Kepemimpinan berpengaruh Terhadap *Turnover Intention*, **H2** : Iklim Organisasi berpengaruh terhadap *Turnover Intention*, **H3** : *Turnover Intention* berpengaruh terhadap kinerja, **H4** : Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja
- H5** : Iklim Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan subjek penelitian, metode penelitian jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasionalisasi, metode analisis yang terdiri atas uji validitas, uji reabilitas, dan analisa model dengan menggunakan SEM LISREL 8.80 .

Populasi

Setiap penelitian berdasarkan masalah yang ingin diteliti, mempunyai populasi tertentu dan dibatasi oleh ruang lingkup penelitian yang telah ditentukan yang dapat mendukung penelitian tersebut.

Menurut Sugiyono (2003 : 55), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan kareteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karateristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau objek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Musica Studio's, yang menjadi subjek dalam penelitian ini berjumlah 141 orang karyawan terdiri karyawan dengan level jabatan *worker* sampai dengan *senior manager*.

Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Sample merupakan sebagian dari populasi yang memiliki kateristik relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Sample ini pula dapat diambil keseluruhan dikarenakan jumlah populasi yang ada terbatas dan tidak memungkinkan untuk dilakukan perhitungan sampel.

Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan populasi, maka dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Slovin. (Abdi, 2008) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N.e^2} \text{-----} I$$

Dimana :

- n = ukuran sampel
- N = ukuran populasi
- e = Presentasi Kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat di tolerir

Jika populasi adalah sebesar 141, dan *Error Sampling (e)* adalah sebesar 10 %, maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dihitung sebagai berikut :

$$n = \frac{141}{1 + 141 \times 0.10^2}$$

$$= 99.295$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebanyak 99.295 responden atau 100 responden.

Uji Validitas,

Uji validitas dan reliabilitas untuk masing-masing variabel dengan menggunakan SPSS. Uji validitas menggunakan modul *Dimension Reduction - Factor*. Pada hasil uji tersebut, nilai yang diperhatikan adalah *MSA (Measure of sampling Adequacy)* pada tabel *Anti-Image Matrices*, dan nilai *extraction* pada table *communality*. Pertanyaan pada kuesioner dianggap valid jika memiliki nilai *MSA dan extraction > 0,5*. Hasil pengujian untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Uji Validitas Variabel Kepemimpinan, Variabel Iklim Organisasi,

Indikator	Standardize Loading Factor (SLF)	Nilai R	Keterangan
Visi2	0,759	0,5	Valid
Visi5	0,678	0,5	Valid
Visi6	0,767	0,5	Valid
BudOrg 1	0,721	0,5	Valid
Sinergi 1	0,624	0,5	Valid
Sinergi 2	0,738	0,5	Valid
Daya 1	0,694	0,5	Valid
Daya 2	0,781	0,5	Valid
Daya 3	0,797	0,5	Valid
Daya 4	0,676	0,5	Valid
Daya 5	0,752	0,5	Valid
Change4	0,735	0,5	Valid
Mot3	0,752	0,5	Valid
Mot5	0,781	0,5	Valid
Mot6	0,69	0,5	Valid
Moti7	0,806	0,5	Valid
Sis Sos1	0,711	0,5	Valid
Sis Sos2	0,741	0,5	Valid
Sis Sos3	0,711	0,5	Valid
Sis Sos4	0,737	0,5	Valid
Orgsil	0,725	0,5	Valid
Org2	0,677	0,5	Valid
Struktur2	0,761	0,5	Valid
Struktur3	0,686	0,5	Valid
Standar1	0,69	0,5	Valid
Standar2	0,685	0,5	Valid
Standar4	0,81	0,5	Valid
Standar5	0,676	0,5	Valid
Standar6	0,697	0,5	Valid
Tanggungjawab1	0,908	0,5	Valid
Tanggungjawab2	0,586	0,5	Valid
Tanggungjawab3	0,614	0,5	Valid

Sumber : Diolah dengan Program SEM Lisrel 8.80 . 2013

Tabel 1.1 Uji Validitas
Variabel Iklim Organisasi, Variabel *Turnover*, Variabel Kinerja

Indikator	Standardize Loading Factor (SLF)	Nilai R	Keterangan
Penghargaan4	0,597	0,5	Valid
Dukungan1	0,713	0,5	Valid
Dukungan2	0,775	0,5	Valid
Dukungan3	0,8	0,5	Valid
Dukungan4	0,719	0,5	Valid
Komitmen3	0,659	0,5	Valid
Komitmen3	0,659	0,5	Valid
Turnover2	0,673	0,5	Valid
Turnover3	0,758	0,5	Valid
Turnover4	0,65	0,5	Valid
Turnover5	0,561	0,5	Valid
Turnover7	0,591	0,5	Valid
Turnover8	0,697	0,5	Valid
Turnover9	0,698	0,5	Valid
Kualitas1	0,628	0,5	Valid
Kualitas5	0,639	0,5	Valid
Kuantitas1	0,707	0,5	Valid
Kuantitas2	0,701	0,5	Valid
Tepat waktu3	0,735	0,5	Valid
Tepat waktu4	0,705	0,5	Valid

Sumber : Diolah dengan Program SEM Lisrel 8.80 . 2013

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu berhubungan dengan masalah ketepatan dari suatu data, sedangkan untuk pengujian reabilitas melalui koefisien *alpha* dengan dibandingkan nilai 0,60. Konstruksi atau variabel dikatakan reliabel apabila mempunyai nilai *alpha cronbach* diatas 0,60 dan sebaliknya (Ghozali,2008).

Tabel 1.2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Standar Nilai	Keterangan
Kepemimpinan	0,937	0,60	Reliabel
Iklm Organisasi	0,892	0,60	Reliabel
Turnover	0,664	0,60	Reliabel
Kinerja	0,842	0,60	Reliabel

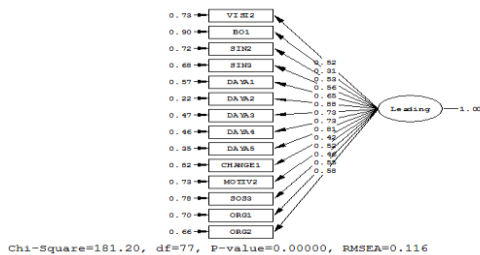
Sumber : Pengolahan Data SPSS, 2013

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat nilai *alpha cronbach* > 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa hasil survey tersebut reliabel.

IV. HASIL DAN ANALISIS

Uji Kecocokan Model Pengukuran Variabel Kepemimpinan

Terdapat empatbelas variabel teramati tentang Kepemimpinan yang telah di uji mendapat *chi-square* = 181,20, df = 77, P-value = 0.00, RMSEA = 0,116



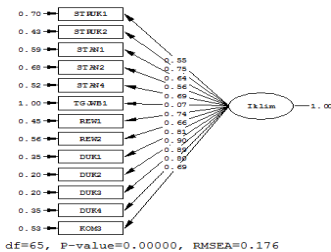
Model 1.1 Pengukuran Variabel Kepemimpinan

Berdasarkan Gambar 1.1. dari tigabelas variabel teramati yang dimasukkan dalam analisis SEM, terdapat sepuluh variabel teramati yang bernilai $\geq 0,5$.

Yaitu, Visi2, SIN2, SIN3, DAYA1, DAYA2, DAYA3, DAYA4, CHANGE1,ORG1,ORG2. sebagai dimensi teramati *Variabel Kepemimpinan* mempunyai nilai *standardized loading estimate* (muatan faktor standar) $\geq 0,5$. Sehingga pengujian final dari sepuluh dimensi teramati keseluruhannya valid dan dapat digunakan dalam model penelitian.

Variabel Iklm Organisasi

Terdapat tiga belas variabel teramati tentang iklim organisasi yang diuji mendapatkan hasil *Chi-square* = 269.05, df = 65 , P – value = 0.00, RMSEA = 0,176



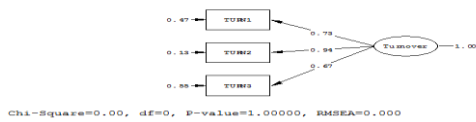
Sumber : Data diolah dari Program SEM LISREL,2013

Model 1.2 Pengukuran Variabel Iklm Organisasi

Berdasarkan Gambar 1.2 dari tigabelas variabel teramati yang dimasukkan dalam analisis SEM, terdapat sepuluh variabel teramati yang bernilai $\geq 0,5$.STRUK1,STRUK2,STAN2,STAN4,REW1,REW2,DUK1,DUK2,DUK3, DUK4 sepuluh variabel teramati *Variabel Iklm Organisasi* mempunyai nilai *standardized loading estimate* (muatan faktor standar) $\geq 0,5$. Sehingga pengujian final dari sepuluh variabel teramati keseluruhannya valid dan dapat digunakan dalam model penelitian.

Variabel Turnover Intention

Terdapat tiga variabel teramati tentang iklim organisasi yang diuji mendapatkan hasil *Chi-square* = 0.00, df = 0 , P – value = 1.00000, RMSEA = 0.000



Sumber : Data diolah dengan Program SEM LISREL, 2013

Model 1.3 Pengukuran Variabel Turnover

Berdasarkan Gambar 1.3. dari tiga variabel teramati yang dimasukkan dalam analisis SEM, terdapat tiga variabel teramati yang bernilai $\geq 0,5$. Yaitu, sebagai variabel teramati *Variabel Turnover Intention* *TURN1,TURN2,TURN3* mempunyai nilai *standardized loading estimate* (muatan faktor standar) $\geq 0,5$. Sehingga pengujian final dari tiga variabel teramati keseluruhannya valid dan dapat digunakan dalam model penelitian.

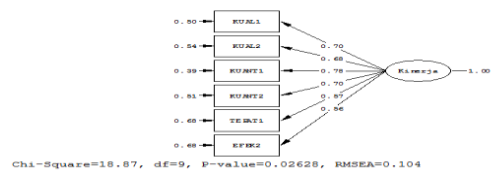
Variabel Kinerja Karyawan

Terdapat enam variabel teramati tentang iklim organisasi yang diuji mendapatkan hasil Chi-square = 18.18, df = 9 , P – value = 0.026, RMSEA = 0,105. Berdasarkan Gambar 5.5. dari enam variabel teramati yang dimasukkan dalam analisis SEM, terdapat enam variabel teramati yang bernilai $\geq 0,5$. Yaitu,KUN1,KUN2,KUANT1,KUANT2, TEPAT1,EFEK2 sebagai variabel teramati *Variabel Kinerja* mempunyai ini Sehingga pengujian final dari enam dimensi teramati keseluruhannya valid dan dapat digunakan dalam model penelitian

Variabel Kinerja Karyawan

Terdapat enam variabel teramati tentang iklim organisasi yang diuji mendapatkan hasil Chi-square = 18.18, df = 9 , P – value = 0.026, RMSEA = 0,105.

Berdasarkan Gambar 5.5. dari enam variabel teramati yang dimasukkan dalam analisis SEM, terdapat enam variabel teramati yang bernilai $\geq 0,5$. Yaitu,KUN1,KUN2,KUANT1,KUANT2, TEPAT1,EFEK2 sebagai variabel teramati *Variabel Kinerja* mempunyai ini Sehingga pengujian final dari enam dimensi teramati keseluruhannya valid dan dapat digunakan dalam model penelitian.



Sumber : Data diolah dari Program SEM LISREL, 2013

Model Pengukuran Variabel Kinerja

Tabel 1.3 Hasil Uji Kecocokan Model Pengukuran Model Sesudah Dilakukan Spesifikasi

No	Ukuran GOF	Target Tingkat Kecocokan	Hasil Estimasi	Tingkat Kecocokan
1.	<i>Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) P (Close-fit)</i>	RMSEA \leq 0,08 P \geq 0,05	0,095	Tidak Fit
2.	<i>Normed Fit Index (NFI)</i>	NFI \geq 0,90	0,58	Tidak Fit
3.	<i>Tucker – Lewis Index atau Non- Normed Fit Index (TLI atau NNFI)</i>	NNFI \geq 0,90	0,71	Tidak Fit
4.	<i>Comparative Fit Index (CFI)</i>	CFI \geq 0,90	0,73	Tidak Fit
5.	<i>Incremental Fit Index (IFI)</i>	GFI \geq 0,90	0,73	Tidak Fit
6.	<i>Relative Fit Index (RFI)</i>	RFI \geq 0,90	0,55	Tidak Fit
7.	<i>Goodness-Of-Fit Index (GFI)</i>	GFI \geq 0,90	0,62	Tidak Fit
8.	<i>Adjusted Goodness Of Fit Index (AGFI)</i>	AGFI \geq 0,90	0,57	Tidak Fit

Sumber : Hasil pengolahan data dengan program SEM Lisrel. 8.80, 2013

Peneliti telah melakukan modifikasi terhadap uji kecocokan keseluruhan model pengukuran seperti Tabel 1.3. di atas dari 8 (delapan) item pengukuran kecocokan model (*fitness measure*) keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Dengan melihat hasil uji kecocokan model pengukuran model keseluruhan sesudah dilakukan modifikasi / spesifikasi tersebut bahwa *goodness of fit* menunjukkan kecocokan yang baik (*good fit dan marginal fit*). Maka dapat disimpulkan kecocokan keseluruhan model sesudah dilakukan modifikasi/spesifikasi *Good fit* adalah baik .

Realiabilitas Model

Tabel 1.4 *Realiability, Variance Extracted dan Realiability Model Keseluruhan*

Variabel	Construct Realiability	Varianced Extraced	Kesimpulan Reabilitas
Kepimpinan	0,9 ≥ 0,5	0,4 ≥ 0,30	Baik
Iklm Organisasi	0,9 ≥ 0,5	0,4 ≥ 0,30	Baik
Turnover Intention	0,8 ≥ 0,5	0,6 ≥ 0,30	Baik
Kinerja	0,8 ≥ 0,5	0,4 ≥ 0,30	Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Program LISREL 8.80, 2013

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa nilai *construct realiaby* (CR) berada diatas 0,50 ($\geq 0,50$). Dengan demikian juga untuk *variance extracted* (VE) berada diatas 0,30 ($\geq 0,30$), sehingga dapat disimpulkan bahwa reliabelitas model pengukuran (*Konstruk*) model adalah baik.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis, pada penelitian ini terdapat 5 (lima) Hipotesis seperti yang telah diuraikan pada sebelumnya. Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan stastistic uji t, dan LISREL menetap (*default*) statistic uji t pada tingkat kesalahan (α) 5%, artinya nilai stastistic t kritis yang ditetapkan adalah 1,96. Berikut

adalah nilai hasil estimasi atas hubungan

dikatakan berpengaruh bila t-values $\geq 1,96$.

Tabel 1.5 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Structural Path	T-Values	Keterangan	Kesimpulan
H1	Kepemimpinan berpengaruh terhadap Turnover Intention	-0,08	Data Tidak mendukung hipotesis	Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap Turnover Intention
H2	Iklm Organisasi berpengaruh terhadap Turnover Intention	1,09	Data Tidak mendukung hipotesis	Iklm Organisasi tidak berpengaruh terhadap Turnover Intention
H3	Kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap Kinerja	2,14	Data mendukung hipotesis	Kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap Kinerja
H4	Iklm Organisasi berpengaruh langsung terhadap Kinerja	2,31	Data mendukung hipotesis	Iklm Organisasi berpengaruh langsung terhadap Kinerja
H5	Turnover Intention berpengaruh terhadap Kinerja	0,08	Data Tidak mendukung hipotesis	Turnover Intention tidak berpengaruh terhadap Kinerja

Sumber : Data diolah dengan Program SEM LISREL 8.80, 2013

Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *Turnover Intention* dimana t-valuenya lebih kecil dari t-tabel yakni -0,08, artinya keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan, bukan disebabkan oleh kepemimpinan, akan tetapi ada sebab lain yang menyebabkan karyawan itu meninggalkan perusahaan seperti : adanya kebosanan dalam bekerja, adanya tekanan didalam pekerjaan, dll.

Iklm Organisasi tidak berpengaruh terhadap *Turnover Intention*, dimana t-valuenya kurang dari t-tabel yakni 1,09 artinya iklim organisasi memberikan kontribusi yang kecil terhadap keinginan seorang meninggalkan perusahaan, adanya perlakuan yang berbeda antar divisi dan departemen menyebabkan timbulnya rasa kecewa karyawan didivisi tertentu.

Kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap Kinerja dengan nilai t-value lebih besar dari t-tabel yakni 2,14 artinya Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yg dapat mengarahkan dan memberikan dukungan kebawah, dukungan dan pengarahan yang baik dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja karyawan.

Iklm Organisasi berpengaruh langsung terhadap Kinerja dimana t-value lebih besar dari t-tabel yakni 2,14 artinya, Iklm organisasi yang kondusif dapat mendorong kinerja karyawan lebih baik. Iklm organisasi yang kondusif. (seperti adanya partisipasi karyawan didalam memberikan pemikiran dan masukan ke manajemen, lingkungan kerja yang bersih, adanya acara-acara gathering,dll).

Turnover Intention tidak berpengaruh terhadap Kinerja dimana t-valuenya lebih kecil dari t-tabel yakni 0,08 artinya *Turnover Intention* di lingkungan PT. Musica Studio's tidak mengganggu kinerja karyawan didalam menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan. Banyaknya karyawan yang meninggalkan perusahaan dapat diantisipasi dengan adanya pengambil alihan pekerjaan sementara oleh karyawan lain, sampai karyawan pengganti masuk untuk menggantikan posisi tersebut.

Dari penjelasan di atas, bisa ditarik kesimpulan mengenai model penelitian untuk variabel Kepemimpinan, yaitu bahwa Kepemimpinan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap *Turnover Intention*, ditunjukkan dengan nilai $t < 1,96$ yaitu -0,08. Iklm Organisasi terhadap *Turnover Intention* tidak berpengaruh secara signifikan dimana nilai $t < 1,96$ yaitu 1,09. Kepemimpinan terhadap Kinerja berpengaruh secara signifikan dimana nilai $t > 1,96$ yaitu 2,14. Berbeda dengan variabel Iklm Organisasi terhadap Kinerja menunjukkan pengaruh signifikan, dengan nilai t tertinggi $> 1,96$ yaitu 2,31. Variabel *Turnover Intention* terhadap Kinerja tidak berpengaruh secara signifikan dimana nilai $t < 1,96$ yaitu 0,08

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hanya 2 Hipotesis yang diterima sedangkan 3 hipotesis yang ditolak.

Matriks Korelasi Antar Dimensi

Matriks korelasi antar dimensi dependen dengan independen digunakan untuk hubungan yang paling kuat antar dimensi dari variabel independen dengan dependen, yaitu ditunjukkan oleh nilai korelasi yang terbesar. Matriks-matrik berikut adalah matrik korelasi antara Iklm Organisasi dengan Kinerja dan Kepemimpinan dan Kinerja.

Dimensi variabel Kepemimpinan terhadap dimensi kinerja karyawan berpengaruh . Variabel Kepemimpinan dengan dimensi mewakili sistem sosial dengan variabel Kinerja dengan dimensi efektivitas mempunyai korelasi tertinggi yaitu 0,560. Artinya pemimpin harus dapat mengidentifikasi kepentingan stakeholder saat ini dan masa yang akan datang sehingga ditemukan cara-cara yang paling efektif didalam mencapai keinginan dan tujuan jangka panjang dan jangka pendek organisasi dimana pemimpin harus dapat membuat suatu rencana kerja yang harus melibatkan semua pihak dalam organisasi misalnya dengan membuat target-target kerja dari masing-masing divisi misalnya dengan pembuatan Key Performance Index, SOP, ISO, komputerisasi sistem dilingkungan perusahaan.

Dimensi variabel Iklm Organisasi dengan variabel Kinerja berpengaruh, Variabel Iklm Organisasi dengan dimensi standar terhadap Variabel Kinerja dengan dimensi kualitas mempunyai nilai korelasi tertinggi sebesar 0,398, dengan iklim organisasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pekerjaan, misalnya dengan membuat standar-standar dilingkungan perusahaan misalnya dengan pembuatan K-5 atau acara-acara kebersamaan seperti Family Gathering

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

(1) Pengaruh Kepemimpinan dengan Kinerja berpengaruh, variabel Kepemimpinan dengan dimensi mewakili sistem sosial dengan variabel Kinerja dengan dimensi efektivitas mempunyai korelasi tertinggi yaitu 0,560. Artinya pemimpin harus dapat mengidentifikasi kepentingan stakeholder saat ini dan masa yang akan datang sehingga ditemukan cara-cara yang paling efektif didalam mencapai keinginan dan tujuan jangka panjang dan jangka pendek organisasi dimana pemimpin harus dapat membuat suatu rencana kerja yang harus melibatkan semua pihak dalam organisasi misalnya dengan membuat target-target kerja dari masing-masing divisi misalnya dengan pembuatan Key Performance Index, SOP, ISO. (2) Pengaruh variabel Iklim Organisasi dengan variabel Kinerja berpengaruh, Variabel Iklim Organisasi dengan dimensi standar terhadap Variabel Kinerja dengan dimensi kualitas mempunyai nilai korelasi tertinggi sebesar 0,398, dengan iklim organisasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pekerjaan, misalnya dengan membuat standar-standar dilingkungan perusahaan misalnya dengan pembuatan K-5 atau acara-acara kebersamaan seperti Family Gathering . (3) Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *Turnover Intention* dimana t-valuenya lebih kecil dari t-tabel yakni -0,08, artinya keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan, bukan disebabkan oleh kepemimpinan, akan tetapi ada sebab lain yang menyebabkan karyawan itu meninggalkan perusahaan seperti : adanya kebosanan dalam bekerja, adanya tekanan didalam pekerjaan, dll.

(4) Iklim Organisasi tidak berpengaruh terhadap *Turnover Intention*, dimana t-valuenya kurang dari t-tabel yakni 1,09 artinya iklim organisasi memberikan kontribusi yang kecil terhadap keinginan seorang meninggalkan perusahaan, adanya perlakuan yang berbeda antar divisi dan departemen menyebabkan timbulnya rasa kecewa karyawan didivisi tertentu. (4) *Turnover Intention* tidak berpengaruh terhadap Kinerja dimana t-valuenya lebih kecil dari t-tabel yakni 0,08 artinya *Turnover Intention* di lingkungan PT. Musica Studio's tidak mengganggu kinerja karyawan didalam menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan. Banyaknya karyawan yang meninggalkan perusahaan dapat diantisipasi dengan adanya pengambilalihan pekerjaan sementara oleh karyawan lain, sampai karyawan pengganti masuk untuk menggantikan posisi tersebut.

Saran

(1).Pemimpin harus dapat mengantisipasi keinginan stakeholder dan perkembangan organisasi dimasa yang akan datang bila terjadi perubahan dari regulasi maupun teknologi di industri hiburan dapat dihadapi dengan strategi yang lebih baik misalnya perubahan selera musik yang tadinya Group beralih ke Boyband ataupun penyanyi solo yang lagi trend. Iklim Organisasi yang kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan . Perusahaan harus menciptakan suasana atau lingkungan yang benar-benar diinginkan oleh karyawan caranya pemimpin harus turun kebawah dengan menyapa, atau memahami keadaan karyawan bila mereka menghadapi permasalahan dilingkungan kerja, pertemuan-pertemuan rutin antar karyawan perlu dilakukan untuk membuat kesan bahwa pemimpin care dengan bawahannya. Untuk mengurangi *Turnover Intention* di perusahaan harus merubah kepemimpinan dan menciptakan iklim yang kondusif dilingkungan perusahaan.

Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mau mendengarkan dan menerima masukan dari seluruh staff didalam organisasinya caranya dengan memberi ruang untuk menyampaikan pendapat langsung ke pemimpin diatas baik melalui e-mail atau meeting-meeting. Untuk menciptakan iklim organisasi yang kondusif perlu dilakukan dengan membuat acara-acara gathering atau ramah-tamah antara pimpinan dengan bawahan sebagai ajang menyampaikan pendapat. (2) Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan factor-faktor lain penyebab Tingginya *Turnover Intention* di PT. Musica Studio's selain yang telah diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifudin. (2005). "Reabilitas dan Validitas". Edisi 2. Yogyakarta. Pustakan Pelajar
- Bungin, Burhan. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Kencana
- Cameli, Abraham. (2004) " The Relationship Between Work Commitment Models And Employee Withdrawal Intention." Journal Of Business Management (Oktober) pp 63-84
- Dayakisni, Tri & Hudaniah. (2006) " Psikologi Sosial. Malang" . UMM Press.
- Davis, Keith & Newstrom, Jhon. W. (2000). "Perilaku dalam organisasi". Ahli Bahasa Agus Dharma, Edisi Kedua, Jilid-1, Erlangga, Jakarta
- Eko, Yuliana. (2007). "Hubungan antara Iklim Organisasi : Teori Aplikasi dan Penelitian". Jakarta . Salemba Empat.
- Fishbein, Martin & Ajzen, Icek .(1975). "Belief, Attitude, Intention and Behavior' Introduction to theory and Reseach USA" : Addison-Wealey Publishing Company.
- Ghozali, Imam. (2008). "Tinjauan Metode : Structural Equation Modeling dan Penerapannya dalam Pendidikan". Word Wide web : [http :// www.depdiknas.go.id](http://www.depdiknas.go.id)
- Hair, J. F Black, W. C Babin, BJ Anderson, R.E. & Tatham, R.L. (2006) " Multivariate data Analysis"
- Kreitner, R dan Kinicki, Angelo, (2005), " Perilaku Organisasi" Buku 1, Edisi Kelima , Salemba Empat, Jakarta.
- Landy, Frank J & Conte, Jeffrey M. (2004) "Ork in the 21th century : an introduction to industrial and organization psichology". New York, : Mg Graw-Hill Companies-Inc.
- Luvy, Kurniasari. (2004). " Pengaruh Komitmen Organisasi dan Job Insecurity Karyawan Terhadap Intensi Turnover". Skripsi Sarjana tak diterbitkan Universitas Airlangga Surabaya.
- Mowday, Porter & Steers.(1982). "Employee Organization Linkages : The Psychology of Commitment, Absen Teeism and Turnover". New York, Academics Press.
- Mas'ud, Fuad. (2004). " Survey Diagnosis Organisasional ". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Manik, Widanny . (2010). "Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi terhadap semangat kerja PT. Jamsostek (Persero) Kanwil I Medan" .Jurnal Manajemen terbitan Universitas SumateraUtara.
- Newstrom, Jhon W and Keith Davis .(1997). " Organization Behavior". New York. Mac Graw Hill Companies Inc.
- Marcus, Buckingham dan Hoffman, Curt.(1999) "Fist Breaks All The Rulles." Kompas Artikel.
- Newstroom, John W. (1996) . " Perilaku Organisasi, Edisi Ketujuh, Terjemahan Agus Dharma, Penerbit Airlangga.

- Panggabean, Mutiara S. (2004). “Komitmen Organisasi sebagai Mediator Variabel, Bagi Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Keinginan untuk Pindah Kerja”. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 6 No.1 2004 : 90-114.
- Stringer, R. (2002). *Leadership and Organization Climate* “. The Cloud Chamber Effect Uppet Sandle River. NJ Pretice hall.
- Sugiono. (2007). “Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D” .Edisi ke-3. Bandung : CV Alfabeta.
- Suwandi dan Indiantoro,Nur. (2004).” Pengujian Model Turnover Intention pada Akuntan Publik”. *Journal Riset Akuntansi Universitas Gajah Mada*.
- Terry, G.R. (2003).” *Prinsiples Of Management*”. Homewood Illinois.
- Tagiuri, R & Litwin G. (1968). “Organization Climate “ Expectation Of a conceps”. Boston : Harvard University Press.
- Thamrien,Eddy.(2009). “ Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Kepuasan kerja terhadap kinerja Dosen perguruan tinggi ilmu kepolisian (PTIK)”. Tesis (tidak diterbitkan). Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Jakarta.
- Wirawan. (2007). “ Kapita Selekta Teori Kepemimpinan Pengantar untuk praktek dan Penelitian Jilid 1 “. Jakarta Yayasan Bangun Indonesia dan UHAMKA Press.
- Yukl,Gary. (2010). “ Kepemimpinan dalam Organisasi”. Edisi Kelima. Penerbit Indeks. Jakarta.

Penetapan Wayang Golek Cepak Sebagai Brand Image Kota Indramayu

Andriani Prieteedjo
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI
Email: rianiand@yahoo.com

Abstrak

Semua makhluk hidup dan benda mati memiliki identitas, begitu pula dengan kota atau provinsi. Identitas adalah produk atau jasa yang bermanfaat dan memiliki diferensiasi sebagai pembeda produk. Contoh, Sumatera Barat dikenal dengan Jam Gadang, kegiatan Rambu Solo upacara adat kematian masyarakat Toraja dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga memiliki wayang golek cepak sebagai peninggalan budaya masa Sunan Gunung Djati. Selain memiliki bentuk kepala rata atau papak, riasan wajah yang ekspresif serta berpakaian sesuai lakon yang diperankan, wayang golek cepak juga bermanfaat untuk media dakwah dan pendidikan. Masalah yang dihadapi saat ini, wayang golek cepak terancam punah karena belum ada regenerasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemecahan masalah untuk menjaga agar wayang golek cepak tidak punah melalui kegiatan *re-design* dan menetapkannya sebagai *brand image* kabupaten Indramayu. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan menjadikan wayang golek cepak sebagai obyek penelitian

Kata kunci : identitas, wayang golek cepak, diferensiasi, citra merek

Abstract

Every object has an identity, as well as the city or province. Identity criteria of products and services are being useful and have differentiation. For example, Jam Gadang at West Sumatra, Rambu Solo is an activities of ceremonial death of Toraja society. Indramayu, West Java also has a puppet show smacking as a period of cultural relics Sunan Gunung Jati. Besides having the shape of the head, expressive makeup and dress according to the play, played, puppet show smacking is also beneficial for the media propaganda and education. Problems faced today, puppet show smacking endangered because there is no regeneration. This study aims to keep the puppet smacking extinction through re-design and set them as brand image of Indramayu district. The research was conducted using qualitative descriptive and makes the puppet show crew cut as research objects

Keywords: identity, puppet show crew cut, differentiation, brand image

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang



Gambar I.1.1. Peta Lokasi Indramayu

Sumber :
<https://pertanianindramayu.wordpress.com/2013/10/22/peta-wilayah/>

Kabupaten Indramayu yang terletak di propinsi Jawa Barat memiliki batas wilayah :

- a. Utara: Laut Jawa
- b. Selatan: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Cirebon
- c. Barat: Kabupaten Subang
- d. Timur: Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data yang diperoleh dari <http://www.indramayukab.go.id>, Indramayu memiliki luas wilayah sebesar 2.040,11 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.007.795 jiwa. Indramayu merupakan daerah yang datar dan memiliki tanahnya yang subur, sehingga cocok untuk pengembangan padi dan tanaman ekonomis lainnya. Indramayu terkenal sebagai penghasil mangga.

Menurut Tim Panitia Peneliti Sejarah Kabupaten Indramayu, hari jadi Indramayu jatuh pada tanggal 7 Oktober 1527 M (1 Muharam 934 H) yang telah disahkan pada sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah tingkat II Indramayu pada tanggal 24 Juni 1977 dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Indramayu Nomor 02 Tahun 1977 tentang Penetapan Hari Jadi Indramayu.

Dalam menentukan hari jadi tersebut, tim panitia peneliti sejarah Indramayu berpegang pada peninggalan zaman dulu dan atas dasar beberapa fakta sejarah yang ada, yaitu prasasti, penulisan-penulisan masa lalu, benda-benda purbakala atau benda pusaka, legenda rakyat serta tradisi yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan tulisan dalam prasasti Aria Wiralodro, masyarakat Indramayu dikenal sebagai masyarakat yang religius, suka bekerja keras dan bekerja sama dengan siapapun agar daerahnya menjadi makmur serta selalu menjaga kelestarian daerahnya, karena semua adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Prilaku ini yang menjadi filosofi masyarakat Indramayu yang banyak dituangkan dalam beragam kesenian tradisionalnya.

Penduduk Kabupaten Indramayu merupakan campuran antara suku Sunda dan Jawa, sehingga budaya yang tumbuh dan berkembang merupakan akulturasi dari kedua kebudayaan tersebut. Contoh kesenian yang tumbuh dan menjadi budaya di masyarakat Indramayu, antara lain :

1. Nadran. Upacara ini merupakan sebuah cerminan dari sebuah hubungan manusia dengan sang pencipta dengan berupa ungkapan rasa sukur akan hasil tangkapan ikan dan mengharapkan akan meningkatnya hasil di masa mendatang serta dijauhkan dari bencana dan mara bahaya dalam mencari nafkah di laut. Umumnya upacara adat nadran ini diselenggarakan antara bulan Oktober sampai Desember di Pantai Eretan, Dadap, Karangsong, Limbangan, Glayem, Bugel dan Ujung Gebang.

2. Ngarot. Upacara ini sudah ada sejak abad 16 dan sampai sekarang masih di selenggarakan, terutama oleh masyarakat desa di Kecamatan Lelea setiap menjelang penggarapan sawah. Upacara ini dilaksanakan agar mendapatkan hasil pertanian yang melimpah dan upacara adat ini dilaksanakan setiap hari rabu, minggu keempat bulan November dimana pesertanya adalah para muda- mudi dengan kostum yang khas dan aksesoris yang gemerlap.

3. Jaringan. Upacara kaum remaja yang bertujuan untuk mencari pasangan hidup yang dilaksanaka pada malam bulan purnama. Kegiatan ini bertempat di desa parean Kecamatan kandang haur.

4. Ngunjung, yaitu upacara syukuran yang dilaksanakan di kuburan - kuburan yang dianggap keramat biasanya dilaksanakan pada bulan syuro mulud.

5. Mapag Tamba, yaitu upacara yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengusir penyakit, dengan cara membawa air tambak ke dalam bungbung bambu yang berasal dari kasepuhan atau sumber untuk disiramkan ke air yang mengalir ke sawah pada sawah yang berada di batas desa.

6. Mapag Sri, adalah upacara yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada sang pencipta atas tibanya masa panen dengan cara menggelar acara wayang kulit sehari semalam dengan lakon khusus dan biasanya dilaksanakan di balai desa.

7. Sedekah Bumi, adalah upacara yang dilaksanakan oleh petani pada saat akan turun menggarap sawahnya. Biasanya dilakukan pada awal musim hujanyaitusekitar bulan oktober sampai desember. Prosesi upacara ini biasanya dimulai dari berkumpulnya masyarakat disuatu tempat untuk melakukan doa bersama dan setelahnya dilaksanakan

upacara adat.

8. Sintren. Merupakan salah satu kesenian rakyat yang masih tetap hidup dan berkembang di masyarakat pesisir terutama di pantai utara. Selain nuansa magis, kurungan ayam, menjadi daya tarik kesenian sintren ini, serta ada alat musik khas Indramayu berupa buyung, batang bambu dan kendi.

9. Tari topeng Dermanyon. Mimi Rasinah adalah maestro tari topeng berasal dari Indramayu. Tari topeng Dermanyon ini memiliki perbedaan dengan tari topeng daerah lain, gerak tari yang khas berciri topeng spesifik inilah yang memebedakan tari topeng dengan daerah lain.

Tari topeng Dermanyon mengalami perkembangan dalam hal gerakannya, maupun cerita yang ingin disampaikan. Tari topeng bisa dilakukan sendiri dan maupun dilakukan oleh beberapa orang. Gerakan tangan dan tubuh yang gemulai, serta iringan musik yang didominasi oleh kendang dan rebab, merupakan ciri khas lain dari tari topeng.

10. Reog Bleknong. Merupakan seni arak-arakan yang sepanjang perjalanan semua pemain menggunakan kostum tokoh wayang. Kesenian ini biasa untuk pawai khitanan, Hari Besar Nasional, dan Karnaval.

11. Tarling. Merupakan seni musik khas Indramayu lagu yang pada awalnya dilahirkan dalam bentuk nyanyian yang diiringi oleh gitar dan suling. Seiring perkembangan zaman kesenia tarling ini mengalami perubahan yang menggunakan alat musik modern. Tarling berasal dari Indramayu lahirnya kesenian tarling pada aba ke-16.

12. Genjring Umbul. Genjring Umbul merupakan kesenian tradisi Indramayu yang memadukan unsur akrobat dan seni olahraga. Genjring Umbul biasanya ditampilkan pada Hari Besar Nasional, Nadran, Ngunjung, dan Hajat.

13. Tari Randu Kentir. Tari Randu Kentir adalah tari tradisional yang berasal dari masyarakat Desa Jumbleng, Losarang, Indramayu. Tari yang berasal dari kata Randu (pohon randu) dan Kentir (hanyut) ini memiliki kemiripan dengan gerakan orang yang konon pada masa itu hanyut di sungai dan di tolong oleh warga dengan menggunakan ranting pohon randu. Tarian ini merupakan tarian persembahan yang bisa ditampilkan pada saat Mapag Penganten dan pada saat penyambutan tamu.

14. Wayang Kulit. Wayang kulit Indramayu menarik dan menghibur dengan ciri khasnya, yaitu dari sisi penggunaan bahasa setempat dan penuturannya, baik berupa lakon maupun guyonannya. Salah satu fungsi wayang di masyarakat Indramayu adalah ngaruat, yaitu membersihkan dari kecelakaan (marabahaya). Beberapa orang yang diruwat (sukerta), antara lain Wunggal (anak tunggal), Nanggung Bugang (seorang adik yang kakaknya meninggal dunia), Suramba (empat orang putra), Surambi (empat orang putri), Pandawa (lima putra), Pandawi (lima putri), Talaga Tanggal Kausak (seorang putra dihapit putri), dan Samudra Hapit Sindang (seorang putri dihapit dua orang putra), dan sebagainya.

15. Wayang Golek Cepak adalah salah satu jenis kesenian tradisional yang ada di Indramayu dan Cirebon. Golek artinya boneka sedangkan kata cepak diambil dari bentuk kepala atau mahkota wayang yang papak atau rata, sehingga jenis kesenian ini dinamakan wayang golek cepak. Wayang ini diciptakan oleh Sunan Gunung Djati sebagai media dakwah.

Dari semua kesenian yang disebutkan di atas, hanya wayang golek cepak yang tidak mengalami perkembangan dan bahkan terancam punah. Tidak adanya regenerasi pada kesenian wayang golek cepak Indramayu dikhawatirkan akan menuju kepunahan. Hal tersebut perlu dihindari karena selain untuk pelestarian ternyata wayang golek cepak Indramayu memiliki satu tokoh yang dikeramatkan, yaitu tokoh Panji.

Didalam wayang cepak sendiri terdapat beberapa tokoh Panji yang memiliki berbeda karakter. Panji merupakan sosok kesatria yang berwibawa dan penuh kesabaran seperti yang dijelaskan oleh dalang wayang cepak generasi ke lima, Ki Dalang Akhmadi dikutip dari <http://danielmsy.com/ki-akhamadi-dalang-wayang-golek-cepak-khas-indramayu/>

Pada masa lalu kesenian wayang golek cepak menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sejarah daerah tertentu. Alur cerita yang sering dipentaskan merupakan alur sejarah berdirinya suatu daerah.

Seorang peneliti wayang golek cepak, Rofiqoh Djawas mengatakan proses pembuatan wayang golek cepak Panji sangat dikeramatkan agar mendapatkan aura yang mempesona saat dipentaskan. Sangat disayangkan jika wayang golek cepak Indramayu ini punah karena kurang lebih dari 700 karakter lainnya pun memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri.

Ketika wayang golek cepak terus tersingkirkan, konsep penceritaan di panggung tidak sepenuhnya menjadi milik dalang, karena penyewa bebas menentukan cerita dan ki dalang harus siap menyajikannya. Permintaan demi permintaan terus disampaikan penonton, sehingga tokoh-tokoh wayang golek cepak dari Sunan Gunung Jati

hingga para bupati-nya hanya terdiam di atas bantalan batang pisang. Sementara sinden memenuhi permintaan lagu para tamu. Pergeseran keinginan penonton ini diantisipasi kelompok wayang golek cepak dengan menyediakan instrumen modern, semacam drum, sehingga nuansa tradisional menjadi terpinggirkan. Wayang golek cepak memiliki sejarah yang sangat berarti karena selain bisa menceritakan tentang kisah babad Dermayu, wayang golek cepak merupakan sejarah awal pembentukan topeng Indramayu

Perbedaan yang mendasar dari wayang golek cepak adalah menampilkan babak atau cerita mengenai kehidupan raja-raja yang terkenal dalam kehidupannya. Golek artinya boneka sedangkan kata cepak diambil dari bentuk kepala atau mahkota wayang yang papak atau rata. Keunikan bentuk kepala yang menjadikan jenis kesenian ini dinamakan wayang golek cepak. Wayang golek cepak dipercaya diciptakan oleh Sunan Gunung Djati dan digunakan sebagai media dakwah dan sudah berusia 300 tahun



Gambar I.1.2. Wayang Golek Cepak Indramayu
Sumber : <http://sojournerantique.blogspot.com/2012/06/blog-post.html>

Bagi dalang wayang golek cepak seperti Ki Dalang Ahmadi, generasi kelima dan pewaris terakhir kesenian ini belum berhasil menularkannya kepada generasi berikutnya karena terdapat tradisi bagi para dalang wayang golek cepak hanya bisa mewarisi ilmu mendalang kepada anak kandung laki-laki,

sedangkan Ki Ahmad tidak memiliki anak kandung laki-laki, sehingga menjadikannya terputus. Sampai penelitian ini dilakukan oleh Rofiqoh Djawas, dan diseminarkan pada seminar Tradisi tahun 2014, belum ada berita yang menjelaskan perihal kelanjutan wayang golek cepak Indramayu.



Gambar I.1.3. Matthew Isaac Cohen, Professor of International Theatre at Royal Holloway, University of London Sedang Pentas Wayang Golek Cepak SD Negeri I Pekandangan, Indramayu.
Sumber : <http://indonesianperformance.blogspot.com/2012/08/sutajaya-kemit.html>

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut dirancang rumusan masalah, antara lain :

1. Faktor-faktor apa saja yang membuat wayang golek cepak kurang diminati?
2. Apa akar masalah yang menyebabkan wayang golek cepak terancam punah?
3. Bagaimana melakukan regenerasi supaya wayang golek cepak tidak punah?

I.3. Tujuan Penelitian

Ada 3 tujuan penelitian yang ingin diteliti yaitu:

1. Untuk menemukan *akar permasalahan* agar diperoleh beberapa alternatif pemecahan masalah untuk pelestarian wayang golek cepak dengan tidak melanggar tradisi dan budaya.
2. Untuk menemukan *akar permasalahan* agar pelestarian dapat dilanjutkan.
3. Untuk menjadikan wayang golek cepak Indramayu sebagai *brand image* kota Indramayu sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

I.4. Metodologi Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Best, 1982 dalam Sukardi, 2004). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode analisa deskriptif kualitatif dengan objek penelitian wayang golek cepak Indramayu.

Metode pengumpulan dan analisa data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, menghadiri seminar tradisi yang membahas wayang golek cepak Indramayu, data dari media cetak dan internet. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dengan tujuan membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kotler (2005:82), merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan tampilan, manfaat dan jasa tertentu pada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan mutu, tetapi merek lebih dari sekedar simbol.

Definisi merek menurut American Marketing Association dalam buku *The Power of Brand*, Freddy Rangkuti (2002:2) adalah: “nama, istilah, simbol atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut.

Tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing.

II.1. Pengertian Brand Image atau Citra Merek



Gambar II.1.1. Citra Merek (Brand Image)
Sumber : <http://www.kajianpustaka.com/2012/12/citra-merek-brand-image.html>

Terdapat beberapa perbedaan definisi ataupun pandangan mengenai citra merek, dimana perbedaan pandangan ini bergantung pada luas citra dibangun di benak konsumen. Berikut ini adalah beberapa pengertian citra merek dari beberapa sumber:

1. Citra merek adalah seperangkat keyakinan konsumen mengenai merek tertentu (Kotler dan Amstrong, 2001:225).
2. Citra merek adalah kumpulan persepsi tentang sebuah merek yang saling berkaitan yang ada dalam pikiran manusia (Ouwersoot dan Tudorica, 2001)
3. “*Brand image can be defined as a perception about brand as reflected by the brand association held in consumer memory*”. Hal ini berarti citra merek adalah persepsi tentang merek yang digambarkan oleh asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen (Keller, 1998:93).
4. “*Brand association is anything linked in memory to a brand*”. Pengertian ini menunjukkan bahwa asosiasi merek adalah sesuatu yang berhubungan dengan merek dalam ingatan konsumen (Aaker, 1991:109).

Baik Keller dan Aaker mengemukakan bahwa adanya hubungan yang erat antara asosiasi merek dengan citra merek dimana asosiasi yang terjalin pada suatu merek dapat membentuk citra merek. Asosiasi merek dapat membantu proses mengingat kembali informasi yang berkaitan dengan produk, khususnya selama proses pembuatan keputusan untuk melakukan pembelian.

II.2. Faktor-Faktor yang Membentuk Citra Merek

Menurut Keller (1993:3) faktor-faktor yang membentuk citra merek adalah:

1. **Kekuatan asosiasi merek (*strength of brand association*)**
Tergantung pada bagaimana informasi masuk ke dalam ingatan konsumen dan bagaimana informasi tersebut bertahan sebagai bagian dari *brand image*
2. **Keuntungan asosiasi merek (*Favourability of brand association*)**
Kesuksesan sebuah proses pemasaran

sering tergantung pada proses terciptanya asosiasi merek yang menguntungkan, dimana konsumen dapat percaya pada atribut yang diberikan mereka dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

3. Keunikan asosiasi merek (*Uniqueness Of brand association*)

Suatu merek harus memiliki keunggulan bersaing yang menjadi alasan bagi konsumen untuk memilih merek tertentu. Keunikan asosiasi merek dapat berdasarkan atribut produk, fungsi produk atau citra yang dinikmati konsumen.

Menurut Kotler (2001:401) citra harus dibangun melalui seluruh media yang ada serta berkelanjutan dan pesan tersebut dapat disampaikan melalui lambang, media atau visual, suasana, serta acara.

II.3. Teori Fishbone Diagram

Pembuatan diagram sebab akibat ini bertujuan agar dapat memperlihatkan faktor-faktor penyebab (*root cause*) dan karakteristik kualitas yang (*effect*) disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu (<http://thesis.binus.ac.id>).

Umumnya diagram sebab akibat menunjukkan 5 faktor yang disebut sebagai sebab (*cause*) dari suatu akibat (*effect*). Kelima faktor tersebut adalah *man* (manusia, tenaga kerja), *method* (metode), *material* (bahan), *machine* (mesin), dan *environment* (lingkungan).

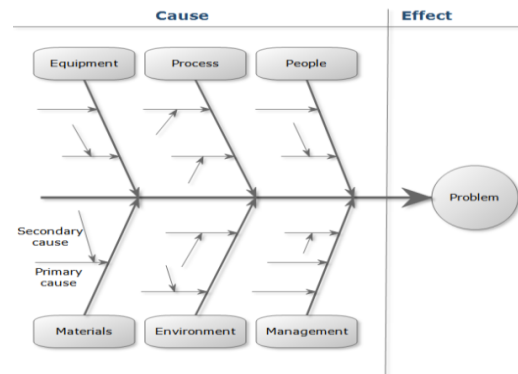
Diagram ini biasanya disusun berdasarkan informasi yang didapatkan dari sumber saran. Menurut Ariani (2003), diagram sebab akibat dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

1. Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah,
2. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah, dan
3. Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta-fakta lebih lanjut.

Langkah-langkah pembuatan diagram sebab akibat:

1. Tentukan masalah atau sesuatu yang akan diamati atau diperbaiki. Gambarkan panah dengan kotak di ujung kanannya dan tulis masalah yang akan diamati atau diperbaiki.
1. Cari faktor utama yang berpengaruh atau mempunyai akibat pada masalah atau sesuatu tersebut. Tuliskan dalam kotak yang telah dibuat di atas dan di bawah panah yang telah dibuat tadi.
2. Cari lebih lanjut faktor-faktor yang lebih rinci (faktor-faktor sekunder) yang berpengaruh atau mempunyai akibat pada faktor utama tersebut. Tulislah faktor-faktor sekunder tersebut di dekat panah yang menghubungkannya dengan penyebab utama.

3. Dari diagram yang sudah lengkap, carilah penyebab utama dengan menganalisa data yang ada.
- Contoh gambar diagram sebab akibat dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



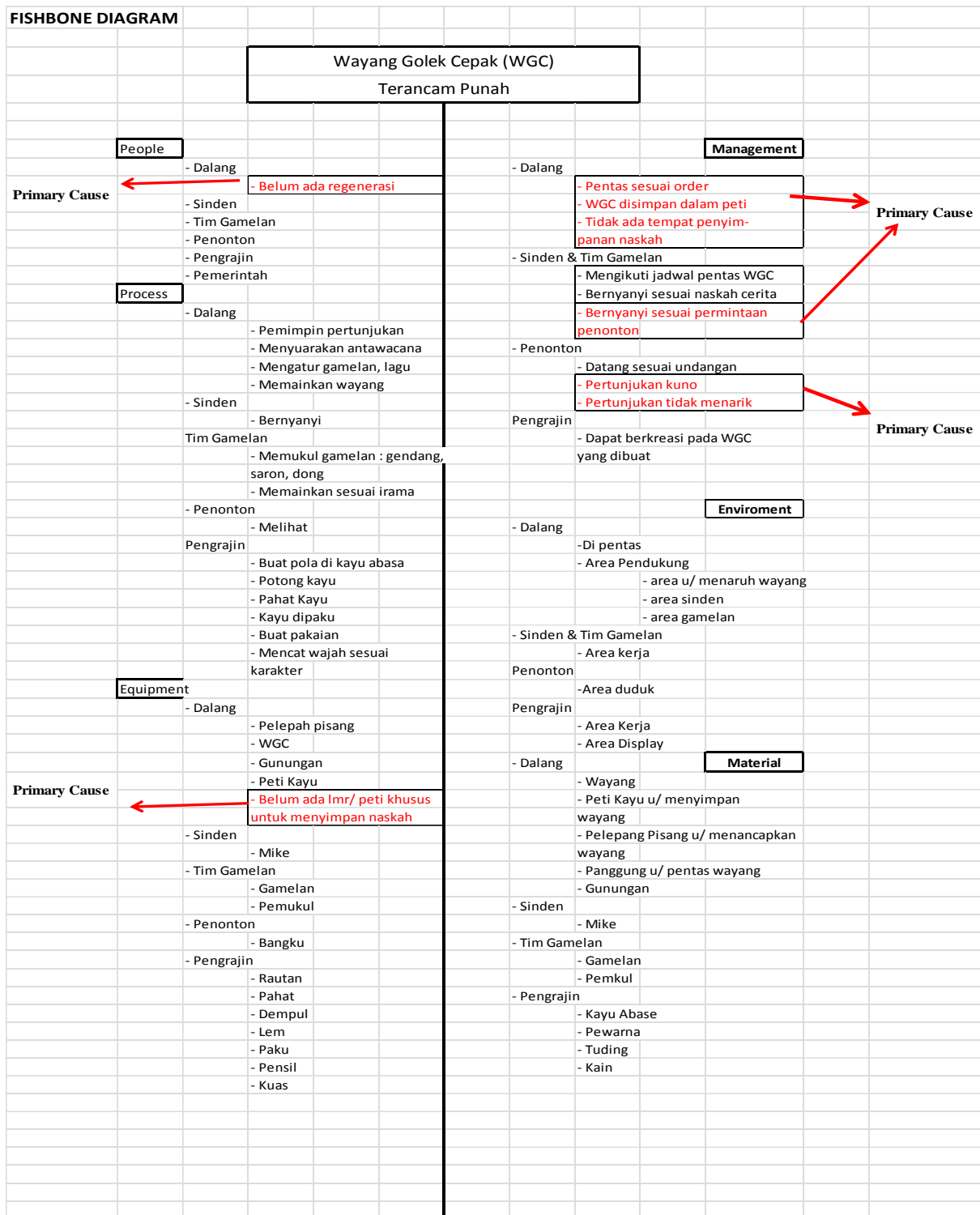
Gambar II.3.1. Diagram Sebab Akibat (Roof of Causes)

Sumber :

<https://sutrisnoadityo.wordpress.com/2013/10/12/diagram-sebab-akibat-fishbone-diagram/>

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan *fish bone diagram*, seperti yang sudah dijelaskan dalam Tinjauan Pustaka. Berdasarkan data literatur yang diperoleh, kemudian dilakukan pengelompokan masalah, antara lain :



Gambar III.1. Fishbone Diagram Wayang Golek Cepak Indramayu

Berdasarkan penguraian masalah pada masing-masing aspek, ditemukan bahwa permasalahan

ada pada aspek :

1. People/Manusia

a. Dalam People/Manusia terdapat 6 unsur yang mendukung keberlangsungan pelestarian kesenian ini, yaitu

- 1) Dalang sebagai pemeran utama keberlangsungan kesenian ini, karena dalanglah yang mengetahui macam tokoh berikut karakter yang akan dipentaskan berdasarkan naskah kuno atau naskah asli yang dimilikinya dan hanya dalang yang sebagai pewarislah yang memiliki naskah kuno berikut wayang golek cepak asli, yaitu Ki Dalang Ahmadi.
- 2) Sangat disayangkan, Ki Dalang Ahmadi belum mewariskan kemampuan mendalang karena secara tradisi harus diwariskan kepada anak kandung laki-laki dan Ki Dalang Ahmadi tidak memilikinya.
- 3) Selain Ki Dalang Ahmadi, terdapat juga dalang wayang golek cepak Indramayu yang terkenal, adalah Ki Warshad Darya, yang tidak memiliki leluhur dalang. Ki Warshad Darya menyukai kesenian wayang golek cepak, sehingga rutin menonton pertunjukannya dan belajar secara otodidak cara medalang. Ki Warshad Darya tidak memiliki naskah kuno dan wayang golek cepak asli, tetapi saat ini memiliki Sangar Warsad dan menguasai lebih dari 100 kisah wayang.

b. Unsur lain dari keberlangsungan kesenian wayang golek cepak adalah penonton, sinden dan tim musik sebagai pengiring dalang, pengrajin wayang golek cepak dan Pemerintah. Kesemuanya adalah

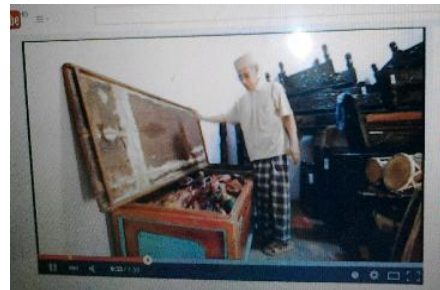
akan tertarik menonton pertunjukan jika kemasannya menarik, sehingga dapat dibuat sebuah *circyle* keberlangsung kesenian wayang golek cepak Indramayu.



Gambar III.2. Siklus Kelestarian Kesenian Wayang Golek Cepak Indramayu

2. Equipment/Peralatan

Permasalahan utama pada equipment dan management, sama yaitu tidak memiliki peti khusus untuk menyimpan naskah kuno untuk pementasan wayang golek cepak, sehingga naskah tersebut tercecer dan tidak bisa didokumentasikan.



Gambar III..... Ki Ahmad memperlihatkan koleksi wayang golek Cepak Miliknya yang tersimpan di Dalam Peti
Sumber : liputan 6.com

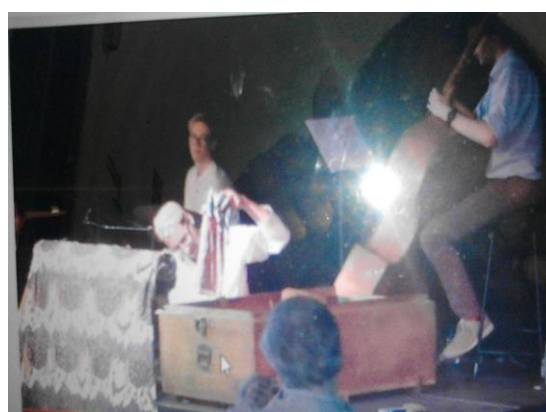


Gambar III..... Ki Ahmad memperlihatkan koleksi naskah kuno wayang golek Cepak Miliknya
Sumber : <http://akumassa.org/kontribusi/indra...g-golek-cepak/>, Iskandar Abeng | Pada Senin, 5 April 2010, Ki Dalang Akhamadi, Dalang Wayang Golek Cepak

3. Management

- a. Sampai saat ini, order untuk pementasan wayang golek cepak berdasarkan undangan dari pemesan, sehingga kemampuan mendalang sangat dibutuhkan agar penonton tetap bertahan menonton pertunjukan sampai selesai.
- b. Kemampuan dalang untuk berimprovisasi sangat dibutuhkan, seperti yang dilakukan Ki Warshad Darya yang sudah 36 tahun mendalang.
- c. Saat ini, Ki Warshad Darya harus melengkapi kelompok wayangnya dengan instrumen modern lain apabila ingin bertahan. Akibatnya kesan tradisional kurang terasa saat menonton wayang golek cepak, ditambah lagi sering kali ada permintaan dari penonton kepada sinden untuk menyanyikan lagu-lagu yang sedang terkenal diiringi alat musik modern.
- d. Dikutip dari <http://news.liputan6.com/read/54601/warsad-darya-seniman-wayang-cepak-dari-indramay>, "...wayang cepak tersingkir karena bersaing oleh kesenian lain, seperti sandiwara. "Kalo golek cepak ini ceritanya kan dongeng legenda, sejarah Jawa, yang dimainkan seorang dalang. Kalo sandiwara main sendiri-sendiri. Jadi saya ketinggalan. Padahal waktu tahun 70-an paling sedikit empat desa saya tampil."
- e. Melakukan improvisasi pada pementasan wayang golek cepak juga dilakukan

oleh Matthew Isaac Cohen, Professor of International Theatre at Royal Holloway, University of London, yang meneliti wayang golek cepak Indramayu dan mementaskan hasil penelitiannya di Gamelanathon 2013 at Southbank Centre on 6-7 July 2013. Celebrating 25 years of gamelan (Indonesian percussion orchestra) at Southbank Centre, London UK).



Gambar III.....Pementasan Wayang Golek Cepak Indramayu oleh Matthew Isaac Cohen di Gamelanathon 2013

Sumber : liputan 6.com

Analisa faktor-faktor pembentuk citra merek menurut Keller (1993:3), dan diperoleh hasil pembahasan seperti tabel di bawah ini :

Faktor-Faktor yang Membentuk Citra Merek	Wayang Golek Cepak Indramayu
Strength of brand association	Berhidung mancung, bibir dicat merah dan masing-masing tokoh memiliki lukisan ekspresi wajah yang berbeda-beda
Favourability of brand association	Digunakan sebagai media bakwah, pendidikan
Uniqueness Of brand association	- Memiliki kepala rata - Berwujud tiga dimensi - Berpakaian lengkap - Ada beberapa yang memakai penutup kepala, aksesoris pelengkap pakaian

Berdasarkan penjabaran dari faktor-faktor pembentuk citra merek diketahui ada satu ciri khas wayang golek cepak yg tidak dimiliki wayang golek lainnya adalah berkepala datar atau rata atau papak, sehingga wayang golek ini juga sering disebut wayang golek papak. Keunikan bentuknya mampu menjadi *brand image* untuk kota Indramayu.

IV. KESIMPULAN

1. **Implikasi Manajerial**
2. Berdasarkan analisa faktor-faktor pembentuk citra merek menurut Keller, sudah terpenuhi semua faktor-faktor tersebut.
3. Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh implikasi manajerial yang harus dilakukan untuk kelestarian wayang golek cepak

1. Indramayu, antara lain :
 - a. *Re-design* kemasan pertunjukan wayang golek cepak Indramayu tanpa mengurangi maksud dan tujuan pementasan wayang tersebut
 - b. *Re-design* kemasan pertunjukan wayang golek cepak Indramayu tidak boleh merubah perannya dalam menyampaikan pesan moral kepada masyarakat.
 - c. *Re-design* kemasan pertunjukan wayang golek cepak Indramayu bertujuan untuk menarik minat konsumen penyewa, wisatawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan pelaku industri wayang golek cepak.
 - d. Bertambahnya minat konsumen menonton pertunjukan wayang golek cepak Indramayu dan meningkatnya pendapatan pelaku industri wayang golek cepak akan menarik minat generasi muda untuk belajar kesenian wayang golek cepak, cara memproduksinya serta mempelajari filosofi dan ritual-ritual untuk memproduksi wayang golek cepak Panji.

Keterbatasan Penelitian

Disadari penelitian ini belum sempurna, karena Peneliti memiliki keterbatasan dalam waktu penelitian, sehingga tidak melakukan pengumpulan data primer seperti wawancara ataupun menjadi *active participant*.

Saran untuk Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian ini masih sangat mungkin untuk dilanjutkan dan dikembangkan dengan melihat tinjauan dari beberapa aspek, misalnya

1. dari aspek ekonomi mikro, manajemen mutu yang meneliti pengrajin wayang golek cepak Indramayu,
2. dari aspek pemasaran, manajemen strategi, misalnya meneliti promosi wayang golek cepak Indramayu
3. dari aspek seni dan budaya, misalnya meneliti tentang filosofi wayang golek cepak Indramayu.

Dan dimungkinkan juga dari aspek kajian lainnya yang bertujuan untuk melestarikan wayang golek cepak Indramayu.

DAFTAR PUSTAKA

Aaker, David, 1991, *Managing Brand Equity; Capitalizing on the Value of Brand Name*, Free Press, New York.

Doyle, Peter. 1998. *Marketing management (4th ed.)*. New York: Mc Graw Hill

Keller, Kevin Lane. 1998, *Strategic Brand Management : Building, Measuring, and Managing Brand Equity*, Prentice Hall, New Jersey.

Keller, L. 1993. *How to manage brand equity*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Kotler, Phillip dan Gary Amstrong. 2001. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, jilid 2, edisi ke-8, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Ouwersloot, Hans and Tudorica Anamaria, 2001, *Brand Personality Creation through Advertising*” dalam Maxx Working Paper 2001-01, February 2nd 2001

<http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=375&lang=id>,
Wayang Kulit Indramayu, Kabupaten Indramayu

<http://khasindramayu.blogspot.com/2008/02/makna-lambang-daerah-indramayu.html>

<http://news.liputan6.com/read/54601/warsad-darya-seniman-wayang-cepak-dari-indramayu>

<https://www.facebook.com/notes/wayang-nusantara-indonesian-shadow-puppets/ki-akhamadi-dalang-wayang-golek-cepak-indramayu-jawa-barat-/10150694104981110>

<http://video.tempo.co/read/2014/12/05/2401/Panji-Tokoh-Keramat-Dalam-Wayang-Cepak-Indramayu>

<http://www.fourseasonnews.com/2014/01/pengertian-merek-brand-menurut-para-ahli.html>

Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta Yang Memiliki Program Studi Akuntansi Dengan Akreditasi “A” di Wilayah Jakarta Barat

Agustini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

Email: agustini1608@yahoo.co.id

Abstract

Selection of private university is one of the major the problem for the students who continuing their study to the higher education institution. There are many factors that influence them, among other things are total expenses, campus quality, the lecture, university graduates, advice from family, friends, and/or teacher, accessibility and job prospect. This research aim to help the students to select the university which have accounting faculty and “A” accreditation in West Jakarta. The analysis method using AHP (Analytical Hierarchy Process) which can help to decide the priority from many criteria. The data was examined using expert choice 2000. The result are the highest criteria is having a professional capability, the highest sub criteria is job prospect and the highest alternative is Bina Nusantara University.

Key words : Private University, AHP, Expert Choice 2000

Abstrak

Pemilihan PTS merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para siswa yang ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya karena adanya faktor biaya, kualitas kampus, kualitas dosen, kualitas alumni, rekomendasi (keluarga, teman dan guru), aksesibilitas dan prospek kerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian ini untuk membantu siswa khususnya siswa kelas III Sekolah Menengah Atas agar dapat menentukan pilihan melanjutkan studi ke jenjang Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Program Studi Akuntansi dengan akreditasi “A” di wilayah Jakarta Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah AHP (*Analytical Hierarchy Process*) yang merupakan sistem yang dapat membantu dalam menentukan prioritas dari beberapa kriteria dengan melakukan analisa perbandingan dari masing-masing kriteria. Pengolahan data didukung dengan aplikasi *expert choice 2000*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari kelima kriteria yang disajikan, kriteria tertinggi yaitu ingin memiliki kemampuan profesional. Sub kriteria tertinggi adalah prospek kerja. Alternatif tertinggi adalah Universitas Bina Nusantara.

Kata Kunci: Perguruan Tinggi Swasta, AHP , *Expert Choice 2000*

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dampak krisis ekonomi global yang dimulai tahun 1998 masih sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia (Gie: 2008, Putri:2009, Rai: 2011). Laporan pertumbuhan ekonomi belum menjangkau sektor riil (Priyanto:2010, Musa: 2014). Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah masih tingginya angka tingkat pengangguran, baik karena terjadinya pemutusan hubungan kerja di dalam negeri, pemulangan tenaga kerja yang hubungan kerjanya diputus di luar negeri, maupun karena munculnya angkatan kerja baru yang tidak dapat ditampung oleh kesempatan kerja yang tersedia, karena tidak adanya investasi baru yang menyerap tenaga mereka, (Lestari: 2013).

Kenaikan angka pengangguran terbuka yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai sekitar 6.25% atau sebanyak 7.39 juta per Agustus 2013 atau naik sebesar 150.000 penganggur dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 7.24 juta pengangguran. Dari angka pengangguran tersebut yang menarik dicermati adalah dari sisi pendidikan penganggur. Berdasarkan data BPS dari 7.39 juta pengangguran sekitar 26.06% atau sebanyak 2.000.000 orang berstatus tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), disusul alumnus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan presentase 17.05% dari total angka pengangguran. Selanjutnya, tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar 22.76% , Diploma III mencapai 2.53% dan Universitas sekitar 5.5%. Adapun untuk lulusan SD tercatat sekitar 18,12%. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendidikan tidak menunjukkan relevansi semakin mudah mendapatkan pekerjaan di negeri ini. (Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas):2013).

Namun, kondisi itu ternyata tidak

menyurutkan minat para lulusan SLTA untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, yakni Perguruan Tinggi. Hanya mereka mulai lebih selektif dalam memilih Perguruan Tinggi. Pada kenyataannya, menentukan pilihan memiliki banyak dimensi dan dampak. Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan masalah sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Dampak penetapan pilihan akan membawa pengaruh jangka pendek/panjang, baik berupa keuntungan yang diperoleh maupun resiko yang ditanggung (Mahmudi: 2006).

Pertumbuhan Perguruan Tinggi membuat para calon mahasiswa memiliki banyak calon alternatif dalam memilih sebuah Perguruan Tinggi. Dari data yang ada menunjukkan jumlah calon mahasiswa dari tahun ke tahun yang mendaftar ke PTS sebarannya menjadi sangat timpang antara satu Perguruan Tinggi Swasta tertentu dengan Perguruan Tinggi Swasta lainnya walaupun dengan karakteristik PTS yang relatif sama misalnya program studi yang dikelola, sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain gedung perkuliahan yang permanen, laboratorium, serta biaya pendidikan dan lain sebagainya. Ada Perguruan Tinggi Swasta tertentu yang sangat diminati, di lain pihak ada pula yang kurang diminati. (Sawaji:2011)

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut di atas dimana terjadi disparitas yang cukup signifikan antara satu PTS dengan PTS yang lainnya, dan kurangnya peminat terhadap Perguruan Tinggi Swasta tertentu menjadi sangat menarik untuk menjadi bahan kajian penelitian untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan mahasiswa dalam memilih Perguruan Tinggi Swasta tertentu.

I.2 Rumusan Masalah

Memilih Perguruan Tinggi merupakan keputusan yang akan berdampak pada masa depan calon mahasiswa sehingga tentunya mereka mempunyai pertimbangan-pertimbangan atau penilaian mengenai Perguruan Tinggi yang akan dipilih. Informasi suatu Perguruan Tinggi diperoleh oleh calon mahasiswa dari berbagai sumber seperti dari media massa atau media sosial, orang tua, keluarga, alumni, guru sekolah, mahasiswa yang masih aktif kuliah dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut didapatkan tiga rumusan masalah yang nantinya akan dilanjutkan untuk diteliti, antara lain:

1. Variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi calon mahasiswa untuk mendaftar di Perguruan Tinggi Swasta (Universitas) yang memiliki Program Studi Akuntansi dengan akreditasi "A" di wilayah Jakarta Barat?
2. Dari beberapa variabel tersebut, variabel manakah yang mempunyai peranan paling penting dipertimbangkan oleh calon mahasiswa dalam memilih Perguruan Tinggi Swasta (Universitas) yang memiliki Program Studi Akuntansi dengan akreditasi "A" di wilayah Jakarta Barat?
3. Bagaimana urutan atau ranking dari seluruh variabel yang digunakan oleh calon mahasiswa dalam memilih Perguruan Tinggi Swasta (Universitas) yang memiliki Program Studi Akuntansi dengan akreditasi "A" di wilayah Jakarta Barat?

II. Tinjauan Pustaka

II.1 Konsep Pemasaran dalam Jasa Pendidikan

Beberapa tahap perkembangan konsep pemasaran yang digunakan oleh para perusahaan dalam menghadapi persaingan yang dihubungkan dengan jasa pendidikan tinggi:

1. Konsep Produksi (*Production Concept*)

Konsep produksi percaya bahwa pelanggan akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau. Jika hal ini diterapkan dalam jasa pendidikan, bukan berarti institusi pendidikan menghasilkan lulusan secara massal dengan mengabaikan mutu. Konsep produksi dalam jasa pendidikan harus tetap memegang teguh peningkatan mutu lulusannya dengan memenuhi Standar Kompetensi Lulusan. Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa "Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan".

2. Konsep Produk (*Product Concept*)

Konsep ini mengatakan bahwa pelanggan akan menyukai produk yang mempunyai mutu terbaik, kinerja terbaik, dan sifat paling inovatif. Jika diterapkan dalam lembaga pendidikan tinggi maka pimpinan lembaga tidak boleh berbuat sekehendaknya, walaupun dalam rangka ingin meningkatkan mutu. Pimpinan harus memonitor apa keluhan para mahasiswa, dosen, tenaga administrasi dan sebagainya.

3. Konsep Penjualan (*Selling Concept*)

Di sini pelanggan tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah cukup kecuali diadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. Jika hal ini diterapkan dalam lembaga pendidikan tinggi maka ada kecenderungan lembaga menggunakan surat kabar, website dan media sosial untuk memasang iklan.

4. Konsep Pemasaran (*Marketing Concept*)

Pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar

sasaran dan penyampaian kepuasan yang didambakan itu lebih efektif dan efisien ketimbang pesaing. Lembaga pendidikan tinggi yang menganut konsep ini, tahu persis apa yang harus dilakukan. Lembaga bukan hanya sekedar mengajar mahasiswa setiap hari sesuai jadwal kemudian melaksanakan ujian dan lulus, tapi harus lebih jauh dari itu. Mahasiswa harus merasa puas dengan layanan lembaga dalam banyak hal, misalnya suasana belajar mengajar, ruang kelas yang bersih, dosen-dosen yang ramah, perpustakaan yang lengkap dan sebagainya.

5. Konsep Kemasyarakatan (*Societal Marketing Concept*)

Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab pada masyarakat terhadap segala perilaku bisnisnya. Demikian juga lembaga perguruan tinggi harus bertanggung jawab terhadap masyarakat luas, mulai dari mutu lulusan yang dihasilkan jangan sampai lulusan yang dihasilkan membawa efek negatif di masyarakat.

Apabila sebuah Perguruan Tinggi sudah berniat untuk melaksanakan pemasaran jasa yang berorientasi ke konsumen (mahasiswa), maka seluruh personil staf, baik dosen maupun tenaga administrasi harus menghayati apa misi mereka. Dengan pendekatan pemasaran memaksa Dosen dan personil yang terlibat dalam Perguruan Tinggi untuk menganalisa intra dan ekstra kurikuler, fasilitas pendidikan, suasana belajar mengajar dan sebagainya, sehingga kegiatan mereka selalu terpusat kepada perbaikan mutu pelayanan.

II.2 Peranan Elemen Bauran Pemasaran dalam Institusi Pendidikan

Elemen-elemen strategi bauran pemasaran ini terdiri atas (Alma:2009):

1. *Product*

Produk ini merupakan hal yang paling mendasar (*the most crucial determinant*) yang akan menjadi pertimbangan preferensi bagi calon. Bauran produk dalam strategi ini dapat berupa diferensiasi produk akan memberikan dampak terhadap kesempatan lapangan kerja dan menimbulkan citra terhadap nama universitas, dan terhadap mutu produk itu sendiri. Misalnya jurusan apa yang tersedia pada satu universitas, ada jurusan favorit dan ada yang tidak. Demikian pula *performance* dari lulusan jurusan tertentu pada universitas tersebut, turut mempengaruhi pilihan calon.

2. *Price*

Elemen ini berjalan sejajar dengan mutu produk. Apabila mutu produk baik maka calon mahasiswa berani membayar lebih tinggi. Bila SPP dinaikkan maka minat mahasiswa untuk masuk perguruan tinggi tidak akan berkurang sepanjang SPP tersebut masih dirasa dalam batas keterjangkauan mahasiswa. Akan tetapi ada perguruan tinggi yang menetapkan SPP tinggi sekali, peminatnya tetap banyak. Ini disebabkan karena situasi kelangkaan penyediaan jasa pendidikan yang bermutu (sekurang-kurangnya persepsi konsumen), melihat siapa dibelakang pengelola jasa pendidikan tersebut.

3. *Place*

Pada umumnya para pimpinan PTS sependapat bahwa lokasi, letak PTS yang mudah dicapai kendaraan umum, cukup berperan sebagai bahan pertimbangan calon mahasiswa untuk memasuki PTS. Demikian pula para mahasiswa menyatakan bahwa lokasi suatu PTS turut menentukan pilihan mereka.

4. *Promotion*

Elemen promosi berlebihan mempunyai hubungan korelatif negative terhadap daya tarik peminat, dan ternyata PTS kuat melaksanakan promosi lebih rendah daripada PTS lemah.

5. *Physical Evidence*

Adalah berupa tampilan bangunan, laboratorium, lapangan olahraga, pertamanan dan sebagainya.

6. *People*

Dapat berupa perilaku unsur pimpinan PTS, tercermin pada siapakan yang memimpin. Dengan demikian strategi memilih siapa pimpinan yang akan diangkat, tidak diragukan lagi peranannya dalam mengangkat citra PTS. Figur seorang pimpinan universitas dapat membawa perkembangan pesat bagi universitas tersebut, dan dapat pula seorang pimpinan menjatuhkan nama baik lembaga. Demikian pula unsur *people* lainnya, berupa dosen beserta seluruh jajaran karyawan yang melayani mahasiswa.

7. *Process*

Yaitu bagaimana proses yang dialami mahasiswa selama dalam pendidikan, misalnya proses belajar, proses bimbingan skripsi, proses ujian, proses wisuda dan sebagainya.

II.3 Penelitian Terdahulu

1. Petruzzelis dan Romanazzi (2010) melakukan penelitian dengan judul “*Educational Value: How Student Choose University* “. Studi ini menyarankan bahwa sebuah perguruan tinggi dapat melakukan strategi untuk mencapai loyalitas pelanggan pada pelayanan mereka, atau fokus dengan menunjukkan cara bahwa layanan yang disediakan telah membantu mahasiswa mereka untuk mencapai tujuan.

2. Kusumawati (2011) melakukan penelitian dengan judul “*Understanding Student Choice Criteria for Selecting an Indonesian Public University: A Conjoint Analysis Approach*”. Kajian penelitian ini meliputi *total expenses, reputation, proximity, job prospect, advice from family and/or friends and teacher, campus atmosphere*. Survey dilakukan di 625 SMU sederajat pada 4 propinsi di Pulau Jawa dengan menggunakan teknik *conjoint analysis*. Hasil penelitian ditemukan bahwa dari beberapa atribut yang diteliti *advice from family and/or friends and teacher* memiliki pengaruh yang paling kuat dan berikutnya adalah pengaruh, *reputation, job prospect, total expenses, campus atmosphere and proximity*.

3. Sawaji, dkk (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengambilan Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Perguruan Tinggi Swasta di Sulawesi Selatan”. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan struktural atau *Structural Equation Modeling (SEM)* untuk mengetahui hubungan kausal antar variabel laten yang terdapat dalam persamaan struktural. Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini maka dapat dikemukakan temuan yaitu biaya pendidikan relatif bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta yang harus dipenuhi ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor-faktor internal (faktor psikologis) seperti citra perguruan tinggi swasta, motivasi, sikap, serta pengambilan keputusan. Dalam pengukurannya biaya pendidikan relatif di tingkat perguruan tinggi swasta ini disikapi sebagai persepsi terhadap kualitas pendidikan yang diterima. Oleh karena itu ketika para calon mahasiswa mencari perguruan tinggi swasta tertentu yang berkualitas maka salah satu rujukan yang digunakan adalah biaya pendidikan. Oleh karena itu temuan

dalam penelitian ini sedikit berbeda dengan teori harga dalam teori permintaan yang memiliki hubungan yang negatif antara harga dengan jumlah permintaan.

4. Fitriyani (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Aplikasi AHP sebagai Model Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tempat Kuliah di Bangka Belitung”. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purpose sampling*. Dari hasil penelitian dengan menggunakan software *Expert Choice 2000* dapat disimpulkan bahwa Universitas Bangka Belitung dan Polman Timah menjadi solusi terbaik dari kelima alternatif kampus di Bangka Belitung. Dari kelima kriteria yang disajikan, kriteria tertinggi yaitu kualitas kampus. Dari kriteria kualitas dosen, subkriteria tertinggi yaitu kemampuan. Dari kriteria biaya, subkriteria tertinggi yaitu sks. Dari kriteria kualitas kampus, subkriteria tertinggi adalah akreditasi.

II.4 Research Gap

Research Gaps merupakan celah-celah atau senjang penelitian yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan pengalaman atau temuan peneliti-peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini penulis menemukan celah-celah penelitian (*research gaps*) sebagai berikut:

II.4.1 Contextual Gaps

Bahwa penelitian ini khusus membahas Perguruan Tinggi Swasta (Universitas) yang ada di wilayah Jakarta Barat, pada Program Studi Akuntansi yang memiliki akreditasi “A”.

1. Banyak penelitian yang menggunakan Perguruan Tinggi sebagai objek penelitian (Fitriyani: 2012, Kusumawati: 2011, Sawaji, dkk : 2011) dan Petruzzelis dan Romanazzi: 2010), tetapi belum ada yang meneliti Perguruan Tinggi di

wilayah Jakarta Barat. Oleh karena itu, penelitian ini mengkhususkan Perguruan Tinggi Swasta (Universitas) yang berlokasi di wilayah Jakarta Barat dalam rangka untuk mengisi/ menutupi celah (*research gap*) dalam penelitian selanjutnya.

2. Banyak penelitian yang menggunakan Perguruan Tinggi sebagai objek penelitian (Fitriyani: 2012, Kusumawati: 2011, Sawaji, dkk : 2011) dan Petruzzelis dan Romanazzi: 2010), dan masih sedikit yang mengkhususkan kepada Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Program Studi Akuntansi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkhususkan Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Akuntansi dalam rangka untuk mengisi celah (*research gap*) dalam penelitian selanjutnya.

3. Banyak penelitian yang menggunakan Perguruan Tinggi sebagai objek penelitian (Fitriyani: 2012, Kusumawati: 2011, Sawaji, dkk : 2011 dan Petruzzelis dan Romanazzi: 2010), tetapi sangat sedikit penelitian yang meneliti Perguruan Tinggi Swasta menggunakan variabel akreditasi sebagai salah satu kriteria preferensi (Fitriyani : 2012). Oleh karena itu, penelitian ini mengkhususkan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Program Studi Akuntansi dengan akreditasi “A” dalam rangka untuk mengisi celah (*research gap*) dalam penelitian selanjutnya.

Dengan dilakukannya penelitian ini maka celah penelitian (*research gaps*) yang ada pada penelitian sebelumnya, khususnya mengenai konteks Perguruan Tinggi di wilayah Jakarta Barat akan tertutupi/ terisi (*filled the gaps*). Kemudian juga dengan dilaksanakannya penelitian ini maka celah penelitian (*research gaps*) yang ada pada penelitian sebelumnya mengenai Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Program

Studi Akuntansi dengan akreditasi “A” telah tertutupi/ terisi (*filled the gaps*).

II.4.2 Conceptual Gaps

Pada penelitian terdahulu, variabel-variabel kriteria yang digunakan adalah kualitas dosen, biaya, kualitas kampus, kualitas alumni dan lokasi (Fitriyani:2012). Penelitian lain menggunakan atribut-atribut antara lain rekomendasi (*advice from family and/or friends and teacher*), reputasi (*reputation*), prospek kerja (*job prospect*), biaya total (*total expenses*), atmosfer kampus (*campus atmosphere*) dan aksesibilitas (*proximity*) (Kusumawati : 2011), tetapi belum ada yang meneliti dengan menggunakan variabel-variabel yang merupakan kombinasi antara variabel-variabel yang digunakan oleh Fitriyani (2012) dan Kusumawati (2011).

1. Variabel sub kriteria biaya, kualitas dosen dan kualitas alumni diadopsi dari penelitian Fitriyani (2012).
2. Variabel sub kriteria rekomendasi dan prospek kerja diadopsi dari penelitian Kusumawati (2011).
3. Variabel sub kriteria aksesibilitas dan kualitas kampus diadaptasi dari penelitian Fitriyani (2012) dan Kusumawati (2011). Penulis mengurangi variabel sub kriteria “akreditasi” dan “jurusan” pada kriteria “kualitas kampus” dari penelitian Fitriyani (2012) karena penelitian ini mengkhususkan untuk Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Program Studi Akuntansi dengan akreditasi “A”.

III. Metodologi Penelitian

III.1 Populasi dan Sampel

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengetahui dan menetapkan populasinya, yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono : 2013)

Adapun populasi dari penelitian ini adalah calon mahasiswa khususnya siswa kelas III Sekolah Menengah (Fitriyani: 2012), orang tua calon mahasiswa dan perwakilan dari Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah III.

Pada penerapan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) yang diutamakan adalah kualitas data dari responden, dan tidak tergantung pada kuantitasnya (Saaty:1993). Oleh karena itu, penilaian AHP memerlukan pakar sebagai responden dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan alternatif. Untuk jumlah responden dalam metode AHP tidak memiliki perumusan tertentu, namun hanya ada batas minimum yaitu dua orang responden (Saaty:1993).

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu teknik menentukan sampel yang diambil sesuai maksud dan tujuan tertentu (Sugiyono: 2013). Data diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa data tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Jumlah sampel yang terpilih ada 5 (lima) orang yaitu calon mahasiswa khususnya siswa kelas III Sekolah Menengah (Fitriyani: 2012), orang tua calon mahasiswa dan perwakilan dari Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah III.

III.2 Teknik Analisis Data

Analisis merupakan tindakan mengolah data hingga menjadi informasi yang bermanfaat dalam menjawab masalah riset. Pemilihan metode analisis ini harus sesuai dengan jenis riset yang dijalankan (Istijanto:2009). Kegiatan yang penting dalam keseluruhan proses penelitian adalah pengolahan data. Dengan pengolahan data maka dapat diketahui dari data yang berhasil dikumpulkan. Oleh karena itu, hasil penelitian pun akan segera diketahui. Pengolahan data ini adalah menggunakan metode analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*).

III.2.1 Pengertian AHP (*Analytical Hierarchy Process*)

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Prof. Thomas Lorie Saaty dari *Wharton Business School* di awal tahun 1970, yang digunakan untuk mencari ranking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif dalam pemecahan suatu permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang senantiasa dihadapkan untuk melakukan pilihan dari berbagai alternatif. Disini diperlukan penentuan prioritas dan uji konsistensi terhadap pilihan-pilihan yang telah dilakukan. Dalam situasi yang kompleks, pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja melainkan multifaktor dan mencakup berbagai jenjang maupun kepentingan.

Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis (Saaty: 1993).

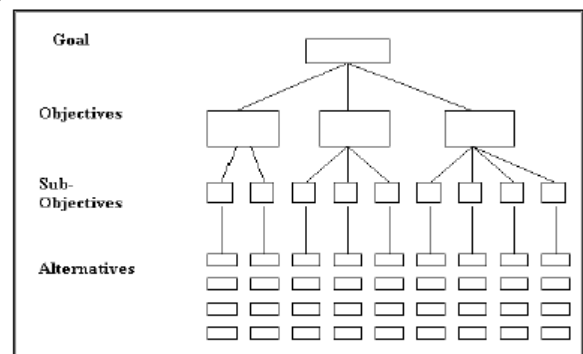
Model AHP memakai persepsi manusia yang dianggap "*expert*" sebagai input utamanya. Kriteria "*expert*" disini bukan berarti bahwa orang tersebut haruslah jenius, pintar, bergelar doktor dan sebagainya tetapi lebih mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang dilakukan, merasakan akibat suatu masalah atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut.

III.2.2 Prinsip Dasar AHP

Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara lain:

1. Dekomposisi

Dengan prinsip ini struktur masalah yang kompleks dibagi menjadi bagian-bagian secara hirarki. Tujuan didefinisikan dari yang umum sampai khusus. Dalam bentuk yang paling sederhana struktur akan dibandingkan tujuan, kriteria dan level alternatif. Level paling atas dari hirarki merupakan tujuan yang terdiri atas satu elemen. Level berikutnya mungkin beberapa elemen, dimana elemen-elemen tersebut bisa dibandingkan, memiliki kepentingan-kepentingan yang hampir sama dan tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok. Jika perbedaan terlalu besar harus dibuatkan level yang baru. Struktur hirarki AHP dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1
Struktur Hierarki AHP

2. Penilaian Komparasi (*Comparative Judgement*)

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang relative 2 (dua) elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan (*Pairwise Comparasion*).

3. Penentuan Prioritas

Dari setiap matriks *pairwise comparasion* akan didapatkan prioritas lokal. Karena matriks *pairwise comparasion* terdapat pada setiap tingkat, maka untuk

menentukan prioritas global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hierarki. Untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada tabel berikut:

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemn yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen daripada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan

Tabel 1
Skala Penilaian Perbandingan

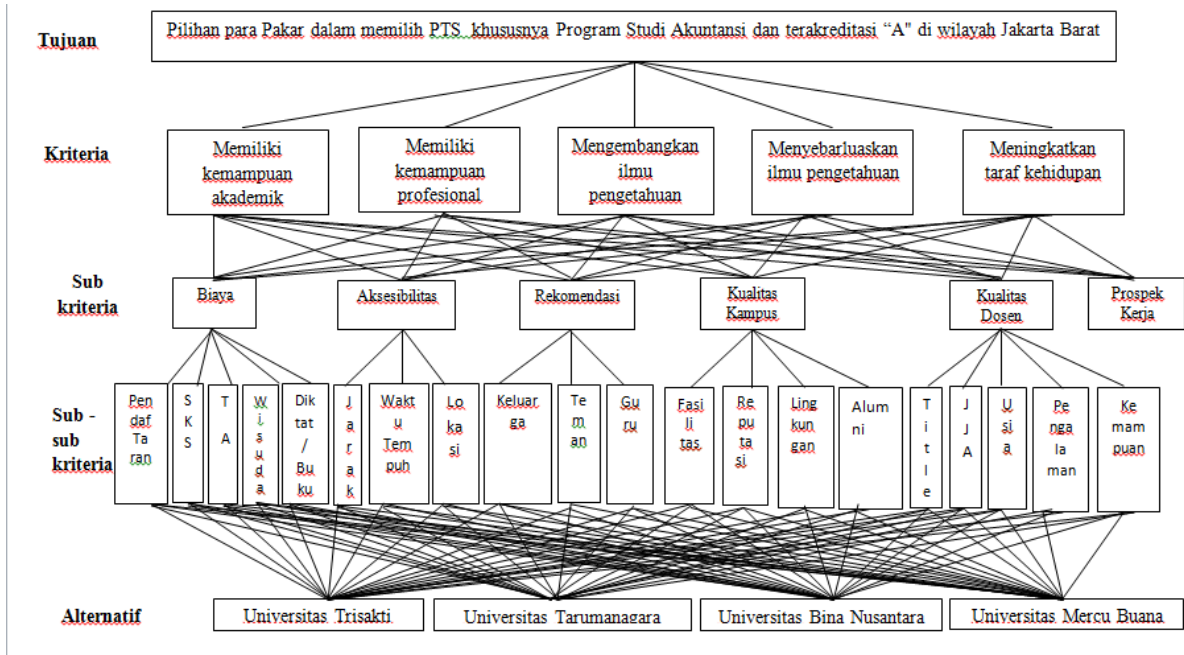
4. Konsistensi Logis (*Logical Consistency*)

Logical Consistency menyatakan ukuran tentang konsisten tidaknya suatu penilaian atau pembobotan perbandingan berpasangan. Pengujian ini diperlukan karena pada keadaan yang sebenarnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari hubungan tersebut sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini dapat terjadi karena ketidak konsistenan dalam preferensi seseorang. Pengulangan wawancara pada sejumlah responden yang sama kadang diperlukan apabila derajat tidak konsistensinya besar.

Untuk model AHP matriks perbandingan dapat diterima jika nilai rasio konsistensi < 0.1 . Batasan diterima tidaknya konsistensi suatu matrik sebenarnya tidak ada yang baku hanya menurut beberapa eksperimen dan pengalaman tingkat inkonsistensinya sebesar 10% ke bawah adalah tingkat inkonsistensi yang masih bisa diterima. Lebih dari itu harus ada revisi penilaian karena tingkat inkonsistensi yang terlalu besar dapat menjerus pada suatu kesalahan.

IV. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan prinsip dasar AHP yang pertama yaitu Dekomposisi (Saaty: 1993), masalah pemilihan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Program Studi Akuntansi dengan akreditasi “A” di wilayah Jakarta Barat telah dipecahkan atau dibagi menjadi menjadi bagian-bagian secara hirarki seperti pada kerangka berpikir (gambar 2)

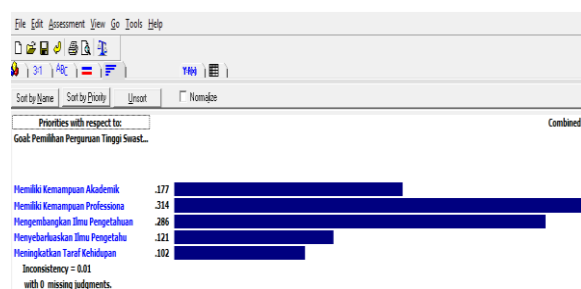


Gambar 2. Model Hierarki

Sumber : Fitriyani (2012), Kusumastuti (2011), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (PT)

Aplikasi *expert choice* 2000 akan memberikan hasil pengolahan data untuk pemilihan-pemilihan variabel kriteria, variabel sub kriteria dan variabel alternatif. Hasil dan pembahasan untuk masing-masing variabel tersebut dijelaskan pada sub bab IV.3.1, sub bab IV.3.2 dan IV.3.3

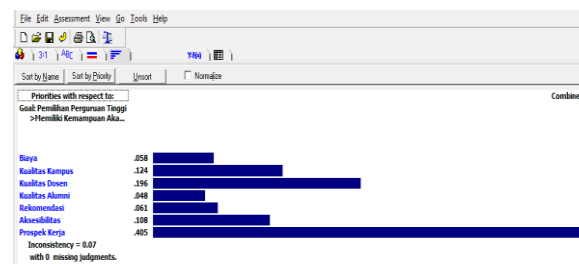
IV.3.1 Hasil dan Pembahasan untuk Pemilihan Variabel Kriteria



Gambar 3
Hasil Pengisian Nilai Bobot Prioritas Kriteria

Hasil akhir analisis penentuan nilai kriteria ditunjukkan pada gambar 3. Keluaran ini merupakan penentuan skala prioritas dengan menggunakan metode AHP, yang menunjukkan bahwa nilai tertinggi adalah 31.4% pada kriteria memiliki kemampuan profesional. Artinya prioritas pertama kriteria pada pemilihan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Program Studi Akuntansi dengan akreditasi “A” di wilayah Jakarta Barat adalah memiliki kemampuan profesional, prioritas kedua adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dengan nilai 28.6%, prioritas ketiga adalah memiliki kemampuan akademik dengan nilai 17.7%, prioritas keempat adalah menyebarkan ilmu pengetahuan dengan nilai 12.1% dan prioritas kelima adalah meningkatkan taraf kehidupan dengan nilai 10.2%.

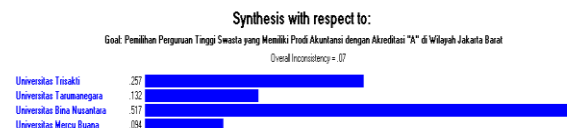
IV.3.2 Hasil dan Pembahasan untuk Pemilihan Variabel Sub Kriteria



Gambar 4
Hasil Pengisian Nilai Bobot Prioritas Sub Kriteria

Hasil akhir analisis penentuan nilai sub kriteria ditunjukkan pada gambar 4. Keluaran ini merupakan penentuan skala prioritas dengan menggunakan metode AHP, yang menunjukkan bahwa nilai tertinggi adalah 40.5% pada sub kriteria prospek kerja. Artinya prioritas pertama sub kriteria pada pemilihan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Program Studi Akuntansi dengan akreditasi “A” di wilayah Jakarta Barat adalah prospek kerja, prioritas kedua sub kriteria adalah kualitas dosen dengan nilai 19.6%, prioritas ketiga sub kriteria adalah kualitas kampus dengan nilai 12.4%, prioritas keempat sub kriteria adalah aksesibilitas dengan nilai 10.8%, prioritas kelima sub kriteria adalah rekomendasi dengan nilai 6.1%, prioritas keenam sub kriteria adalah biaya dengan nilai 5.8% dan prioritas ketujuh sub kriteria adalah kualitas alumni dengan nilai 4.8%.

IV.3.3 Hasil dan Pembahasan untuk Pemilihan Variabel Alternatif



Gambar 5
Hasil Pengisian Nilai Bobot Prioritas Alternatif

Hasil akhir analisis penentuan alternatif ditunjukkan pada gambar 5. Keluaran ini merupakan penentuan skala

prioritas dengan menggunakan metode AHP, yang menunjukkan bahwa nilai tertinggi adalah 51.7% pada alternatif Universitas Bina Nusantara. Artinya prioritas pertama alternatif pemilihan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Program Studi Akuntansi dengan akreditasi “A” di wilayah Jakarta Barat adalah Universitas Bina Nusantara, prioritas kedua adalah Universitas Trisakti dengan nilai 25.7%, prioritas ketiga adalah Universitas Tarumanegara dengan nilai 13.2% dan prioritas keempat adalah Universitas Mercu Buana dengan nilai 9.4% .

V. Kesimpulan

Penelitian ini ditulis untuk membantu siswa khususnya siswa kelas III Sekolah Menengah agar dapat menentukan pilihan melanjutkan studi ke jenjang Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Program Studi Akuntansi dengan akreditasi “A” di wilayah Jakarta Barat. Dari hasil penelitian dengan menggunakan software Expert Choice 2000 dapat disimpulkan bahwa Universitas Bina Nusantara menjadi alternatif dengan nilai tertinggi. Dari sub kriteria yang disajikan, sub kriteria tertinggi yaitu prospek kerja. Dari kriteria yang disajikan, kriteria tertinggi yaitu memiliki kemampuan professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. (2009). Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: Penerbit CV.Alfabeta.
- Fitriyani. 2012. “Aplikasi AHP Sebagai Model Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tempat Kuliah di Bangka Belitung”. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2012*. ISSN: 1907-5022. Yogyakarta. Tersedia: http://www.academia.edu/3236373/aplikasi_AHP
- Kusumawati, A. 2011. ”*Understanding Student Choice Criteria for Selecting an Indonesian Public University: A Conjoint Analysis Approach*”. SBS HDR Student Conference. Tersedia: <http://ro.uow.edu.au/sbshdr/2011/paper/16>. [04 Oktober 2013]
- Kwik Kian Gie. 2008. *Sebab-sebab Krisis Global dan Dampaknya terhadap Indonesia* Tersedia: www.ilmusaham.wordpress.com/2008/12/05/sebab-sebab-krisis-global-dan-dampaknya-terhadap-indonesia-kwik-kian-gie/. [13 Maret 2014]
- Lestari, A.P.I. Ayuningtyas, N.L. Fladian, B. dan Virginia. 2013. “Dampak Krisis Global Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia”. Kompas (Jakarta), Tersedia: <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/12/02/dampak-krisis-global-terhadap-ketenagakerjaan-di-indonesia-613237.html>. [14 Maret 2014]
- Mahmudi, A. 2006. *Tips Memilih Perguruan Tinggi*. Tersedia: <http://www.search-document.com/pdf/1/4/memilih-jurusan-di-perguruan-tinggi.html>. [14 Maret 2014]
- Musa, A.M. 2014. “Ada Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi Terpusat di Jawa & Sumatera, Angka Kemiskinan Terus Bertambah”. RMOL (Sumatera Selatan), 10 Maret. Tersedia: <http://www.rmolsumsel.com/read/2014/03/10/3136/Ada-Ketimpangan,-Pertumbuhan-Ekonomi-Terpusat-Di-Jawa-&-Sumatera-> [14 Maret 2014]
- Petruzellis, L. & Romanazzi, S. 2010. “*Educational value: how students choose university*” Tersedia: www.emeraldinsight.com/0951/354X.htm.
- Priyanto, A. Sutartono. Riyanto, A. dan Setiawan, I. 2010. *Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Perguruan*

- Tinggi Terhadap Preferensi Pemilihan Perguruan Tinggi di Kalangan Siswa SLTA (Studi Perbandingan pada Tiga Perguruan Tinggi). Universitas Terbuka. Penelitian. Tersedia: <http://www.pustaka.ut.ac.id/pdfpenelitian/81784.pdf>. [13 Maret 2014]
- Putri, M.S. 2009. "Megawati Minta Warga Papua Antisipasi Krisis Ekonomi". *Sriwijaya Post*. 8 Januari. Tersedia: <http://palembang.tribunnews.com/08/01/2009/megawati-minta-warga-papua-antisipasi-krisis-ekonomi> [14 Maret 2014]
- Rai, A. 2011. Dampak Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi Global. Tersedia: <http://www.docstoc.com/docs/125014371/2011-Ayu-Rai-Bahan-Diskusi-Dampak-Perekonomian-Indonesia-Pasca-Krisis-Ekonomi-Global>. [14 Maret 2014]
- Saaty, T. Lorie. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks. Pustaka Binama Pressindo
- Saaty, T.L. 2000. The Fundamental of Decision Making and Priority Theory with the Analytic HierachyProcess. Vol. VI of the AHP Series, RWS Publ.,2000 (revised). ISBN 0-9620317-6-3
- Sakernas, BPSRI. 2013. Tersedia: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06&no_tab=4. [13 Mei 2014]
- Sawaji, J. Hamzah, D. dan Taba, I. 2011, "Pengambilan Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Perguruan Tinggi Swasta di Sulawesi Selatan". Program Sarjana STMIK Handayani Makasar: Karya Ilmiah
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta Bandung

ISLAMIC MICROFINANCE MODEL

(Study of Implementation microfinance model in Indonesia)

Ahmad Subagyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI
Email: sahabat@ahmadsubagyo.com

Abstrak

Penelusuran dari nilai-nilai Islam di bidang keuangan mikro ditinjau dari Bab II menggunakan kedua pendekatan fenomenologis dan pendekatan fiqh untuk menemukan prinsip keuangan mikro syariah berupa (1) prinsip keadilan (justice), (2) prinsip kejujuran (honesty), dan (3) prinsip kemitraan (partnership). Dalam bab yang sama dikaji praktek-praktek keuangan mikro terbaik di dunia yang dilakukan untuk menemukan prinsip-prinsip keuangan mikro konvensional, ditemukan tiga prinsip keuangan mikro, yaitu (1) Kedalaman jangkauan pelayanan (outreach), (2) keberlanjutan (sustainability), dan (3) pemberdayaan (social intermediary). Tujuan studi ini adalah untuk menemukan model keuangan mikro Indonesia serta untuk menguji hubungan antara variabel kepatuhan dengan kinerja di institusi keuangan mikro Islam. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditemukan berupa prinsip-prinsip kepatuhan sebagai variabel exogenous yang terdiri dari variabel sasaran, variabel tujuan, variabel akad, dan variabel jaminan, dan variabel performance lembaga sebagai variabel endogenous. Variabel-variabel tersebut diuji secara kuantitatif. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner lalu ditabulasi dengan skala likert dan di analisis dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) serta dihitung dengan alat bantu komputer (software) LISREL 8.7. Diperoleh kesimpulan bahwa variabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja organisasi (LKMS) adalah variabel sasaran (kepatuhan terhadap prinsip keuangan mikro) dan variabel tujuan (kepatuhan terhadap prinsip syariah).

Kata kunci: model keuangan mikro syariah, prinsip-prinsip kepatuhan, SEM

Abstract

The tracing of Islamic values in micro finance were reviewed on Chapter II using both phenomenological approach and *fiqh* approach to find the principle of Islamic micro finance, namely (1) the principle of justice, (2) the principle of honesty, and (3) the principle of partnership. On the same Chapter, reviews on the best practices of micro finance were also done in order to find the principle of conventional micro finance namely (1) the principle of outreach, (2) the principle of sustainability, and (3) the principle of social intermediary. The aim of this study is to find the model of Islamic microfinance in Indonesia as well as to test the significance of the relationship between the variables compliance with the performance of microfinance institutions of Islam in Indonesia. Based on the basic principles found in the previous chapter, principles of discipline as exogenous variables were established consists of variable of target, variable of Goal, variable of Aqad, variable of warranty, and institution performance variable as endogenous variable. Those variables are quantitatively analyzed. Data collected from the questionnaires were then tabulated using the Likert Scale and analyzed using Structural Equation Model (SEM) assisted by computer technology with the software of LISREL 8.7. From this, it was found that the significant affecting variables to the organization performance (IMFI) are; variable of target (discipline towards the principle of micro finance) and the variable of Goal (discipline towards the principle of Sharia).

Key words: syariah microfinance model, compliance principles, SEM

I. INTRODUCTION

A. BACKGROUND

There are about 3 billion people of the world population living on the less than US \$ 2 per day. They are the poor with five children and one of them died before the age of 5 days. Indonesia's population lives on less than US \$ 2 per day is almost equal to the total number of people living of all the countries in East Asia except China. Each of the 100 residents of Indonesia there are 15 poor or in total there are 35 million poor people in the calculation of the Central Bureau of Statistics in 2008.

Poverty has become an acute problem of the world community. Efforts to eradicate poverty on the agenda together. Various studies have been conducted by many scientists in the west and in the east. The study concluded that poverty eradication tool which is currently considered the most successful is the implementation of microfinance (microfinance).

Poor people in the Muslim world there are more than 1.2 billion people. In a region that stretches from Senegal to the Philippines which includes six continents, North Africa, the Sahara Africa, the Middle East, Central Asia, South Asia, and Southeast Asia. The growth rate of poverty is highest in the region, except in Southeast Asia and the Middle East. In Indonesia, which has the largest Muslim population in the world, more than half the population of around 129 million people are poor with incomes of less than \$ 2 per day. Bangladesh and Pakistan with the amount of 122 million people, followed by the State of India, amounting to approximately 100 million Muslims are below the poverty line. Country - the predominantly Muslim countries have Gross Domestic Product (GDP) in the low category (poor) that is equal to 40% from 55 countries.

A contradictive conditions between the abundance of natural resources owned these areas with the economic conditions surrounding. While a large part of the Muslim population is in poverty. Though God has said in the scriptures "you are the best people are born to humans, ..". Tackling socioeconomic issues have been carried out various endeavors and strategies, both at a local, national and global.

Some experts have agreed to change the economic conditions in poor countries and developed by using a new paradigm of empowering the poor and proved to be the most effective way is the implementation of microfinance (case study in Bangladesh to alleviate poverty from 52% of the population in Bangladesh).

Microfinance (microfinance) has become an international issue and become the center of attention of the world community today, especially since Muhammad Yunus won the Nobel Peace Prize in 2006. Mainstream has changed, the poor with all its limitations from the standpoint of Commercial Bank was considered unfit to be given loans (financing) because unbankable. However, empirical evidence from the experience of Grameen Bank turns NPF (Non Performing Finance) it is not more than 1%, meaning that the rate of return customer payments reached 99%. The bank customers 98% are female and come from poor families. This has turned the old paradigm that women are weak and the poor was no ability to "helpless" is a misnomer. Conversely, if they are given a believable way and then they have the potential to change for the better, in social as well as economic.

Characteristic of Islamic microfinance practice owned by their respective microfinance institutions around the world is essentially distinguished only on product application (contract) and methodology (how to work) microfinance.

In the practice of conventional microfinance known several models in relation to the methodology (how) the micro finance in serving financial services to its target, namely (1) the model comes from the Grameen Bank of Bangladesh, (2) a model village banks (Village Bank) emerged from the Philippines and widespread in Latin America, (3) model of Self Help Group (SHG) that developed in India, and (4) a model that develops Credit Union in Sri Lanka.

The existence of Islamic microfinance institutions as empowerment of the poor is a social and economic function as a form of carport for the people. Possessed great potential of Muslims in the country predominantly Muslim Indonesia has yet to reach the maximum amount. Irony is, zakat is a routine worship of Ramadan is not grounded so apparent in real life

So in this study, the authors wanted to examine in depth on the model of Islamic microfinance in Indonesia, which has its own characteristics and have different methodologies with previous models. Titles in this dissertation research is Islamic Microfinance Model (Analysis Model in phenomenological approach to the practice of Islamic microfinance in Indonesia)

B. PROBLEMS

1. Identify the Problem

In practice microfinance developed in accordance with the conditions, culture, environment and character of the nation in which it is implemented microfinance. Form of microfinance practices that differ from country to country to encourage the emergence of a certain pattern (model) which is typical in the region and become a reference for the practices of microfinance in other areas.

Grouping microfinance practices in some models made by analyzing the features possessed by each of the micro-finance institutions in serving the target market. There are eight features that distinguish between models with each other, namely (1) service, (2) the process of financing, (3) binding, (4) guarantees, (5) the method of payment, (6) financing ceiling, (7) savings system, (8) the target service. There are four systems framework that divide and differentiate between microfinance models to one another. First: microfinance into financial intermediation, or the provision of financial products and services such as savings, financing, insurance, and so on. Second: microfinance into social intermediation, or the development of human and social capital needed by sustainable financial intermediation for the poor. Third: business development services, or non-financial services that help microentrepreneurs. Include: business training, marketing services and technology, skills development, and so on. Fourth: social services, or non-financial services that focus on the welfare of micro entrepreneurs. Include: health care, education, and so on. If a microfinance institution does not practice any of the categories of the four categories, meaning not fully practice the principles of microfinance (minimalist).

2. Restrictions Problem

This research study will focus on some of the following:

a. Assessment of the principles of Islamic finance;

This study comes in a variety of primary reference on the theory and concepts of contemporary Islamic finance.

b. Islamic microfinance institutions that became the object of study is Islamic MicroFinance Institutions (IMFI) operating in Indonesia.

c. Features microfinance model indicated in the form of financing products resulting from the financial institution. So the analysis of the microfinance model is restricted to variables microfinance principles consisting of:

(1) Target financing,

(2) Security financing,

While variable microfinance principles of Islam, consisting of:

(1) The purpose of financing;

(2) financing Agreement

The above four variables called exogenous variables.

Quantitative data which is an indicator of performance (struktur financial) institutions, among others:

a) Total assets of the institution

b) The amount of non-performing financing

c) Loan to Deposit Ratio (LDR)

d) The ratio of the number of customers with financing (outreach)

These four variables above quantitative data called endogenous variables

3. Problem Formulation

To achieve the research objectives formulated some formulations of the following problems:

(1) How does the practice of Islamic microfinance in Indonesia in terms of aspects of compliance with the principles of the shari'ah and the principles of microfinance?

(2) Does the variable compliance (compliance) significantly affect the performance of microfinance institutions of Islam in Indonesia?

C. RESEARCH OBJECTIVES

This study aims to find answers to several issues that exist in the formulation of the problems mentioned above. The aim is:

1. To find the model of Islamic microfinance in Indonesia.

2. To test the significance of the relationship between the variables compliance with the performance of microfinance institutions of Islam in Indonesia.

RESEARCH METHODOLOGY

1. Types of Research

In accordance with the purposes of this study, the research method chosen was a qualitative descriptive approach phenomenologi. Edmund Husserl in Muhadjir states that science is not limited to the empirical (sensual), but that does not include other phenomena than perceptions, thoughts, wishes, and beliefs about the subject of something outside the subject, there is something transcendent besides the aposteriorik. To assess the level of compliance of microfinance institutions against Sharia compliance and fulfillment of the features of Islamic microfinance used survey research.

2. Approach system

Economic reality is very wide variation in space and time influenced by many variables, so no theoretical basis and empirical analysis are robust in data processing and proven correlation technique is unable to distinguish between cause and effect. This study uses a dynamic system (system dynamics) is a methodology for studying complex problems in a system. This methodology is not like any other approach for studying the problems to sort them into parts smaller, Dynamics system see the problem as a whole. Qualitative research methodology based phenomenologi requires a holistic approach, sit objects in a natural context, not partial. So that the most appropriate instruments to solve the problem in this research is a system approach.

3. Methods Analysis

- a. Seek and find the dimensions of Islamic microfinance model;
- b. Assessing the implementation of Islamic microfinance model dimensions on Islamic microfinance institutions in Indonesia.

The second output:

The results of the survey research will categorize Islamic Microfinance Institutions in Indonesia into four groups (quadrant), namely:

- First Quadrant: Microfinance Institutions
- Second Quadrant: Commercial Financial Institutions
- Third Quadrant: Charity
- Fourth Quadrant: Islamic Microfinance Institutions

- c. Assessing the implementation of Islamic microfinance model dimensions on Islamic microfinance institutions in Indonesia.

II. MODEL of ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTION (IMFI) IN QUANTITATIVE APPROACH

Search for and find a model Islamic microfinance can be examined using two approaches, namely the qualitative approach is used to explore the philosophical foundation in building microfinance models and quantitative approaches are used to test the statistical significance level, the validity and reliability of the model are found.

Structure validation describe the performance of the performance of institutions (IMFI) in Indonesia, as indicated by several variables, among others, (1) the total assets of the institution can demonstrate the ability of the institution to expand its business, (2) Loan to deposit ratio (LDR), which reflects the ability of institutions to exploit funds collected from members (community) it in the form of savings to be channeled back to members in need of funds in the form of financing, it also can be a variable parameter intermediation of financial

institutions. (3) Non-performing Finance (NPF) indicating financial performance, if low NPF shows good body systems and their compliance members in carrying out its obligations. (4) Ceiling per-member indicates the range of services to the poor, the smaller the value reflects the range and depth of services to the poor is growing.

Behaviour validation describe the behavior of Islamic microfinance institutions (IMFI) in Indonesia, as indicated by its product features. The main features of financial products have several major variables among others, (1) Target microfinance products that determines who the prospective members are eligible to receive financial services, (2) The purpose of Islamic financing products that lead to the attainment of material and Ruhiyah, (3) Akad agreement designed and provide a sense of security and peace of mind that in accordance with the principles of shariah. (4) Security financing practiced in Islamic microfinance institutions in accordance with the principles of microfinance.

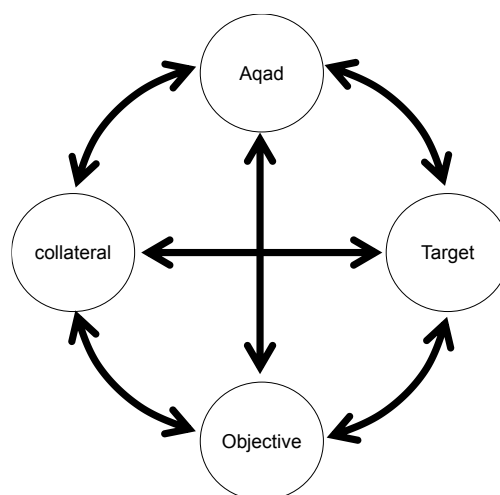


Figure 1.6 Variables - variables compliance

Empirical evidence outlines the empirical data microfinance practiced by microfinance institutions in Indonesia. Reference mode describes the results of studies on various models of reference microfinance practices.

Based on these variables above, then compiled the research hypothesis called Dynamics hypothesis in this study are:

1. Variables behavior (compliance) effect on structural variables (performance performance) on Islamic microfinance institutions in Indonesia.
2. One variable compliance significantly affect performance variables IMFI performance in Indonesia.

Changes in structural and behavioral variables will form a particular pattern called MODEL.

Variables and Indicators

Variables and this indicator is based on studies toeritik derived from previous chapters. Theory will guide in finding the variables of research (surveys) that are relevant and related to the object of study. In this study found the variables adherence to the principles of micro keuangan and against sharia.

Operational definitions Variable

To be able to measure the variables under study required operational definition. According Zarqa to classify the variables studied three categories, (1) a phenomenon that is not related (relevant), (2) exogenous phenomenon, (3) endogenous phenomenon. Each exogenous variables are always independent variables and exogenous variables will affect endeogenous variables.

The exogenous variables in this study are:

- a) financing target variable is the recipient of financing in accordance with the principles of microfinance
- b) Variable financing goal is the achievement of the target material and Ruhiyah of financing
- c) Variable financing agreement is the agreement in accordance with the principles of sharia (maqoshid al-Sharia)
- d) Variable financial guarantees in accordance with the principles of microfinance

No. Variable Indicator

1. Target financing

- a. People are very poor
- b. woman
- c. Have a job (productive)
- d. Revenues of approximately Rp. 20,000 per day or less
- e. Reach customer locations away from the office service

2. The purpose of financing

- a. Increased family income
- b. Improve the relationship between citizens
- c. Provide guidance to members
- d. Increase faith and piety
- e. get peace

3. Agreement (type of financing)

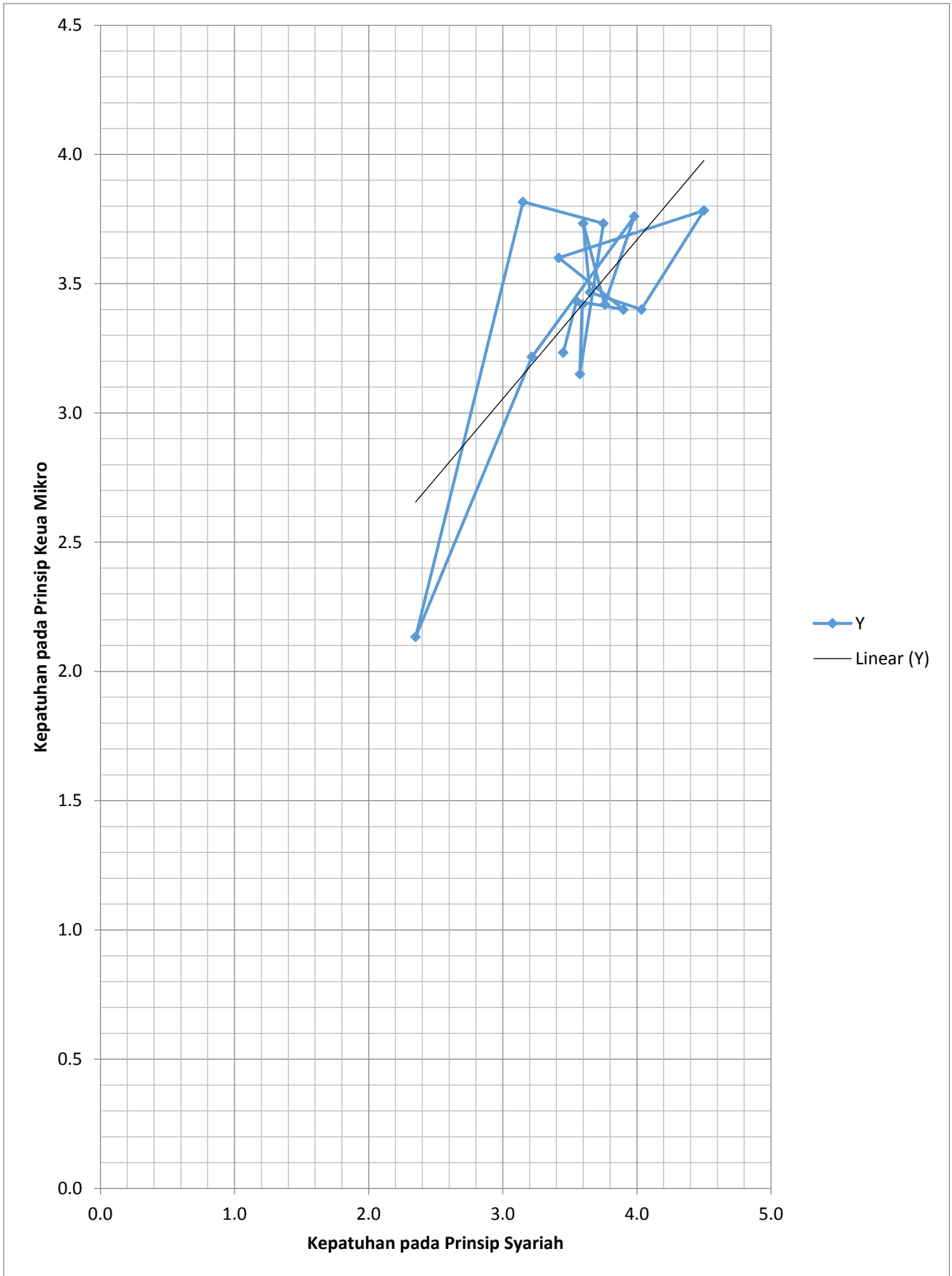
- a. Without the cost of binding, even if there is only the cost of the stamp
- b. Using the basis for the results, margins, and or ujah
- c. No transactions of money, only goods for murabaha contract
- d. Margin / profit sharing does not burden the customer that is characterized by sincerity in repaying obligations
- e. No clause of the agreement that the customer does not know the contents and meaning.

4. Form a guarantee of payment. Unconventional forms of collateral

- a. The certainty that the customer can repay its obligations
- b. Lapses get a good solution and not be fined
- c. Guarantor is the recipient of financing and partner
- d. Social pressure group if there are members who commit violations

III. RESULTS AND ANALYSIS

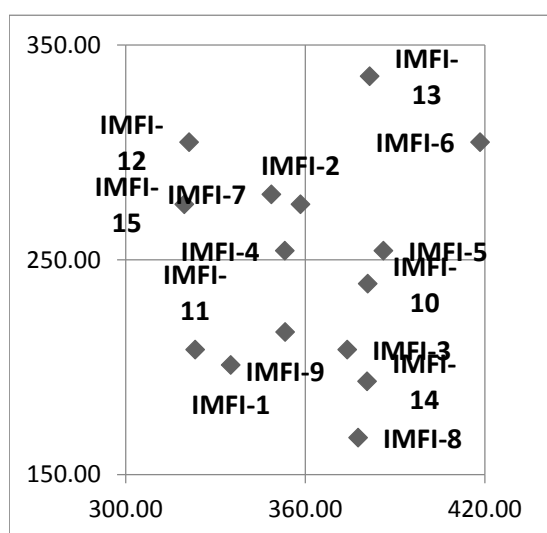
Position in Quadrant portfolio IMFI Compliance



Quadrant portfolio demonstrates compliance IMFI position based on the perception of respondents measured using a Likert scale assessment. There are two lines, namely horizontal and vertical lines, where the vertical line indicates the level of adherence to the principles of microfinance, while the horizontal line indicates the level of IMFI adherence to the principles of sharia purpose.

Before evaluating the level of compliance of each sample to the principles of sharia and microfinance, terlebih first be presented a profile of each sample in relation to the financial performance shown in the last reporting period of 2009.

Table 4.6. Profile Samples of aspects of financial performance



Source: Primary Data

Variable adherence to sharia, as indicated by X2 (financing purposes) and X3 (financing agreement), while variable adherence to the principles of microfinance, as indicated by the variable X1 (target financing) and X4 (form of guarantee). Compliance diagram showing the position of a microfinance institution (MFI) based on the perceptions of stakeholders (members, administrators and supervisors) are objectively in the first quadrant, Quadrant II portfolio, portfolio Quadrant III, or IV quadrant portfolio. Each quadrant of the portfolio has a different position. The position kudran, among others:

a. Quadrant portfolio I explained that IMFI samples are in a position as a microfinance institution, because only adhere to the principles of microfinance alone, even if there is adherence to sharia value is low (very low).

b. Quadrant II portfolio explained that IMFI samples are in a position as a formal financial institution, due to the low adherence to the principles of sharia and microfinance.

c. Quadrant III portfolio explained that IMFI samples are in the position of Islamic Microfinance Institutions (IMFI) due to high levels of adherence to Shariah principles and microfinance.

d. Quadrant IV portfolio explained that IMFI samples are in a position as a charity, because of the high level of adherence to sharia, but do not apply the principles of microfinance.

Compliance Portfolio Analysis Techniques

Assessment using portfolio analysis, ie assessment obtained from the calculation perceptual respondents (qualitative) and the results of calculation of scoring assessment (quantitative).

Generally formula is as follows:

where Is:

X1 is the average value of the sharia compliance variable (X2 and X3)

X2 is the average value of the variable compliance microfinance (X1 and X4)

While X searched with the following techniques:

Based on the results of the analysis of respondent data, obtained IMFI distribution in coordinate points between the lines x and y lines or (X, Y) to-15 IMFI sample occupy at Quadrant following portfolios:

The above data was obtained from the calculation as follows:

LKMS	X	Y
1	3,5	3,2
2	3,6	3,4
3	3,9	3,4
4	3,4	3,6
5	4,5	3,8
6	4,0	3,4
7	3,7	3,5
8	3,6	3,7
9	3,8	3,4
10	4,0	3,8
11	3,2	3,2
12	2,4	2,1
13	3,2	3,8
14	3,8	3,7
15	3,6	3,2
rata-2	3,6	3,4
mean	3,6	3,4

Based on the results of the sample IMFI position in Quadrant III portfolio, it means IMFI samples are in position as Islamic microfinance institutions. However, based on the average IMFI sample, IMFI position can be seen in the image below:

Picture: Position IMFI Quadrant Compliance portfolio

Of the 15 IMFI sample has the highest compliance rate is the sample no. 13 ie BMT Bina Ummah Welfare. The IMFI profile is as follows:

While IMFI sample with the lowest compliance rate is the sample no. 1 ie BMT Kube Prosperous 003 with the following performance:

Quantitative Data Analysis

To test the hypothesis of this study are:

1. Variables behavior (compliance) effect on structural variables (performance) on Islamic microfinance institutions in Indonesia.
2. One of the variables compliance significantly affect performance variables IMFI performance in Indonesia.

Researchers used two types of software programs to help test this hypothesis, namely: (1) To test the hypothesis the first study used a model of SEM (Structural Equation Model). SEM is a statistical technique that is capable of analyzing latent variables, indicator variables and measurement error directly. SEM is one of the domains in multivariate statistics dependencies which allows for an analysis of one or more dependent variables. Both the dependent variable and the independent variables involved may form a continuous or discrete variable, in which case multiple regression can not solve it. However SEM has the disadvantage of not having the best statistical test that can explain the predictive power of the model.

Counting process and assisted analysis using LISREL (Linear Structural Relationship), and (2) To test the second hypothesis, because of the weakness of using SEM models mentioned above, the researchers used the PATH-ANALYSIS with Minitab ver.13.

IV. CONCLUSION

The principles of Islamic micro finance discussed in Chapter I in this study obtained a theoretical framework to build a model of Islamic microfinance in Indonesia. Principles of Islamic microfinance as a synthesis between Islamic financial principles with the principles of microfinance produce features in the microfinance Islamic finance products that include financing target variable, the variable funding purposes, the variable financing agreement and variable financial guarantees. These variables studied and analyzed using structural equation modeling (SEM) which will show the results of the relationship of these variables on the performance of microfinance institutions who practice Islam.

Ruhayah dimensions that can be used as the basis of Islamic microfinance movement include, (1) The principle of fairness (justice), (2) the principle of openness and honesty (transparance and fairness). and (3) the principle of partnership, and was followed by a discussion of the principles of microfinance has become a cornerstone of the practice in the world of microfinance. The principles of microfinance is meant, among others: (1) The scale and depth of the range of financing, (2) Sustainability (sustainability), (3) Empowerment (social intermediary), (4) Commercial (financial intermediary).

There are two main results of the study by using this quantitative approach: first: financial institutions practicing Islamic microfinance occupy in different quadrants of compliance levels, both: the variables that affect the direct compliance and means (significant) to institute performance is financing target variables and variable financing purposes, while the variable contract and financing guarantees variable is not significant. This has implications for the level of performance (performance) institutions indicated that there is a very strong correlation of the quantitative analysis. Based on sample data in this study, amounting to fifteen IMFI throughout Indonesia, the result that IMFI which is the highest position in the level of compliance with the Shariah has a level of performance and higher performance, otherwise IMFI who are at the low level of compliance has a level poor performance.

In Chapter in advance has been discussed about the need for more financial paradigm shift tend to be oriented to the interests of stockholders (owners of capital) becomes more towards stakeholders (all interested parties) that includes the public, government and private (enterprise). Thus, the impetus variety of new formulations can be raised as the antithesis of financial formulas are only in favor of the stockholders and profit-oriented material alone.

RECOMMENDATION

Microfinance actors including intermediary institution that serves to connect the excess funds to the party that lack of funds (deficit). Through these functions microfinance actors will be able to become a media redistribution of wealth in a region or country.

Intermediation function is important, because economic growth is highly dependent on their investment, while investment will be constrained when the intermediary institutions wearing high margins on financing. Margin and profit sharing disproportionate will deter potential investors to invest.

The new approach in the banking world is Microfinance. Islamic microfinance services in microfinance in the form of savings, deposits, financing, transfer and insurance with Islamic principles. Standard banking operation can not be used as a reference microfinance for different characteristics, where banking, serving the well-established "economically" while "microfinance, serving the poor. Some things that need to be adjusted are:

- a. Funding should be targeted, because it will result in the level of productivity and high returns while helping the lower social classes (poor)
- b. The purpose of financing should be based on the desire to obtain satisfaction of all parties, both material and immaterial.
- c. -Traditional form of guarantee from the conventional to a more flexible.
- d. Bureaucratic procedures are taken into care so much faster short (1-3 days)
- e. Credit requirements, relatively fewer
- f. The ceiling is relatively smaller in order to reach the bottom

REFERENCES

- Antonio, M.S. 2001. *Bank Shari'ah, dari teori ke Praktek*. Cetakan Kedua. Jakarta : Penerbit Gema Insani Press.
- Arthur, dkk. 1999. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Aziz, M.Amin., 2010. *Islamic Microfinance Institution in Indonesia: Outlook & Prospect*. Jakarta : Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Firdaus, Muh, dkk. 2007. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Shari'ah Kontemporer : Edukasi Profesional Shari'ah*. Penerbit: Renaisan, Jakarta.
- Gafoor, Abdul.ALM. 1997 *Interest-Free Commercial Banking*. Apptec Publications, Groningen. Netherlands.
- Gamal-el, Mahmoud. 2006 *Islamic Finance Law : Economics, and Practice*. New York. USA : Cambridge University Press.
- Ghazali, Agil,Abod. 2005 *An Introduction to Islamic Economics & Finance*. Kuala Lumpur – Malaysia : Published by CERT Publication.
- Ghazali, Imam. 2008. *Structural Equation Modelling*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Helms, Brigit. 2006. *Access for All, building inclusive financial shstems*. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). Washington DC. USA : The World Bank.
- Homoud,S.,M. 1985. *Islamic Banking, TheAdaption of Banking Practice to Conform with islamic Law*. London : Arabian Information.
- Honohon, Patrick. 2007. *Cross-Country Variations in Household Access to Financial Services*. Washington, D.C : Presented at the World Bank Conference on Access to Finance,, 15 March.

- Iqbal, Zamir. and Mirakhor, Abbas. 2008. *An introduction to Islamic Finance Theory and Practice*. Singapore : John Willey & Sons.
- Islamic Banking and Finance*.1996. London: Butterworths
- Jaffer, Sohail. 2005. *Islamic Retail Banking and Finance. Global Challenges and Opportunities*. United Kingdoms : Published by Euromoney Books.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro..* Jakarta: Karim Business Consulting.
- Khan, Fahim, dkk. *Money and Banking in Islam*. International Center for Research in Islamic Economics. King Abdul Aziz University, Jeddah.
- Khan, Fahim. 1995. *Essays in Islamic Economics*. Leicester, UK : The Islamic Foundation.
- Mannan, M.A. 2005. *Financing Development in Islam*. , Jeddah: IRTI and Islamic Development Bank.
- Martin, dkk. 2004. *Manajemen Keuangan (Prinsip-prinsip dan Aplikasi) Jilid 1*. Penerbit PT.Indeks : Jakarta
- Masdar F. Mas'udi, 1995. "Meletakkan Kembali Masalahat Sebagai Acuan Shari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI
- Metwally, 1995. *Teori dan Model : Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M.Husein Sawit. Jakarta.: PT. Bangkit Daya Insani
- MicroRate & Inter-American Development Bank. 2003. *Technical Guide, Performance Indicators for Microfinance Institution*. Washington, D.C.
- Moore, Phillip. 1997. *Islamic Finance, A Partnership for Growth*. London : Published by Euromoney Books.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, 1977. *Dawabit al-Maslahah fi as-Shari'ah al-Islamiah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Mumtaz Ahmad (ed), 1994. *Masalah-Masalah Teori politik Islam*, Bandung: Mizan.
- Mustafa Zaid, 1954. *al-Maslahat fi at-Tashri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, Mesir: Da>r al-Fikr al-Arabi.
- Martin,K. 2008. *A Note on The Evolution of Development Thinking. Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XXXII No. 3, September.Jakarta: LPEM-FEUI.
- Nasution, H. 1994., *Islam Rasional*. Cetakan ke-5. Penerbit Mizan Bandung.
- Nazir, Muh. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nining J. 2008. *Keuangan Mikro Indonesia (Profil dan Perkembangan)*. Buku 1. Jakarta : Penerbit UKM Center-UI.
- Nur A. Fadhil Lubis, 1995. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* Medan :Pustaka Widyasarana.
- Nyazee. Imran A Khan. 2006. *Islamic Law of Business Organization*. Kuala Lumpur, Malaysia: IRTI & IDB.

- Obaidullah, Moh. 2008. *Introduction to Islamic Microfinance*. New Delhi : Sunduz Art and Graphics.
- Ohmae, Kenichi, 2005. *The Next Global Stage. Challenges and Opportunities in Our Borderless World*. Pearson Education, Inc. : Upper Saddle River, New Jersey. USA.
- Rawls, John. 1973. *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press
- Rhyne and Rotblatt, 1997. *What makes them Tick? (exploring the anatomy of Major Microenterprises Finance Organization)*. ACCION International.
- Rivai, dkk. 2007.. *Bank and Financial Institution Management*. Penerbit PT. Rajawali Press : Jakarta.
- Rivai, dkk. 2006. *Credit Management Handbook*. Penerbit PT. Rajawali Press : Jakarta.
- Rivai, Veithzal, dan Idroes. 2007. *Bank and Financial Institution Management : Conventional & Sharia System*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Robinson, Marguerite. 2006. *The Microfinance Revolution, sustainable finance for the poor*. World bank. Washington DC.
- Rohmatin Bonasir . Wartawan, BBC Siaran Indonesia . 26 Januari, 2009 - Published 13:24 GMT,
- Rondrigues, Juana. 2005. *Financial Services to Rebuild Livelihoods in Aceh*. Convened by Microfinance Conference. ILO.
- Roodman, David. 2006. *Microfinance as Business*. Center Global Development.
- Segrado, Chiara. 2005. *Case Study: Islamic Microfinance and Social Responsible Investment*. Italy : University of Torino.
- Seibel, Hans, D. 2005. *Islamic Microfinance in Indonesia*. Eschborn : Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ).
- Shed Omar Shed Agil, Aidit Hj.Ghazali. 2005. *Reading in The Concept of Methodology of Islamic Economics*.Kuala Lumpur: CERT Publication.
- Shadr, Ash-.Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*. Terjemahan. Penerbit : Zahra, Jakarta
- Subagyo, A. Purnomo, B. 2009. *Grassroot and Commercial Microfinance, Konsep dan Implementasi*. Penerbit Bank BPD Aceh.
- Subagyo, Ahmad.,Purnomo, Budi. 2009. *Account Officer for Commercial Microfinance*. Yogyakarta : PT. Graha Ilmu.
- Tanco, Jr., A.R. 1983. *Prologue. The first of all impertive*. Banish hunger in our time. Dalam: j.W. Rosenblum (ed), *Agriculture in the Twenty-First Century*. A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons. New York. H 1-11.
- Weber, Max., 1968. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, , New York. USA : Charles Scribner's Son.

Apendix 1.

NO	Insitution	Built Year	ASSET (Rp.000,-)	FUNDING (Rp.000,-)	LDR	NPF	Client	Avg Plafon
1	KSU-BMT KUBE SEJATERA 003	2.004	1.093.735	610.000	124%	15%	619	1.226
2	BMT AL-KHASANAH	1.999	5.398.718	3.012.137	106%	5%	1.200	2.651
3	BMT BINA SWADAYA	1.996	3.619.005	3.119.162	89%	11%	2.150	1.287
4	BMT HIDAYAH	2.005	1.283.000	459.000	51%	0,90%	143	1.650
5	BQ. DEWANTARA	1.995	2.261.043	1.668.566	90%	30,34%	454	3.297
6	BMT USA JEPARA	2.007	1.190.195	816.934	95%	4%	968	798
7	KSU-BMT "ARTHA BINA UMMAH"	1.998	3.015.509	1.124.461	67%	7%	1.185	633
8	BMT AL-AMANAH	1.995	636.056	481.949	88%	4%	386	1.100
9	BMT "BINA UMMAT SEJAHTERA"	2.009	709.694	500.000	49%	3,70%	2.150	115
10	BMT NASIONAL WANITA ISLAM	2.006	1.000.000	700.000	71%	3%	2.150	233
11	KJKS BMT MENTARI		4.976.133	4.327.846	92%	12%	2.150	1.853
12	KJKS BMT ASALAM ARTHA DAYA	1.997	4.722.978	4.433.144	86%	5%	4.632	822
13	BMT BINA UMMAT SEJAHTERA	1.996	136.610.359	101.163.946	114%	0,8%	35.716	3.217
14	BMT PAHLAWAN	1.996	18.932.142	16.497.778	63%	8%	3.527	2.931
15	BMT AL-BIRRY PINRANG	1.995	6.873.050	5.089.367	100%	6%	1.885	2.691

BIODATA PENULIS

Rizky Amalia Yonita

Rizky Amalia Yonita lahir di kota Karawang pada 12 Juni 1989. Menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada 2012 Terakhir diketahui bekerja di ✓ Verified Kaskus+ Account!™.

Email: my_kiraramiroku@yahoo.co.id

Armanto Witjaksono

Armanto Witjaksono, lahir di Bandung, tahun 1969. Menyelesaikan gelar S1-nya di Universitas Padjajaran Bandung. Strata dua-nya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini sebagai Dosen Tetap pada Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta. Selain aktif sebagai Dosen yang bersangkutan juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pendampingan di Perbankan serta mendapatkan gelar sertifikasi profesi dalam bidang internal audit (QIA = Qualified Internal Audit) pada tahun 2007. Ia juga mendapatkan sertifikasi Manajemen Risiko level 3 Badan Sertifikasi Manajemen Resiko (BSMR) tahun 2009.

Email: armanto@binus.ac.id

Muhammad Masyhuri

Penulis dilahirkan di kota Medan. Menamatkan pendidikan S1 nya di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, IPB Bogor tahun 1992 dan mendapatkan gelar S2, MBA dari Universitas Queensland, Australia tahun 2007. Penulis mempunyai pengalaman profesional sebagai *Corporate Secretary*, *Investor Relations* serta *Corporate Communications* lebih dari 15 tahun di beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti di Group Bakrie, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum), PT Transamudra Usaha Sejahtera dan PT Berau Coal Energy Tbk. Dari tahun 2011 – 2013 penulis aktif sebagai peneliti independen di Badan Pangan Dunia (FAO) di Jakarta. Saat ini penulis sebagai dosen tetap STIE “GICI” dengan mengampu mata kuliah utama Pengantar Ekonomi, Business English, Pasar Modal, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Selain itu penulis juga tercatat sebagai dosen Kelas Internasional di Universitas Budi Luhur dan GS Fame Business Institut, Jakarta dengan mengampu mata kuliah Cross Cultural Management, International Business and Trade dan International Marketing.

Email : masyhuri.muhammad@gmail.com

Rio Eldianson

Penulis dilahirkan di Jakarta, 19 Maret 1985. Menamatkan pendidikan S1 di fakultas Ekonomi Manajemen, IPB tahun 2008, dan melanjutkan jenjang S2 di Magister Akuntansi Universitas Trisakti tahun 2013. Penulis mempunyai pengalaman profesional sebagai Tenaga ahli bimbingan teknik koperasi di bidang akuntansi dan pajak, bidang manajemen koperasi di Dinas Koperasi DKI. Tenaga ahli bidang akuntansi dalam kegiatan lumbung bersaing BPMPD provinsi NTB. Penulis tercatat sebagai dosen tetap STIE “GICI” dengan mengampu mata kuliah bidang akuntansi dan keuangan.

Email: rioeldianson@yahoo.co.id

Rizkison

Penulis dilahirkan di Jakarta, 15 Desember 1982. Menyelesaikan studi S1-nya di STEI SEBI Jurusan Akuntansi Syariah tahun 2007. Pendidikan S2 di Magister Akuntansi Universitas Trisakti tahun 2013. Penulis mempunyai pengalaman profesional sebagai *Board of Trustees* di KJKS BMT Nusantara, *General Secretary* di KJKS Solusi H, dan sebagai *Chairman of Board* di BMT Tawfin. Saat ini penulis sebagai dosen luar biasa di STIE “GICI” dan STEI Tazkia dengan mengajar mata kuliah Akuntansi Komputer, dan mata kuliah bidang akuntansi

dan keuangan lainnya.
Email: rizkson82@yahoo.co.id

Rizal Bakti

Rizal Bakti lahir di Lahat (Sumatera Selatan), 11 Juni 1973. Menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Sriwijaya Jurusan Ekonomi Studi Pembangunan Palembang, dan melanjutkan jenjang S2 di Magister Manajemen Universitas Mercubuana di Jakarta. Penulis mempunyai pengalaman profesional sebagai *Human Resources & General Affair* selama 13 tahun di beberapa perusahaan di Indonesia seperti di PT. Vivamas Adipratama, PT Istana Kebayoran Raya, PT Musica Studio's dan PT Tirta Indra Kencana. Penulis juga pernah bergabung sebagai Wartawan Majalah Ekonomi Prospektif di Jakarta di tahun 1999 - 2001. Saat ini penulis sebagai dosen tetap STIE "GICI" dengan mengajar mata kuliah utama Teori Ekonomi Mikro & Makro dan Manajemen Keuangan.

Email : rizal_bakti@yahoo.co.id

Rina Astini

Rina Astini lahir di Kota Palembang, tahun 1969, Pendidikan S1 di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tahun 1993. Pendidikan S2 di Universitas Indonesia pada tahun 2000. Program Doktor (S3) di Universitas Indonesia dalam bidang Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Marketing Jakarta tahun 2012. Saat ini Penulis adalah Dosen Tetap merangkap Ketua Jurusan Manajemen S1 Universitas Mercubuana Jakarta dan mengajar di Universitas Trisakti dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro, Penelitian Pemasaran, Perilaku Konsumen, Strategi Marketing Manajemen, *Marketing Research*, Metode Penelitian Bisnis, *Business Ethic and Good Governance*, Pengambilan Keputusan Manajerial.

Email: chumairoh20@yahoo.com

Andriani Prietedjo

Penulis dilahirkan di Kota Bandung, 11 April 1975. Menyelesaikan gelar S1 jurusan Desain Interior di Universitas Trisakti pada tahun 1998. Pendidikan S2 diselesaikan di ITB pada tahun 2001. Penulis mempunyai pengalaman profesional sebagai *HR Consultant* pada PT. Sukha Teknik Utama dan PT. Total Access Asia. Saat ini Penulis adalah Dosen Tetap STIE "GICI" dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran, Manajemen Strategik, Studi Kelayakan Bisnis, Project Proposal dan Riset Pemasaran, selain itu penulis juga tercatat sebagai Dosen luar biasa di Universitas Trisakti.

Email: rianiand@yahoo.com

Agustini

Agustini lahir di Kota Jakarta, 16 Agustus 1983. Menamatkan pendidikan S1-nya di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta pada tahun 2005. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Trilogi, Jakarta pada tahun 2014. Saat ini Penulis adalah Dosen Tetap STIE "GICI" dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Perilaku Konsumen dan Manajemen Pelayanan. Email: agustini1608@yahoo.co.id

Ahmad Subagyo

Ahmad Subagyo lahir di Kota Pekalongan, 12 Februari 1972. Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Pendidikan terakhirnya diselesaikan di Program Doktorat (S3) dalam bidang Pengkajian Islam dengan konsentrasi Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Saat ini Penulis adalah Dosen Tetap pada STIE GICI Depok. Penulis juga aktif sebagai Peneliti dan Konsultan dalam berbagai proyek di Pemerintah dan swasta dan saat ini masih sebagai Konsultan Analis Koperasi di Bank Dunia. HP: 08156034645.
Email : sahabat@ahmadsubagyo.com

TATA PENULISAN

Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Panjang tulisan antara 6.000–8.000 kata, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Font menggunakan times new roman size 12. Artikel harus disertai abstrak (150-200 kata) dalam dua bahasa; bahasa Indonesia dan Inggris. Panjang tulisan min. 7 halaman dan maksimal 15 halaman. Pengiriman artikel harus disertai dengan alamat dan riwayat hidup singkat penulis. Penulisan *references* harus konsisten di dalam seluruh artikel dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Kutipan dalam teks: nama belakang pengarang, tahun karangan dan nomor halaman yang dikutip

Contoh: (Jones, 2004:15), atau Seperti yang dikemukakan oleh Jones (2004:15).

Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan penulis. tahun penerbitan. *Judul buku*. kota penerbitan: penerbit.

Contoh: Horowitz, Donald. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley: University of California.

Kutipan dari artikel dalam buku bunga rampai: nama belakang, nama depan pengarang. tahun. “judul artikel” dalam nama editor (Ed.), Judul Buku. nama kota: nama penerbit. Halaman artikel.

Contoh: Hugo, Graeme. 2004. “International Migration in Southeast Asia since World War II”, dalam A. Ananta dan E.N.Arifin (Eds.), *International Migration in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hal: 28—70.

Kutipan dari artikel dalam jurnal: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. “Judul artikel”, Nama Jurnal, Vol (nomor Jurnal): halaman.

Contoh: Hull, Terence H. 2003. “Demographic Perspectives on the Future of Indonesian Family”, *Journal of Population Research*, 20 (1):51—65.

Kutipan dari *website*: dituliskan lengkap alamat *website*, tahun dan alamat URL dan html sesuai alamatnya. Tanggal *download*.

Contoh: World Bank. 1998. <http://www.worldbank.org/data/contrydata/contrydata.html> Washington DC. Tanggal 25 Maret.

Catatan kaki (*footnote*) hanya berisi penjelasan tentang teks, dan diketik di bagian bawah dari lembaran teks yang dijelaskan dan diberi nomor.

Pengiriman artikel bisa dilakukan melalui *e-mail*, ataupun pos dengan disertai *disket file*. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Artikel dapat dikirim ke e-mail : bgy2000@yahoo.com